



PEMERINTAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

LAPORAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
(LPPD)  
KABUPATEN MUARA ENIM  
TAHUN 2024



**H. EDISON, S.H., M.HUM**

**BUPATI MUARA ENIM**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Bupati Muara Enim telah memenuhi kewajiban konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), selanjutnya pada Pasal 70 Ayat (3) menyatakan LPPD disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

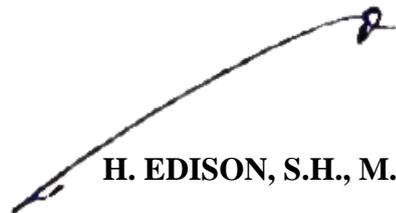
LPPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan, yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintahan Pusat.

Akhirnya, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, dalam mewujudkan Muara Enim yang lebih baik.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Muara Enim, 27 Maret 2025

**BUPATI MUARA ENIM,**



**H. EDISON, S.H., M.HUM**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Penjelasan Umum .....	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah .....	26
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	66
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ...</b>	<b>70</b>
2.1 Capaian Kinerja Makro .....	70
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	71
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil .....	71
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	84
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah .....	87
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN .....</b>	<b>199</b>
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten Muara Enim .....	200
3.1.1 Target Kinerja .....	200
3.1.2 Realisasi .....	201
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten Muara Enim .....	204
3.2.1 Target Kinerja .....	204
3.2.2 Realisasi .....	204
3.3 Permasalahan dan Kendala .....	206
3.4 Saran dan Tindak Lanjut .....	206
<b>BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....</b>	<b>207</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>263</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

#### **1.1.1 Penjelasan Umum**

##### **a. Undang-undang Pembentukan Daerah**

Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan Kabupaten Muara Enim sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang. Desain pengaturan Kabupaten Muara Enim berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat.

Berkaitan dengan itu, dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan untuk menggantikan ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Muara Enim dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956.

##### **b. Data Geografis Wilayah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038, Pasal 3 Ayat (1) bahwa Wilayah Kabupaten Muara Enim memiliki luas wilayah lebih kurang 7.383,90 km<sup>2</sup>, terbagi menjadi 22

kecamatan, terdiri dari 246 desa definitif dan 10 kelurahan.

Jarak terjauh dari Ibu Kota Kabupaten Muara Enim ke Ibu Kota Kecamatan adalah Kecamatan Kelekar yaitu sejauh 250 km, diikuti Kecamatan Muara Belida sejauh 168 km, Kecamatan Sungai Rotan sejauh 150 km, dan Kecamatan Gelumbang sejauh 149 km. Sementara Kecamatan yang terdekat adalah Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul, dan Kecamatan Ujan Mas.

Jika dilihat dari jumlah desa / kelurahan, maka jumlah desa / kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Gelumbang sebanyak 23 Desa/Kelurahan, dengan itu Kecamatan Gelumbang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Muara Enim. Sedangkan Kecamatan Benakat adalah kecamatan dengan jumlah desa / kelurahan paling sedikit yaitu 6 desa.

Kabupaten Muara Enim digolongkan sebagai daerah dataran rendah dan lebih dari 60% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 100 meter dari permukaan laut dan selebihnya berada pada ketinggian lebih dari 100 meter dari permukaan laut dan tersebar di lima kecamatan yaitu Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, Semende Darat Ulu, Tanjung Agung dan Lubai Ulu.

Dari total luas wilayah Kabupaten Muara Enim, 23.407,2 HA merupakan Lahan Sawah, 564.971,8 HA merupakan Lahan Bukan Sawah dan 237.164 HA Lahan Bukan Sawah merupakan Lahan Perkebunan. Kabupaten Muara Enim, secara geografis terletak pada posisi antara 3<sup>o</sup> 0' 40'' sampai 4<sup>o</sup> 22' 39'' Lintang Selatan dan 103<sup>o</sup> 18' 57'' sampai 104<sup>o</sup> 40' 37'' Bujur Timur, dengan batas administrasi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Palembang, Kabupaten PALI, dan Kabupaten Banyuasin dan Kota Prabumulih
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Prabumulih dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kota Prabumulih
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten PALI, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih

Kondisi topografi daerah cukup beragam. Daerah dataran tinggi di bagian barat daya, merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Daerah ini meliputi Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah dan Kecamatan Tanjung Agung. Daerah dataran rendah, berada dibagian tengah. Terus ke utara–timur laut, terdapat daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran Sungai Musi. Daerah ini meliputi Kecamatan Lembak, Gelumbang, dan Sungai Rotan.

### c. Informasi Umum Data Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim sebanyak **645.250** jiwa. Data penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Data Penduduk Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

<b>KECAMATAN</b>	<b>LAKI - LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanjung Agung	15,366	14,731	30,097
Muara Enim	40,668	40,114	80,782
Rambang Niru	18,036	17,246	35,282
Gunung Megang	18,458	17,568	36,026
Gelumbang	32,641	31,441	64,082
Lawang Kidul	38,826	37,910	76,736
Semende Darat Laut	7,796	7,677	15,473
Semende Darat Tengah	5,881	5,597	11,478
Semende Darat Ulu	9,440	8,906	18,346
Ujan Mas	13,971	13,174	27,145
Lubai	14,270	13,494	27,764
Rambang	14,678	14,204	28,882
Sungai Rotan	16,970	16,442	33,412
Lembak	9,975	9,982	19,957
Benakat	5,541	5,107	10,648
Kelekar	6,032	5,683	11,715
Muara Belida	4,310	4,035	8,345
Belimbing	13,836	13,134	26,970
Belida Darat	6,945	6,611	13,556
Lubai Ulu	18,103	16,537	34,640

Empat Petulai Dangku	10,485	10,062	20,547
Panang Enim	6,949	6,418	13,367
<b>JUMLAH</b>	<b>329,177</b>	<b>316,073</b>	<b>645,250</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Muara Enim Tahun 2024

#### d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Jumlah Kecamatan di Kabupaten Muara Enim sebanyak 22 Kecamatan dengan total sebanyak 246 Desa dan 10 Kelurahan. Nama Kecamatan dan Desa dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 1.2**  
**Data Kecamatan dan Desa/Kelurahan**  
**di Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No	Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
1	Tanjung Agung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Embawang</li> <li>2. Pagar Dewa</li> <li>3. Tanjung Bulan</li> <li>4. Lesung Batu</li> <li>5. Pandan Enim</li> <li>6. Paduraksa</li> <li>7. Matas</li> <li>8. Tanjung Agung</li> <li>9. Muara Emil</li> <li>10. Tanjung Karang</li> <li>11. Seleman</li> <li>12. Penyandingan</li> <li>13. Tanjung Lalang</li> <li>14. Pulau Panggung</li> </ol>
2	Muara Enim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanjung Raja</li> <li>2. Karang Raja</li> <li>3. Muara Lawai</li> <li>4. Tanjung Jati</li> <li>5. Lubuk Empelas</li> <li>6. Kel. Tungkal</li> <li>7. Kel. Pasar II</li> <li>8. Kel. Pasar III</li> <li>9. Kel. Pasar I</li> <li>10. Kel. Muara Enim</li> <li>11. Kepur</li> <li>12. Tanjung Serian</li> <li>13. Muara Harapan</li> <li>14. Saka Jaya</li> <li>15. Harapan Jaya</li> <li>16. Kel. Air Lintang</li> </ol>

3	Rambang Niru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gemawang</li> <li>2. Lubuk Raman</li> <li>3. Jemenang</li> <li>4. Tanjung Menang</li> <li>5. Tebat Agung</li> <li>6. Gerinam</li> <li>7. Suban Jeriji</li> <li>8. Air Limau</li> <li>9. Muara Emburung</li> <li>10. Manunggal Jaya</li> <li>11. Air Talas</li> <li>12. Air Enau</li> <li>13. Manunggal Makmur</li> <li>14. Aur Duri</li> <li>15. Kasih Dewa</li> <li>16. Air Cekdam</li> </ol>
4	Gunung Megang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggiran</li> <li>2. Gunung Megang Luar</li> <li>3. Gunung Megang Dalam</li> <li>4. Lubuk Mumpo</li> <li>5. Perjito</li> <li>6. Tanjung Muning</li> <li>7. Tanjung Terang</li> <li>8. Bangun Sari</li> <li>9. Sumaja Makmur</li> <li>10. Sidomulyo</li> <li>11. Pajar Indah</li> <li>12. Kayu Ara Sakti</li> <li>13. Panang Jaya</li> </ol>
5	Gelumbang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gaung Telang</li> <li>2. Pinang Banjar</li> <li>3. Segayam</li> <li>4. Tambangan Kelekar</li> <li>5. Suka Menang</li> <li>6. Karang Endah</li> <li>7. Jambu</li> <li>8. Midar</li> <li>9. Mililian</li> <li>10. Pedataran</li> <li>11. Teluk Limau</li> <li>12. Kerta Mulya</li> <li>13. Sebau</li> <li>14. Sigam</li> <li>15. Payabakal</li> <li>16. Bitis</li> <li>17. Gumai</li> <li>18. Putak</li> <li>19. Talang Taling</li> <li>20. Suka Jaya</li> <li>21. Karang Endah Selatan</li> <li>22. Betung</li> <li>23. Kel. Gelumbang</li> </ol>

6	Lawang Kidul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kel. Tanjung Enim</li> <li>2. Kel. Pasar Tanjung Enim</li> <li>3. Kel. Tanjung Enim Selatan</li> <li>4. Tegal Rejo</li> <li>5. Lingga</li> <li>6. Keban Agung</li> <li>7. Darmo</li> </ol>
7	Semende Darat Laut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penindaian</li> <li>2. Babatan</li> <li>3. Muara Dua</li> <li>4. Muara Danau</li> <li>5. Penyandingan</li> <li>6. Tanah Abang</li> <li>7. Pagar Agung</li> <li>8. Pulau Panggung</li> <li>9. Karya Nyata</li> <li>10. Perapau</li> </ol>
8	Semende Darat Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenam Bungkok</li> <li>2. Kota Padang</li> <li>3. Gunung Agung</li> <li>4. Sri Tanjung</li> <li>5. Tebing Abang</li> <li>6. Batu Surau</li> <li>7. Tanjung Raya</li> <li>8. Muara Tenang</li> <li>9. Rekimai Jaya</li> <li>10. Palak Tanah</li> <li>11. Kota Agung</li> <li>12. Swarna Dwipa</li> </ol>
9	Semende Darat Ulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanjung Tiga</li> <li>2. Cahaya Alam</li> <li>3. Datar Lebar</li> <li>4. Segamit</li> <li>5. Siring Agung</li> <li>6. Aremantai</li> <li>7. Tanjung Agung</li> <li>8. Pajar Bulan</li> <li>9. Pelakat</li> <li>10. Danau Gerak</li> </ol>
10	Ujan Mas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pinang Belarik</li> <li>2. Ujan Mas Lama</li> <li>3. Ujan Mas Baru</li> <li>4. Tanjung Raman</li> <li>5. Muara Gula Baru</li> <li>6. Muara Gula Lama</li> <li>7. Guci</li> <li>8. Ulak Bandung</li> <li>9. Ujan Mas Ulu</li> </ol>

11	Lubai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aur</li> <li>2. Beringin</li> <li>3. Kota Baru</li> <li>4. Pagar Gunung</li> <li>5. Gunung Raja</li> <li>6. Tanjung Kemala</li> <li>7. Suka Merindu</li> <li>8. Jiwa Baru</li> <li>9. Air Asam</li> <li>10. Menanti</li> </ol>
12	Rambang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baru Rambang</li> <li>2. Sugihan</li> <li>3. Tanjung Raya</li> <li>4. Tanjung Dalam</li> <li>5. Sukarami</li> <li>6. Pagar Agung</li> <li>7. Sugih Waras</li> <li>8. Sumber Rahayu</li> <li>9. Marga Mulya</li> <li>10. Kencana Mulia</li> <li>11. Negeri Agung</li> <li>12. Sugihwaras Barat</li> <li>13. Air Keruh</li> </ol>
13	Sungai Rotan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanjung Miring</li> <li>2. Danau Tampang</li> <li>3. Kasai</li> <li>4. Sungai Rotan</li> <li>5. Sukamerindu</li> <li>6. Tanding Marga</li> <li>7. Muara Lematang</li> <li>8. Sukadana</li> <li>9. Modong</li> <li>10. Sukacinta</li> <li>11. Penandingan</li> <li>12. Danau Rata</li> <li>13. Paya Angus</li> <li>14. Sukarami</li> <li>15. Petar Dalam</li> <li>16. Sukajadi</li> <li>17. Sukamaju</li> <li>18. Danau Baru</li> <li>19. Petar Luar</li> </ol>
14	Lembak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petanang</li> <li>2. Talang Nangka</li> <li>3. Alai</li> <li>4. Sungai Duren</li> <li>5. Tapus</li> <li>6. Lembak</li> <li>7. Kemang</li> <li>8. Lubuk Enau</li> <li>9. Alai Selatan</li> <li>10. Tanjung Baru</li> </ol>

15	Benakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Padang Bindu</li> <li>2. Betung</li> <li>3. Pagar Dewa</li> <li>4. Pagar Jati</li> <li>5. Hidup Baru</li> <li>6. Rami Pasai</li> </ol>
16	Kelekar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Embacang Kelekar</li> <li>2. Menanti</li> <li>3. Menanti Selatan</li> <li>4. Suban Baru</li> <li>5. Pelempang</li> <li>6. Teluk Jaya</li> <li>7. Tanjung Medang</li> </ol>
17	Muara Belida	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung Buruk</li> <li>2. Arisan Musi</li> <li>3. Harapan Mulia</li> <li>4. Mulia Abadi</li> <li>5. Arisan Musi Timur</li> <li>6. Patra Tani</li> <li>7. Tanjung Baru</li> <li>8. Kayu Ara Batu</li> </ol>
18	Belimbing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpang Tanjung</li> <li>2. Cinta Kasih</li> <li>3. Teluk Lubuk</li> <li>4. Berugo</li> <li>5. Belimbing</li> <li>6. Bulang</li> <li>7. Belimbing Jaya</li> <li>8. Darmo Kasih</li> <li>9. Dalam</li> </ol>
19	Belida Darat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanjung Bunut</li> <li>2. Babat</li> <li>3. Lubuk Semantung</li> <li>4. Lubuk Getam</li> <li>5. Talang Balai</li> <li>6. Talang Beliung</li> <li>7. Sialingan</li> <li>8. Tanjung Tiga</li> <li>9. Ibul</li> <li>10. Gaung Asam</li> </ol>
20	Lubai Ulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karang Agung</li> <li>2. Karang Sari</li> <li>3. Karang Mulya</li> <li>4. Sumber Mulya</li> <li>5. Sumber Asri</li> <li>6. Pagar Dewa</li> <li>7. Prabumenang</li> <li>8. Lecah</li> <li>9. Mekar Jaya</li> <li>10. Lubai Persada</li> <li>11. Lubai Makmur</li> </ol>

21	Empat Petulai Dangku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Muara Niru</li> <li>2. Kahuripan Baru</li> <li>3. Pangkalan Babat</li> <li>4. Gunung Raja</li> <li>5. Banuayu</li> <li>6. Kuripan</li> <li>7. Kuripan Selatan</li> <li>8. Batu Raja</li> <li>9. Dangku</li> <li>10. Siku</li> </ol>
22	Panang Enim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebak Budi</li> <li>2. Lambur</li> <li>3. Pagar Jati</li> <li>4. Tanjung Baru</li> <li>5. Sukaraja</li> <li>6. Pandan Dulang</li> <li>7. Muara Meo</li> <li>8. Sugih Waras</li> <li>9. Indramayu</li> <li>10. Bedegung</li> <li>11. Padang Bindu</li> <li>12. Lubuk Nipis</li> </ol>

**e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah**

Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 berjumlah 58 OPD dengan uraian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Muara Enim memiliki susunan perangkat daerah sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Rincian Perangkat Daerah di Kabupaten Muara Enim**

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2.	Dinas Kesehatan	
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan	
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	
6.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
8.	Dinas Sosial	
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
10.	Dinas Ketahanan Pangan	

11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12.	Dinas Lingkungan Hidup
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15.	Dinas Perhubungan
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
17.	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
18.	Dinas Koperasi dan UKM
19.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
20.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22.	Dinas Perikanan
23.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
24.	Dinas TPHP
25.	Dinas Perkebunan
26.	Dinas Perindag serta ESDM
27.	Sekretariat Daerah
28.	Sekretariat DPRD
29.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
30.	BPKAD
31.	Badan Pendapatan Daerah
32.	BKPSDM
33.	Balitbangda
34.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
35.	Inspektorat
36.	RSUD DR.H.M. Rabain
37.	Kecamatan Semende Darat Ulu
38.	Kecamatan Semende Darat Tengah
39.	Kecamatan Semende Darat Laut
40.	Kecamatan Tanjung Agung
41.	Kecamatan Lawang Kidul
42.	Kecamatan Muara Enim
43.	Kecamatan Ujan Mas
44.	Kecamatan Benakat
45.	Kecamatan Gunung Megang
46.	Kecamatan Rambang Niru
47.	Kecamatan Lubai
48.	Kecamatan Rambang
49.	Kecamatan Lembak
50.	Kecamatan Kelekar
51.	Kecamatan Gelumbang
52.	Kecamatan Sungai Rotan
53.	Kecamatan Muara Belida
54.	Kecamatan Belimbing
55.	Kecamatan Belida Darat
56.	Kecamatan Lubai Ulu
57.	Kecamatan Empat Petulai Dangku
58.	Kecamatan Panang Enim

**f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah**

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Muara Enim**  
**Tahun 2024**

No	Nama Perangkat Daerah	Usuran Pemerintahan	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usuran Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	15	38	182	235
2.	Dinas Kesehatan		40	23	50	113
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		12	13	30	55
4.	Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat serta Pertanahan		6	14	21	41
5.	Dinas Sosial		5	5	6	16
6.	Satuan Polisi Pamong Praja		14	-	10	24
7.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		10	3	9	22
8.	BPBD		5	-	14	19
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Usuran Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar	6	17	15	38
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		9	9	10	28
11.	Dinas Ketahanan Pangan		6	7	10	23
12.	Dinas Lingkungan Hidup		13	8	31	52
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		8	7	18	33
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		4	8	16	28
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		6	5	8	19
16.	Dinas Perhubungan		18	3	11	32
17.	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian		7	10	14	31
18.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		8	13	9	30
19.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		3	15	9	27
20.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		8	12	10	30
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		7	15	16	38
22.	Dinas Perikanan	Usuran Pilihan	7	8	9	24

23.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		8	7	6	21
24.	Dinas TPHP		15	83	12	110
25.	Dinas Perkebunan		12	17	11	40
26.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta ESDM		12	7	14	33
27.	Sekretariat Daerah	Fungsi Penunjang	18	29	68	115
28.	Sekretariat DPRD		4	7	21	32
29.	BKPSDM		7	9	23	39
30.	Bakesbangpol		6	7	10	23
31.	Bapenda		34	5	34	73
32.	Balitbangda		6	7	6	19
33.	BPKAD		14	4	28	46
34.	Bappeda		8	16	10	34
35.	Inspektorat		6	57	6	69
36.	RSUD Dr. H. M. Rabain			7	8	49
37.	Kecamatan Belida Darat		9	1	6	16
38.	Kecamatan Belimbing		7	1	5	13
39.	Kecamatan Benakat		7	-	7	14
40.	Kecamatan Empat Petulai Dangku		7	-	6	13
41.	Kecamatan Gelumbang		7	-	6	13
42.	Kecamatan Gunung Megang		8	-	3	11
43.	Kecamatan Kelekar		8	-	5	13
44.	Kecamatan Lawang Kidul		9	-	4	13
45.	Kecamatan Lembak		9	-	9	18
46.	Kecamatan Lubai		4	-	4	8
47.	Kecamatan Lubai Ulu		7	1	5	13
48.	Kecamatan Muara Belida		7	1	3	11
49.	Kecamatan Muara Enim		8	-	7	15
50.	Kecamatan Panang Enim		5	-	6	11
51.	Kecamatan Rambang		7	-	8	15
52.	Kecamatan Rambang Niru		8	-	8	16
53.	Kecamatan Semende Darat Laut		5	-	4	9
54.	Kecamatan Semende Darat Tengah		5	-	4	9
55.	Kecamatan Semende Darat Ulu		9	-	6	15
56.	Kecamatan Sungai Rotan		6	-	9	15
57.	Kecamatan Tanjung Agung		6	-	5	11
58.	Kecamatan Ujan Mas		7	-	6	13

Sumber : BKPSDM Kab. Muara Enim Tahun 2024

## f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut. Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 306.635.850.767,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 380.979.531.113,52 atau terealisasi sebesar 124,24%. Sedangkan untuk Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.697.697.501.915,00 dengan total realisasi sebesar Rp. 3.912.789.972.473,16 atau terealisasi sebesar 105,82%. Anggaran Belanja dengan total sebesar Rp. 4.351.719.271.996,21 dan realisasi Belanja sebesar Rp. 3.917.575.110.242,96 atau terealisasi sebesar 90,02%. (*Unaudited*).

**Tabel 1.5**  
**Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Muara Enim 2024**  
**(Unaudited)**

KODE	URAIAN	2024 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
<b>4. PENDAPATAN</b>				
<b>4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	102.118.871.536,00	126.743.710.193,00	124,11
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	120.847.143.074,00	100.805.908.431,31	83,42
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	31.102.654.447,00	31.147.873.242,38	100,15
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.567.181.710,00	105.453.200.113,69	200,61
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>306.635.850.767,00</b>	<b>380.979.531.113,52</b>	<b>124,24</b>
<b>4.2. PENDAPATAN TRANSFER</b>				
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	3.115.940.499.950,00	3.198.030.938.052,00	102,63
4.2.2	Transfer Antar Daerah	261.648.113.501,00	326.615.206.547,22	124,83
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>3.377.588.613.451,00</b>	<b>3.524.646.144.599,22</b>	<b>104,35</b>

KODE	URAIAN	2024 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
<b>4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.325.000.000,00	327.192.879,00	24,69
4.3.2	Pendapatan lainnya	12.148.037.697,00	8.363.579.403,75	68,85
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>		<b>13.473.037.697,00</b>	<b>7.164.296.760,42</b>	<b>53,18</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3.697.697.501.915,00</b>	<b>3.912.789.972.473,16</b>	<b>105,82</b>
<b>5.1. BELANJA OPERASI</b>				
5.1.1	Belanja Pegawai	1.201.350.938.398,66	1.059.547.345.085,03	88,20
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.143.729.958.590,55	997.240.222.419,55	87,19
5.1.3	Belanja Bunga	9.000.000.000,00	7.485.321.723,00	83,17
5.1.4	Subsidi	0	0	0
5.1.5	Hibah	191.550.579.717,00	172.371.975.645	89,99
5.1.6	Bantuan Sosial	3.379.800.000,00	0	0
<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>2.549.011.276.706,21</b>	<b>2.236.644.864.872,58</b>	<b>87,75</b>
<b>5.2. BELANJA MODAL</b>				
5.2.1	Belanja Modal Tanah	12.382.090.321,00	10.194.664.000,00	82,33
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.456.945.366,00	160.953.164.905,00	86,79
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	218.979.431.746,00	202.931.222.921,64	92,67
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	850.855.615.359,00	786.229.627.683,74	92,40
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.792.066.558,00	11.788.479.740,00	99,97
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.541.968.890,00	1.413.209.060,00	91,65

KODE	URAIAN	2024 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
<b>BELANJA MODAL</b>		<b>1.281.008.118.240,00</b>	<b>1.173.510.368.320,38</b>	<b>91,61</b>
<b>5.3. BELANJA TIDAK TERDUGA</b>				
5.3.1	Belanja Tidak Teduga	15.000.000.000,00	720.000.000,00	4,80
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>		<b>15.000.000.000,00</b>	<b>720.000.000,00</b>	<b>4,80</b>
<b>5.4. BELANJA TRANSFER</b>				
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	22.333.351.461,00	22.333.351.461,00	100,00
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	484.366.525.589,00	484.366.525.589,00	100,00
<b>BELANJA TRANSFER</b>		<b>506.699.877.050,00</b>	<b>506.699.877.050,00</b>	<b>100,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>4.351.719.271.996,21</b>	<b>3.917.575.110.242,96</b>	<b>90,02</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>-654.021.770.081,21</b>	<b>-14.785.137.769,80</b>	<b>0,73</b>
<b>6. PEMBIAYAAN</b>				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	660.300.286.213,21	660.300.286.213,21	100,00
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	560.300.286.213,21	560.300.286.213,21	100,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.278.516.132,00	6.278.516.130,00	100,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0

6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.278.516.132,00	6.278.516.130,00	100,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>654.021.770.081,21</b>	<b>654.021.770.083,21</b>	<b>100,00</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)</b>		<b>649.236.632.313,41</b>		
<b>TOTAL APBD</b>		<b>3.917.575.110.242,96</b>		

Sumber : BPKAD Kab. Muara Enim Tahun 2024

**g. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1.</b>	<b>Pendidikan dan Kebudayaan</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	540.571.945.333	519.948.047.921
		Program Pengelolaan Pendidikan	244.722.017.236	238.130.278.351
		Program Pengembangan Kurikulum	1.496.349.175	1.294.957.853
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	18.376.609.815	16.820.665.557
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	44.265.000	14.899.500
		Program Pengembangan Kebudayaan	1.448.316.700	1.310.147.026
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	934.523.700	853.827.798
		Program Pembinaan Sejarah	150.707.800	143.381.000
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	210.015.000	193.962.135
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	212.442.313.179	187.243.392.344
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	187.309.822.574	174.369.071.236
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.589.509.196	7.275.455.154
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	666.112.706	448.548.096

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	584.961.300	409.203.120
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.561.630.365	10.729.385.708
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	104.507.919.798	91.243.195.206
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	21.437.944.519	21.072.014.841
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	55.651.947.000	47.278.450.350
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	15.036.454.763	13.696.935.290
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	63.530.702.538	62.205.058.946
		Program Penyelenggaraan Jalan	605.041.801.014	580.238.307.071
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	376.058.190	43.882.490
		Program Penataan Bangunan Gedung	34.546.681.240	21.820.641.453
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.568.302.062	3.027.992.585
<b>4.</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Pertanahan</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	12.272.276.911	9.640.189.289
		Program Pengembangan Perumahan	2.566.770.900	717.231.020
		Program Kawasan Permukiman	23.083.030.900	22.722.853.400
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Lintas Umum (PSU)	173.653.932.348	168.358.396.104,99
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	507.467.900	403.332.245
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	16.723.054.221	11.887.547.790
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	566.552.500	550.585.514
		Program Penatagunaan Tanah	217.548.100	157.249.700
<b>5.</b>	<b>Trantibumlinmas (Satpol PP)</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	13.733.087.929	11.986.817.101

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.680.905.740	666.799.040
	(DPKP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.630.114.305	15.846.437.881
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	4.314.781.018	3.723.891.840
	(BPBD)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.536.771.737	4.478.173.156
		Program Penanggulangan Bencana	3.147.472.900	2.212.098.682
<b>6.</b>	<b>Sosial</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.578.832.519	11.203.775.928
		Program Pemberdayaan Sosial	12.093.684.634	7.900.926.703
		Program Rehabilitasi Sosial	1.242.675.700	932.707.363
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		
		Program Penanganan Bencana	1.038.855.950	1.010.163.216
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	443.902.126	428.432.431
<b>7.</b>	<b>Ketenagakerjaan dan Transmigrasi</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.115.771.719	8.311.774.818
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	96.090.800	92.041.406
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.669.283.550	2.607.174.041
		Program Penempatan Tenaga Kerja	567.607.459	545.968.515
		Program Hubungan Industrial	722.199.600	717.282.066
<b>8.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	9.505.002.241	8.749.044.680
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	441.067.265	412.685.956
		Program Perlindungan Perempuan	784.478.500	581.963.541
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	391.328.713	356.285.777
		Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	591.198.000	514.977.297
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.245.638.403	1.155.893.314

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Khusus Anak	819.312.300	531.172.650
<b>9.</b>	<b>Pangan</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.842.035.981	5.043.283.122
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2.188.933.500	2.075.500.964
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.948.731.500	2.354.804.559
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	600.359.400	584.809.963
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	429.196.000	336.705.550
<b>10.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	15.744.427.941	11.319.329.916
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	866.125.290	489.098.910
		Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.950.245.705	1.457.615.077
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	384.145.500	70.252.750
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	150.385.360	99.480.760
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	184.218.700	149.306.327
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	57.642.300	50.982.400
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	192.693.800	183.758.777
		Program Penanganan Pengaduan Masyarakat Lingkungan Hidup	171.138.100	167.656.286
		Program Pengelolaan Persampahan	6.201.212.600	5.676.686.600

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>11.</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.173.394.546	7.791.854.949
		Program Pendaftaran Penduduk	2.153.480.140	1.772.346.059
		Program Pencatatan Sipil	563.670.700	386.409.625
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	286.410.300	231.779.734
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	82.336.400	77.879.959
<b>12.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.053.498.323	10.703.822.289
		Program Penataan Desa	20.868.531.520	19.924.950.954
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	196.991.200	193.162.496
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.087.141.400	4.009.603.761
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	4.548.373.960	4.279.223.554
<b>13.</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.538.604.412	7.630.973.892
		Program Pengendalian Penduduk	695.205.189	607.807.197
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.799.075.640	6.175.773.212
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.729.828.209	6.499.758.460
<b>14.</b>	<b>Perhubungan</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.425.027.716	9.937.362.796
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.913.205.287	6.542.218.343
		Program Pengelolaan Pelayaran	476.219.600	467.094.200
<b>15.</b>	<b>Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.453.049.874	7.909.243.911,10
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	7.868.107.040	7.826.318.594
		Program Aplikasi Informatika	11.418.305.350	10.779.453.959

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	428.423.800	427.205.098
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	418.920.200	414.803.509
<b>16.</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.141.245.188	14.807.990.232
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	108.437.000	79.555.894
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	95.107.000	36.773.400
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	381.786.700	363.401.199
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.315.833.100	1.074.493.717
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	1.126.401.400	958.256.116
		Program Pengembangan UKM	1.734.653.300	1.532.552.461
<b>17.</b>	<b>Penanaman Modal</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.597.305.131	8.337.875.281
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	982.612.768	852.361.358
		Program Promosi Penanaman Modal	660.146.600	469.878.929
		Program Pelayanan Penanaman Modal	1.093.519.488	731.418.675
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	699.432.220	470.678.170
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	339.175.638	206.967.832
<b>18.</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.293.797.608	14.336.609.955
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	5.230.084.993	3.464.566.696
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	42.158.158.009,05	32.382.313.207
		Program Pengembangan Kapasitas Pramuka	857.594.240	822.530.074
<b>19.</b>	<b>Perpustakaan dan Kerarsipan</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.309.629.910	6.665.332.679

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kabupaten/Kota		
		Program Pembinaan Perpustakaan	2.661.149.459	2.505.717.635
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	84.512.600	68.395.400
		Pengelolaan Arsip	694.496.400	629.272.620
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	165.440.624	127.113.732
<b>20.</b>	<b>Perikanan</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.666.980.864	5.479.451.019
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.832.246.017	2.741.692.921
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	7.836.326.927	6.837.658.239
		Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	4.304.584.198	3.997.509.679
<b>21.</b>	<b>Pariwisata</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.005.868.839	11.005.140.106
		Program Peningkatan Daya Tarik Daya Destinasi Pariwisata	2.765.866.840	2.721.446.521
		Program Pemasaran Pariwisata	1.707.045.070	1.456.226.424
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	694.974.544	653.159.200
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	119.999.900	102.478.822
<b>22.</b>	<b>Pertanian (DTPHP)</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.063.883.639	22.536.168.742
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	12.762.770.360	11.704.207.000
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	30.972.154.578	29.183.482.889
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.285.417.200	982.069.099
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	719.982.100	641.525.512

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Penyuluhan Pertanian	2.420.767.041	2.228.398.195
	(Disbun)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.294.013.115	9.137.003.015
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.272.688.800	4.940.639.631
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.150.270.800	5.629.407.513
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	491.838.000	379.266.355
		Program Perizinan Usaha Pertanian	1.765.179.525	142.090.950
		Program Penyuluhan Pertanian	645.073.400	530.909.791
<b>23.</b>	<b>Perdagangan, Perindustrian, dan ESDM</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	319.765.000	312.350.000
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	676.255.400	646.697.826
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.042.028.196	9.112.218.228
		Program Peningkatan Sarana Distribusi	10.794.498.238	10.550.354.100
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting	1.485.016.300	824.639.986
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	514.920.300	436.944.797
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100.452.700	93.715.000
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.157.901.363	2.138.391.146
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri	506.161.275	496.875.604
<b>24.</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan (Sekretariat Daerah)</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	78.324.495.061	70.094.783.330
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	16.254.262.063	14.032.062.496

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Perekonomian dan Pembangunan	6.327.953.971	5.793.164.944
	(Sekretariat DPRD)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42.681.091.507	41.014.736.741
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	49.950.176.650	41.302.987.645
<b>25.</b>	<b>Pemerintahan Umum</b> (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.988.104.447	4.986.612.417
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.382.416.767	2.276.621.767
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	62.028.105.245	61.872.139.392
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	509.705.000	496.327.166
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	693.845.900	656.131.349
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	48.726.429.000	46.891.160.213
<b>26.</b>	<b>BPKAD</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90.529.892.900,66	45.404.269.807
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	535.964.528.876	518.990.744.277
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.444.182.839	2.763.198.840
<b>27.</b>	<b>Kepegawaian Daerah</b> (BKPSDM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.609.429.585	30.446.859.619
		Program Kepegawaian Daerah	6.245.563.820	4.865.346.449
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.437.011.098	2.993.875.113
<b>28.</b>	<b>Pengawasan</b> (Inspektorat)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.695.266.928	16.561.883.838
		Program Penyelenggaraan	3.828.065.400	2.608.381.773

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pengawasan		
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	2.268.433.040	666.833.080
<b>29.</b>	<b>Bapenda</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.796.646.717	18.284.028.742
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.224.902.045	5.990.783.798
<b>30.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.781.861.563	4.385.443.584
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.335.225.475	3.391.753.921
<b>31.</b>	<b>Bappeda</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.192.656.615	10.592.782.807
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.800.910.037	2.355.697.208
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.623.612.800	3.205.350.502

Sumber : Perangkat Daerah Pengampu Kab. Muara Enim Tahun 2024

## **1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah**

### **a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026, permasalahan strategis di Kabupaten Muara Enim merupakan rumusan dari berbagai permasalahan yang perlu diatasi melalui berbagai strategi dan kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan atau isu strategis yang tertuang pada RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

#### **1) Pemerataan dan Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan**

Pengukuran keberhasilan kinerja pemerintah daerah, salah satunya dapat diukur dari persentase capaian penurunan angka kemiskinan. Berkurangnya penduduk miskin, mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat semakin meningkat, sebaliknya peningkatan persentase masyarakat miskin mengindikasikan penurunan kemampuan ekonomi penduduk.

Persentase kemiskinan Kabupaten Muara Enim pada tahun 2023 sebesar 10,93 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 9,79 persen. Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan penduduk melalui berbagai program kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin.

#### **2) Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari kondisi perekonomian daerah yang terjadi secara berkesinambungan untuk mewujudkan keadaan suatu daerah yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan merupakan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim, merupakan salah satu program yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. PSN tersebut diantaranya yaitu pembangunan Kawasan Industri Bukit Asam Tanjung Enim yang berlokasi di Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung.

PSN tersebut telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.

Walaupun mengalami penurunan dari tahun 2023, pada tahun 2024 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muara Enim merupakan tertinggi di Sumatera Selatan dengan didominasi sektor pertambangan, yakni 5,89 persen dimana mencatatkan angka yang melampaui nasional sebesar 5,03 persen.

### **3) Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran**

Bekerja merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir.

Pengangguran terbuka adalah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan, penduduk sedang mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum memulai bekerja, serta penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Muara Enim sebesar 3,92 persen dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 4,09 persen. Pemerintah Kabupaten Muara Enim perlu untuk melakukan upaya alam mendorong penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, diantaranya yaitu melalui peningkatan peluang kerja yang layak bagi masyarakat, meningkatkan investasi daerah sebagai upaya meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat, meningkatkan keterampilan, dan menumbuhkembangkan jiwa wirausaha dan kemandirian masyarakat.

### **4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan**

Pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu sektor pelayanan dasar yang harus dipenuhi secara optimal dan menjadi prioritas pembangunan bagi Pemerintah Daerah. Kualitas pelayanan

pendidikan dan kesehatan harus selalu ditingkat oleh Pemerintah Daerah, guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk menilai kualitas layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, diantaranya yaitu Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Angka Harapan Hidup. Jika dilihat kinerja bidang pendidikan dalam 5 (lima) tahun terakhir, yang tertuang dalam capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah, hal tersebut masih perlu ditingkatkan. Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2023 sebesar 8,14 tahun dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 8,27 tahun. Rata-rata Lama Sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Hal ini masih perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

## **5) Penguatan Sektor Pertanian**

Perekonomian Kabupaten Muara Enim masih didominasi oleh sektor primer, yaitu sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini selaras dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Muara Enim. Produk pertambangan dan pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Muara Enim, sektor primer berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yaitu 75,85 persen dari total PDRB. Kontribusi sektor primer berasal dari kategori pertambangan dan penggalian sebesar 69,59 persen dan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 6,26 persen.

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan Kabupaten Muara Enim, dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB yang cukup besar. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk ditingkatkan.

## **6) Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah**

Pembangunan infrastruktur yang mendukung dan memperlancar aktifitas ekonomi perlu dilakukan. Potensi sumber daya alam yang berlimpah di Kabupaten Muara Enim, dapat dimanfaatkan dengan optimal, apabila didukung dengan sarana transportasi yang memadai. Arus barang dan jasa antar wilayah dapat berjalan dengan lancar, apabila didukung dengan infrastruktur transportasi yang layak.

Di bidang jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim terus melakukan pembangunan dan perbaikan jalan guna mendukung kelancaran transportasi arus barang dan jasa. Pembangunan jalan diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat ke pusat layanan publik. Selain itu, Pemerintah Pusat telah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang infrastruktur jalan yang dibangun di Kabupaten Muara Enim, yaitu pembangunan jalan tol Indralaya-Muara Enim dan Muara Enim-Lubuk Linggau. Pembangunan jalan tol dengan panjang  $\pm$  119 Km, diharapkan mampu meningkatkan keterhubungan antar wilayah dan menjadi akses jalan alternatif bagi masyarakat.

## **7) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

Pertumbuhan dan perkembangan pusat kota atau kegiatan masyarakat, yang disebabkan oleh peningkatan investasi, aktivitas ekonomi, dan pertumbuhan penduduk, selain memberikan dampak ekonomi terhadap pertumbuhan daerah, hal tersebut juga memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup. Kondisi ekologi dan ekosistem akan terpengaruh oleh kehadiran aktivitas industri dan masyarakat, sehingga apabila tidak ditata dan dikelola dengan baik, hal tersebut dapat mengurangi kualitas lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Muara Enim harus mempertimbangkan dan memperhatikan keberlangsungan dan keseimbangan lingkungan hidup dengan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim tidak hanya mendorong peningkatan eksploitasi dan eksplorasi potensi sumber daya alam yang

dimiliki, akan tetapi juga harus memperimbangkan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Muara Enim harus melakukan upaya mitigas potensi bencana dan perubahan iklim yang kemungkinan terjadi di Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dilakukan oleh BNPB RI, Skor IRBI Kabupaten Muara Enim tahun 2023 sebesar 144,08 dengan kelas risiko tinggi. Berbagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian resiko bencana dan perubahan iklim dengan melakukan kesiapan, penyadaran, pemantuan, dan perencanaan penanggulangan harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan baik dan tepat sasaran, hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir dampak potensi bencana yang kemungkinan terjadi di Kabupaten Muara Enim.

## **Permasalahan Per Urusan**

1. Pendidikan
  - a) Indikator kinerja persentase pendidikan anak usia dini APK PAUD dengan capaian kinerja 57,10%. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terutama di daerah pedesaan.
  - b) Indikator kinerja rasio guru sertifikasi per murid jenjang SD dengan capaian kinerja 56,28% dan jenjang SMP sebesar 56,28%, hal ini masih perlu ditingkatkan.
  - c) Prasarana dan sarana sekolah dan penunjang masih perlu ditingkatkan.
2. Kesehatan
  - a) Prasarana dan sarana pelayanan kesehatan, di berbagai tingkat Fasilitas Kesehatan masih perlu ditingkatkan.
  - b) Pelayanan kesehatan kepada usia produktif 15-59 tahun, pelayanan kesehatan kepada usia lanjut, penderita diabetes militus, hipertensi, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan orang dengan resiko terinfeksi HIV masih perlu ditingkatkan.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - a) Prasarana dan sarana penghubung yang mendukung peningkatan pelayanan publik, diantaranya jalan dan jembatan serta sarana gedung kantor masih perlu ditingkatkan.

- b) Belum optimalnya pengendalian banjir di beberapa wilayah Kabupaten Muara Enim.
  - c) Fungsi jaringan irigasi dan bangunan pelengkapannya masih perlu ditingkatkan.
  - d) Masih rendahnya Rumah Tangga mempunyai jamban sendiri sebesar 87,82% dan Rumah Tangga pengguna air bersih sebesar 71,36%. Hal ini masih perlu ditingkatkan.
  - e) Masih rendahnya Rumah Tangga Pengguna Air Leding dan Kemasan sebesar 28,90. Hal ini masih perlu ditingkatkan.
4. Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
- a) Belum optimalnya program pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
  - b) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pembangunan Kawasan perumahan dan permukiman.
  - c) Belum akuratnya database sektor perumahan dan Kawasan permukiman di Kabupaten Muara Enim.
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- a) Kualitas sumber daya manusia yang menangani urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat perlu ditingkatkan.
  - b) Prasarana dan sarana pendukung Perangkat Daerah yang menangani urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat perlu ditingkatkan.
6. Sosial
- a) Cakupan layanan program kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat masih perlu ditingkatkan.
  - b) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih perlu dioptimalkan.
7. Tenaga Kerja
- a) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 sebesar 4,12 dan cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya, dan ini perlu dipertahankan sehingga TPT di Kabupaten Muara Enim dapat ditekan.
  - b) Masih rendahnya kesadaran perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim untuk mentaati peraturan perundangundangan di bidang tenaga kerja.

- c) Prasarana dan sarana workshop dan Balai Latihan Kerja (BLK) masih perlu ditingkatkan.
  - d) Peran petugas mediator hubungan industrial perlu dioptimalkan.
6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan belum optimal.
  - b) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
  - c) Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 14 kasus dan pada tahun 2022 menjadi sebanyak 25 kasus.
  - d) Belum optimalnya upaya pencegahan KDRT.
  - e) Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih terhambat dikarenakan faktor psikologis keluarga dan budaya masyarakat, sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
  - f) Masih rendahnya partisipasi dan keterlibatan Forum Anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, Kecamatan.
7. Pertanahan
- a) Proses pensertifikatan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Kabupaten Muara Enim berlangsung lama, serta beberapa permasalahan tanah seringkali membutuhkan intervensi keputusan pemerintah pusat.
  - b) Beberapa Perangkat Daerah belum melakukan perencanaan pengadaan tanah atau menyusun dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagai dasar pengadaan tanah.
8. Lingkungan Hidup
- a) Semakin bertambahnya jumlah Perusahaan terutama di bidang Energi dan Pertambangan serta aktifitas pendukung dan pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional di wilayah Kabupaten Muara Enim yang berpotensi mengakibatkan sumber pencemaran di wilayah Kabupaten Muara Enim.

9. Kependudukan dan Catatan Sipil
  - a) Indikator kinerja Persentase Pasangan Berakta Nikah (Non Muslim) dengan capaian kinerja 102%. Hal ini disebabkan masih banyaknya pasangan nikah non muslim yang belum mendaftarkan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, belum banyaknya kerjasama dengan lembaga atau yayasan yang menaungi tempat ibadah non muslim.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - a) Belum terbentuknya lembaga ekonomi secara menyeluruh seperti BUMDes di tiap-tiap desa yang berguna untuk meningkatkan PAD Desa.
  - b) Perlu peningkatan kompetensi aparatur Pemerintah Desa terhadap pemahaman peraturan perundang-undangan.
11. Perhubungan
  - a) Indikator kinerja Rasio Izin trayek dengan capaian kinerja 50%. Hal ini disebabkan jumlah angkutan umum dalam trayek (angkutan perdesaan) tidak mengalami penambahan bahkan berkurang akibat adanya BUS BRT yang mengalami kerusakan (tidak beroperasi).
  - b) Masih perlunya peningkatan prasana dan sarana perlengkapan jalan.
12. Komunikasi dan Informatika
  - a) Belum semua desa di Kabupaten Kabupaten Muara Enim terjangkau jaringan internet menggunakan jaringan kabel fiber optik.
  - b) Perlu peningkatan jaringan layanan internet.
13. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - a) Masih perlu peningkatan promosi produk-produk unggulan UMKM.
  - b) Perlu penguatan daya saing UMKM agar produk UMKM dapat bersaing di pasaran.
14. Penanaman Modal dan Perizinan
  - a) Sulitnya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak perusahaan terkait dengan kewajiban perusahaan yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
  - b) Perlu dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk optimalisasi pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Muara Enim.

15. Kepemudaan dan Olah Raga
  - a) Perlu dilakukan pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta pemenuhan sarana dan prasarana olahraga yang ada.
  - b) Belum optimalnya pembinaan kepada pemuda dalam upaya peningkatan peran pemuda dalam membangun daerah.
  - c) Masih diperlukan peningkatan prasarana dan sarana olahraga yang merata di setiap daerah.
  
16. Perpustakaan dan Kearsipan
  - a) Belum optimalnya pengelolaan dan prasarana dan sarana pendukung perpustakaan
  
17. Pariwisata
  - a) Perlu meningkatkan promosi sektor pariwisata yang ada di setiap daerah Kabupaten Muara Enim.
  - b) Prasarana dan sarana penunjang sektor pariwisata masih perlu ditingkatkan.
  
18. Penanggulangan Bencana
  - a) Masih tingginya terjadinya kebakaran hutan dan lahan baik yang disebabkan alam maupun manusia.
  - b) Adanya wilayah permukiman yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berpotensi terdampak luapan air pada waktu-waktu tertentu.
  - c) Bencana tanah longsor masih sering terjadi dikarenakan kondisi geografis wilayah Kabupaten Muara Enim diakibatkan terjadinya penurunan tanah dasar di daerah perbukitan terutama pada saat musim hujan.
  - d) Masih seringnya terjadi bencana angin puting beliung di Kabupaten Muara Enim.

## **b. Visi dan Misi Kepala Daerah**

### **1. Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan. Visi Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 mempedomani visi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 :

**“KABUPATEN MUARA ENIM YANG SEHAT, MANDIRI, DAN SEJAHTERA”**

Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah:

- **SEHAT** adalah seluruh lapisan masyarakat memiliki badan, jiwa dan sosial yang baik yang memungkinkan hidupnya produktif secara sosial dan ekonomi.
- **MANDIRI** adalah dimana pemerintahan kabupaten dan masyarakat memanfaatkan segala sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menuju tujuan hakiki dari otonomi daerah.
- **SEJAHTERA** adalah dimana seluruh masyarakat seluruh kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan) dapat terpenuhi secara mudah, adil dan merata.

### **2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, akan dicapai melalui Misi sebagai berikut:

- a) Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani;
- b) Mewujudkan masyarakat yang sehat rohani;
- c) Mewujudkan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal;
- d) Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas;
- e) Mewujudkan lembaga pemerintahan yang baik;
- f) Mewujudkan perekonomian yang mempunyai daya saing tinggi;
- g) Mewujudkan masyarakat yang dapat memenuhi hak-hak dasar; dan
- h) Mewujudkan masyarakat yang semakin dapat mengaktualisasikan diri.

### **c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah**

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program-program prioritas yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menetapkan serangkaian program sesuai dengan kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim 2024 adalah sebagai berikut:

**Program Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026**

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)	
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)			
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Kesehatan Jasmani dan Rohani Masyarakat</b>												
1.1	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cakupan pembinaan olahraga	100	100	23.754	100	24.957	100	26.457	100	26.457	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Persentase peningkatan atlet berprestasi			100	100		100		100		100			
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Persentase Cakupan PSM	80	81	4.439	82	4.883	83	5.371	83	5.371	Dinas Kesehatan	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	87	87	5.500	89	6.050	90	6.655	90	6.655	Dinas PUPR	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Persentase penduduk berakses air minum	74	78	15.000	82	15.000	86	15.000	86	15.000	Dinas PUPR	
1.2	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase cakupan pengembangan kapasitas kepramukaan	100	100	588	100	814	100	814	100	814	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)	
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)			
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan); Persentase penegakan Perda	85	85	3.515	85	2.826	85	3.352	85	3.352	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan pembinaan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	2.359	100	2.595	100	2.854	100	2.854	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik	100	100	2.371	100	2.608	100	2.869	100	2.869	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pengawasan terhadap organisasi masyarakat	100	100	1.084	100	1.193	100	1.312	100	1.312	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)	
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)			
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya terhadap organisasi masyarakat	100	100	908	100	999	100	1.099	100	1.099	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan kasus atau kejadian konflik sosial	100	100	996	100	1.095	100	1.205	100	1.205	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase cakupan ketersediaan fasilitas pengurangan sampah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100	100	6.170	100	7.170	100	8.170	100	8.170	Dinas PUPR
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100	100	1.495	100	1.644	100	1.809	100	1.809	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,70	61,84	2.336	61,94	2.570	62,04	2.827	62,04	2.827	Dinas Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)	
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)			
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman hayati	100	100	269	100	296	100	325	100	325	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan pelaku usaha/ kegiatan pengeolaan Limbah B3	75	75	146	80	161	80	177	80	177	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	100	100	184	100	203	100	223	100	223	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang difasilitasi	100	100	63	100	69	100	76	100	76	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat yang peduli lingkungan	75	75	258	75	283	80	312	80	312	Dinas Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)		
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)				
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pelaksanaan pemberian penghargaan lingkungan hidup	75	75	194	75	213	80	235	80	235	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	188	100	207	100	228	100	228	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	16,93	31,92	9.745	34,42	14.919	39,61	20.611	39,61	20.611	Dinas Lingkungan Hidup	
<b>2. Meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal</b>														
	2.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,56	0,57	1.405	0,58	1.545	0,59	1.700	0,59	1.700	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisata	30	35	1.270	40	1.397	45	1.537	45	1.537	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase peningkatan prasarana Ruang Kreatif / Zona Kreatif	20	25	580	27	638	30	702	30	702	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan PAD sektor Pariwisata	50	60	363	70	399	80	439	80	439	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)	
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)			
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Usaha Simpan Pinjam yang memiliki izin	24.70	24.70	220	30.59	220	36.47	220	36.47	220	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang telah dilakukan pengawasan dan Pemeriksaan	62.08	71.56	168	81.04	193	91.00	222	91.00	222	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase cakupan KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	21.23	22.30	105	23.36	121	24.41	139	24.41	139	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang bersertifikat	6.67	7.56	680	8.43	680	9,3	782	9,3	782	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	82,97	83.36	1.314	83.75	1.511	84.15	1.738	84.15	1.738	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	7.05	7.94	1.366	8.93	1.639	10.04	1.967	10.04	1.967	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas	8.15	8.55	1.459	8.95	1.751	9.35	2.101	9.35	2.101	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang Bermitra Dengan UMKM	100	100	734	100	808	100	889	100	889	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)	
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)			
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase minat penanaman modal	100	100	594	100	654	100	654	100	654	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase cakupan data/informasi pelayanan penanaman modal	100	100	775	100	853	100	938	100	938	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dalam miliar	907	927	708	947	779	967	857	967	857	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase izin terbit perizinan dan non perizinan yang diselesaikan	100	100	547	100	602	100	662	100	662	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Presentase pertumbuhan Industri kecil dan menengah	6,2	6,5	644	6,8	672	6,9	677	6,9	677	Dinas Perdagangan
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Presentase pembinaan usaha industri kecil dan menengah	20	20	810	20	870	20	930	20	930	Dinas Perdagangan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Presentase pengelolan Sistem Informasi Industri Nasional	20	20	560	20	596	20	636	20	636	Dinas Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Presentase Peningkatan Nilai Ekspor	n/a	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Perdagangan

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)	
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)			
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pedagang/pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pemasaran produk	60	60	95	60	100	60	105	60	105	Dinas Perdagangan
	2.2	Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura		14.077		15.284		16.613		16.613	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			- Padi	1,5	1,5		1,5		1,5		1,5		
			- Sayuran	5,5	5,5		5,5		5,5		5,5		
			- Buah-buahan	5	5		5		5		5		
			- Daging	3	3		3		3		3		
			- Telur	3	3		3		3		3		
			Luas Penangkar Benih yang bersertifikat (Ha)	141,35	154,2		167,05		179,9		179,9		
			Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Penanggiran	20	20		30		50		50		
			Pengembangan Kawasan BBI Panang Enim	20	20		30		50		50		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian			10.190		19.009		12.910		12.910	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)	
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)			
			- Pembangunan irigasi	5	5	5	5	5	5	5			
			- Pembangunan jalan usaha tani	5	5	5	5	5	5	5			
			- Pembangunan embung	5	5	5	5	5	5	5			
			- Pembangunan Rumah Potong Hewan	5	5	5	5	5	5	5			
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Tingkat Kematian Ternak			1.402		1.542		1.696		1.696	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			- Ternak Besar	1	1		1		1		1		
			- Ternak Kecil	1	1		1		1		1		
			- Unggas	5	5		5		5		5		
			Persentase tingkat Produksi Produk Hasil Peternakan	2,5	2,5		2,5		2,5		2,5		
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan kelompok tani yang terdampak gangguan perlindungan tanaman	100	100	404	100	444	100	488	100	488	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan Pembinaan Lembaga Tani			1.401		1.541		1.695		1.695	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			- Pemula	2	2		2		2		2		

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)		
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)				
			- Lanjut	2	2		2		2		2			
			- Madya	0,5	0,5		0,5		0,5		0,5			
			- Utama	0.05	0.05		0.05		0.05		0.05			
			Persentase transfer teknologi pertanian tepat guna	30	30		30		30		30			
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas Lahan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dalam hektar	1387	1387	4.172	1387	4.708	1387	5.178	1387	5.178	Dinas Perkebunan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian	100	100	3.259	100	3.585	100	3.944	100	3.944	Dinas Perkebunan
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Perlindungan Tanaman Perkebunan	97	97	373	97	410	97	452	97	452	Dinas Perkebunan
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Perizinan Jenis Usaha Pertanian	1	1	67	1	67	1	67	1	67	Dinas Perkebunan
			Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Jenis Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan	3	3	636	3	700	3	770	3	770	Dinas Perkebunan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Perairan Umum Daratan yang terkelola	3	10	1.199	20	1.319	30	1.451	30	1.451	Dinas Perikanan

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)	
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)			
			Persentase pelaku Utama/Pelaku Usaha perikanan Tangkap yang meningkat usahanya	12,5	12,89		13,68		14,21		14,21		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Kawasan Perikanan budidaya yang terkelola	100	100	5.644	100	6.208	100	6.829	100	6.829	Dinas Perikanan
			Persentase pelaku Utama/Pelaku Usaha perikanan Budidaya yang meningkat usahanya	2,44	5,47		5,83		6,2		6,2		
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Sumberdaya Perikanan Tangkap di Perairan Umum Daratan yang Terawasi	5	5	520	10	546	15	573	15	573	Dinas Perikanan
			Persentase Usaha Pembudidayaan Ikan di Perairan Umum Daratan yang Terawasi	10	10		15		20		20		
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase nilai tambah produk hasil perikanan	100	100	1.890	100	1.984	100	2.084	100	2.084	Dinas Perikanan
			Persentase ketersediaan pasokan ikan Unit Pengolahan Ikan	100	100		100		100		100		

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)	
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)			
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	60	70	31.087	80	31.087	90	31.087	90	31.087	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	60	60	18.299	70	18.299	80	18.299	80	18.299	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Permukiman	Persentase peningkatan luas kawasan permukiman	n/a	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas PUPR
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung dan lingkungan atau kawasan yang sesuai dengan intensitas dan pemanfaatan ruang	53,5	85	10	87	80	90	80	90	80	Dinas PUPR
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	persentase Luas bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan prinsip dan pemanfaatan ruang	70	72	3	75	3	78	4	78	4	Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	95,33	95,8	134.567	96,03	143.498	96,58	152.872	96,58	152.872	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	persentase peningkatan kualifikasi usaha bagi badan usaha jasa konstruksi	90	90	300	90	300	90	400	90	400	Dinas PUPR
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase peningkatan kerjasama desa	70	75	242	80	254	85	267	85	267	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)		
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)				
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan kinerja pengelolaan administrasi desa	60	65	3.686	70	3.871	75	4.064	75	4.064	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia</b>													
	3.1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,48	69,58	196.603	69,68	221.649	69,78	250.301	69,78	250.301	Dinas Kesehatan
				Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01		
				Rasio Puskesmas, poliklinik,ustu per satuan penduduk	0,24	0,24		0,24		0,24		0,24		
				Angka Kematian Bayi	5,3	5,2		5,1		5		5		
				Angka Kematian Ibu	75	74		73		72		72		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan	90	91	17.964	92	19.760	93	21.737	93	21.737	Dinas Kesehatan	
			Rasio Tenaga Dokter per satuan penduduk	0,41	0,42		0,43		0,44		0,44			
			Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	5,1	5,2		5,3		5,4		5,4			

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)		
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)				
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Ketersediaan Farmasi, alkes dan makanan dan minuman	80	81	222	82	244	83	268	83	268	Dinas Kesehatan	
	3.2	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi PAUD	35	36	199.777	37	209.766	38	220.254	38	220.254	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	100	100		100		100		100			
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	100	100		100		100		100			
			Angka Putus Sekolah (APS) SD	0	0		0		0		0			
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP	0	0		0		0		0			
			Angka Kelulusan (AL) SD	100	100		100		100		100			
			Angka Kelulusan (AL) SMP	100	100		100		100		100			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	100	100		100		100		100			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95,18	98,18		100		100		100			
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD	91,12	94,12		97,12		100		100			
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	85,01	88,01		91,01		94,01		94,01			
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase SD yang telah mengembangkan kurikulum muatan lokal	50	55	1.383	60	1.452	65	1.525	65	1.525	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)	
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)			
			Persentase SMP yang telah mengembangkan kurikulum muatan lokal	55	60		65		70		70		
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru SD yang telah tersertifikasi	50	53	28.034	56	29.436	59	30.908	59	30.908	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase guru SMP yang telah tersertifikasi	82,95	85,95		88,95		91,95		91,95		
			Persentase tenaga kependidikan SD yang telah memenuhi kualifikasi minimal S1	100	100		100		100		100		
			Persentase tenaga kependidikan SMP yang telah memenuhi kualifikasi minimal S1	100	100		100		100		100		
		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Pengembangan Bahasa dan Sastra	100	100	578	100	606	100	637	100	637	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah	100	100	1.129	100	1.185	100	1.244	100	1.244	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional	100	100	745	100	783	100	822	100	822	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)		TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)
						TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)							
			Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan dan pengembangan wawasan sejarah daerah	100	100	339	100	356	100	374	100	374	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cakupan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya daerah	100	100	215	100	225	100	237	100	237	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
			Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase cakupan pelestarian dan pengelolaan museum daerah	100	100	1.208	100	1.268	100	1.331	100	1.331	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	3.3	Meningkatkan daya beli masyarakat	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100	100	314	100	345	100	380	100	380	Dinas Ketenagakerjaan				
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks kualitas pelayanan perekonomian dan pembangunan	100	100	5.694	100	6.263	100	6.889	100	6.889	Sekretariat Daerah				
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase koefisien harga barang kebutuhan pokok	10	10	726	10	763	10	801	10	801	Dinas Perdagangan				
<b>4.</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan</b>																	
	4.1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah	WTP	WTP	435.120	WTP	580.183	WTP	593.091	WTP	593.091	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)		
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)				
			Daerah											
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Daerah			6.523		7.175		7.892		7.892	Badan Pendapatan Daerah	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang terinventaris dengan baik	80	80	3.912	80	4.107	80	4.313	80	4.313	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	4.2	Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi yang didiseminasikan dan dipublikasikan	100	100	7.252	100	7.977	100	8.775	100	8.775	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Aplikasi Informatika	Persentase terlayannya kebutuhan aptika OPD	100	100	8.512	100	9.363	100	10.300	100	10.300	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks kepuasan pengguna data statistik sektoral	80	80	305	80	336	80	369	80	369	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase cakupan terpenuhinya keamanan Informasi Pemerintah Daerah	90	90	373	90	411	90	452	90	452	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)		
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)				
	4.3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks kualitas pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100	100	15.180	100	16.698	100	18.368	100	18.368	Sekretariat Daerah
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	1.475.048	100	1.474.688	100	1.581.489	100	1.581.489	Seluruh Perangkat Daerah
			Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100	100	3.541	100	3.871	100	4.077	100	4.077	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah	100	100	5.567	100	5.852	100	5.852	100	5.852	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Program Kebijakan Kepegawaian perangkat daerah	100	100	4.785	100	5.264	100	5.790	100	5.790	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Program Kebijakan Kepegawaian perangkat daerah	100	100	6.733	100	7.406	100	8.147	100	8.147	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Predikat Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	8.360	Sangat Inovatif	9.614	Sangat Inovatif	11.057	Sangat Inovatif	11.057	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)	
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)			
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meingkatnya Kualitas Hasil Pengawasan	100	100	4.825	100	5.549	100	6.381	100	6.381	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Terwujudnya Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi serta Sistem dan Prosedur Pengawasan yang baik	100	100	1.636	100	2.136	100	2.636	100	2.636	Inspektorat
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	3.352	100	3.641	100	3.942	100	3.942	Seluruh PD Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	1.717	100	1.647	100	1.808	100	1.808	Seluruh PD Kecamatan
	4.4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	90	90	33.062	90	33.232	90	36.469	90	36.469	Sekretariat DPRD
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	27.564	100	74.677	100	41.231	100	41.231	RSUD M. Rabain
			Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	90	92	1.550	93	1.650	95	1.500	95	1.500	Dinas Perdagangan

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)	
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)			
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	13,28	14,06	15.867	15,63	15.777	15,63	8.534	15,63	8.534	Dinas Perdagangan
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang sudah di tera ulang	8	9	1.000	10	1.000	11	1.000	11	1.000	Dinas Perdagangan
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75	78	3.895	81	4.239	84	4.712	84	4.712	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	71,47	76,47	5.033	81,47	5.285	86,47	5.549	86,47	5.549	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Presentase Cakupan Makam Pahlawan Dan tugu perjuangan yang terpelihara	100	100	601	100	661	100	728	100	728	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	n/a	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Sosial
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah kasus penyelesaian sengketa Tanah Garapan	5	5	223	5	245	5	269	5	269	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)	
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)			
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	93,5	93,8	5.027	94	5.530	94,5	6.083	94,5	6.083	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang ditetapkan	n/a	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Pemanfaatan Tanah Kosong	58	60	49	63	54	65	59	65	59	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penatagunaan Tanah	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pertanahan	5	6	84	7	92	8	102	8	102	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	99	99	1.984	99	2.183	99	2.401	99	2.401	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	69	75	615	80	677	85	745	85	745	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Layanan Informasi Data Kependudukan	99	99	869	99	955	99	1.050	99	1.050	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Profil Kependuduakn	99	99	198	99	218	99	240	99	240	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)	
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)			
		Program Penataan Desa	Persentase cakupan prasarana sarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	60	65	18.396	75	19.316	80	20.281	80	20.281	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	85	87	427	89	458	91	489	91	489	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Ijin Trayek	0,02	0,02	795	0,02	838	0,02	956	0,02	956	Dinas Perhubungan
			Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum	13,05	13,05		13,05		13,1		13,1		
			Persentase kepemilikan KIR Angkutan tak Umum	87,36	87,5		87,75		88,1		88,1		
			Persentase pemasangan rambu-rambu	45,62	50		55		60		60		
		Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase layanan angkutan sungai	40	50	385	60	424	70	466	70	466	Dinas Perhubungan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,35	0,36	2.621	0,38	2.871	0,39	3.158	0,39	3.158	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)		
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)				
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	50	50	113	50	125	50	137	50	137	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	26	27	850	28	935	29	1.028	29	1.028	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perangkat Daerah/Kecamatan yang menyerahkan Arsip Statis	2	4	82	6	91	8	100	8	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase pembinaan warga eks transmigrasi	n/a	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Ketenagakerjaan	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	10.935	100	11.924	100	13.015	100	13.015	Seluruh PD Kecamatan	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	14.655	100	15.637	100	17.210	100	17.210	Seluruh PD Kecamatan	
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	4.425	100	4.553	100	4.977	100	4.977	Seluruh PD Kecamatan	
<b>5.</b>	<b>Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat</b>													
	5.1	Meingkatkan penanganan PPKS	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase cakupan pemberdayaan Sosial	92	96,75	11.839	96,75	12.681	96,75	13.590	96,75	13.590	Dinas Sosial

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)		
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)				
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dapat direhabilitasi	85	90	1.386	90	1.618	90	1.855	90	1.855	Dinas Sosial	
		Program Penanganan Bencana	Presentase Bencana yang tertangani	95	98	884	98	972	98	1.069	98	1.069	Dinas Sosial	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	80	95	908	95	993	95	1.086	95	1.086	Dinas Sosial	
	5.2	Menurunkan tingkat penangguran terbuka	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase cakupan pembinaan kepemudaan	100	100	4.236	100	4.236	100	4.236	100	4.236	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	50	52	106	55	116	60	128	60	128	Dinas Ketenagakerjaan
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	74,16	75,16	2.492	76,16	2.741	77,16	3.015	77,16	3.015	Dinas Ketenagakerjaan
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat kesempatan kerja	73,9	73,9	454	73,91	499	73,91	549	73,91	549	Dinas Ketenagakerjaan

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)	
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)			
	5.3	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	24,8	26	718	27,6	754	29,6	792	29,6	792	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pening. Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	90	90	3.173	90	3.331	90	3.498	90	3.498	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	85	85	394	85	414	85	435	85	435	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	60	60	383	60	402	60	422	60	422	Dinas Ketahanan Pangan
	5.4	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk	Program Pengendalian Penduduk	100	100	1.152	100	1.202	100	1.702	100	1.702	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	65	66	6.664	67	7.064	68	7.664	68	7.664	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	53	53,2	6.424	53,4	6.833	53,6	7.324	53,6	7.324	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)	
						TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)			
	5.5	Meningkatkan kualitas layanan hunian masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Korban Bencana atau Rumah yang Terdampak Relokasi akibat Program Pemerintah yang memiliki Rumah Layak Huni	91,73	91,74	1.280	91,75	1.408	91,76	1.548	91,76	1.548	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani dalam hektar	1,5	2	16.454	2,5	18.099	3	19.909	3	19.909	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio permukiman layak huni	n/a	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Ketersediaan PSU Permukiman	51	52	37.382	53	41.121	54	45.233	54	45.233	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase cakupan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan kawasan permukiman	15	15	60	25	66	35	73	35	73	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp (dalam juta)		
					TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)				
<b>6.</b>	<b>Meningkatnya peran serta dan kesetaraan masyarakat dalam pembangunan daerah</b>													
	6.1	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan data gender dan anak	2 dok	2 dok	285	2 dok	313	2 dok	345	2 dok	345	Dinas PPPA
	6.2	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan PUG	25	28	713	28	713	30	713	30	713	Dinas PPPA
<b>7.</b>	<b>Meningkatkan pemenuhan hak anak</b>													
	7.1	Meningkatkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan yang mendapat layanan penganganan pengaduan oleh petugas	100	100	330	100	380	100	480	100	480	Dinas PPPA
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang terbentuk	20	20	58	20	64	20	70	20	70	Dinas PPPA
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak	5	5	552	5	579	5	608	5	608	Dinas PPPA
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak kasus kekerasan yang mendapat layanan perlindungan	100	100	419	100	469	100	519	100	519	Dinas PPPA

#### **d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan**

Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 berdasarkan RKPD Tahun 2024. Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim membentuk susunan Perangkat Daerah sebagai organisasi yang melaksanakan amanat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap perangkat daerah wajib menyusun program dan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim. Program setiap urusan wajib dan urusan pilihan serta urusan pendukung pemerintahan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim  
Tahun 2024 telah dilakukan penyesuaian sebagai berikut :

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan jasmani dan rohani masyarakat	Penilaian Capaian Kabupaten Sehat	Padapa (71-80)
2.	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	0,6
3.	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	Indeks Kota Toleran	5,08
4.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,84
5.	Meningkatnya pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal	Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	5,54
6.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	6,60
7.	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	0,319
8.	Meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	69,79
9.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Usia Harapan Hidup	69,63
10.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	12,00
		Rata-Rata Lama Sekolah	7,98
11.	Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran Perkapita	11.450
12.	Meningkat akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	B
13.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B
14.	Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	3.00
15.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Predikat SAKIP	BB
16.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kualitas Pelayanan Publik	4.22
17.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	10.71
18.	Meningkatkan penanganan PPKS	Persentase Penurunan Penanganan PPKS	81,73
19.	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,00
20.	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	87,00
21.	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,02
22.	Meningkatkan kualitas layanan hunian masyarakat	Persentase Rumah Layak Huni	93.88
23.	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan masyarakat dalam pembangunan daerah	Indeks Pengarustamaan Gender	89.76
		Indeks Pemberdayaan Gender	74.52
24.	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase Peningkatan IPG	0.09
25.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Persentase Peningkatan IDG	2.87
26.	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	Nindya
27.	Meningkatkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Persentase Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	6.10

### **1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang akan menjadi tolok ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, untuk itu pemerintah daerah diharapkan mampu menyelenggarakan urusan wajib sesuai dengan yang ditetapkan dalam SPM masing-masing sesuai petunjuk Kementerian/Lembaga terkait dan dapat memprioritaskan pendanaan pelaksanaan daerah dalam belanja daerah dan wajib melaporkan penerapan SPM, karena hasil penerapan SPM akan digunakan untuk merumuskan kebijakan nasional dan sebagai pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif dengan mempertimbangkan keuangan negara.

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonomi pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatnya secara terus menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan akses pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintahan di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, maka pelayanan yang diberikan bukan hanya pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar. pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan mau pun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggung jawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah Diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Untuk urusan Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan SPM menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi Pemerintah Kabupaten / Kota yang menjadi urusan wajib terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut, Pemerintah Daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing, dalam menyusun Laporan Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Peraturan Perundang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 12); dan
15. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 66/KPTS/I/2024 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara umum. Capaian Kinerja Makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat Pihak Swasta dan Pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian Kinerja Makro dapat dilihat dengan menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Laju Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,33	73,10	1,065
2	Angka Kemiskinan	10,93	9,79	-10,43
3	Angka Pengangguran	3,92	4,09	4,337
4	Pertumbuhan Ekonomi	8,58	5,89	-31,352
5	Pendapatan Per Kapita	187.000.000	182.110.000	-2,615
6	Ketimpangan Pendapatan	0,32**	0,31*	-3,125

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim Tahun 2024

\*\* Data 2022

\* Data 2023

## 2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data atau informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

### 2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar</b>					
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{15.021}{23.166} \times 100\% = 64,840\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	$\frac{67.004}{72.733} \times 100\% = 92,123\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{38.621}{37.246} \times 100\% = 103,691\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{1.467}{6.802} \times 100\% = 21,567\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

2.	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{616}{645.250} \times 100\% = 0,954\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{10.116}{10.900} \times 100\% = 92,807\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{9.495}{10.212} \times 100\% = 92,978\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{9.511}{10.211} \times 100\% = 93,144\%$	Dinas Kesehatan	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{45.636}{50.469} \times 100\% = 90,423\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{24.065}{24.490} \times 100\% = 98,264\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{393.860}{410.948} \times 100\% = 95,841\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{50.787}{52.622} \times 100\% = 96,512\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{135.566}{138.990} \times 100\% = 97,536\%$	Dinas Kesehatan	

		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{38.991}{40.048} \times 100\% = 97,360\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{1.103}{1.280} \times 100\% = 86,171\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{11.222}{11.998} \times 100\% = 93,532\%$	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{14.040}{14.184} \times 100\% = 98,984\%$	Dinas Kesehatan	
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dinas PUPR	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dinas PUPR	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{2.840,3}{15.590,05} \times 100\% = 18,218\%$	Dinas PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{101.503}{137.940} \times 100\% = 73,584\%$	Dinas PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{99.132}{111.361} \times 100\% = 89,018\%$	Dinas PUPR	
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$\frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$	Dinas PUPR	

		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$\frac{1.402,9}{1.422,64} \times 100\% = 98,612\%$	Dinas PUPR	
		Rasio tenaga operator / teknisi / analis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dinas PUPR	
		Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{543}{543} \times 100\% = 100\%$	Dinas PUPR	
<b>4.</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dinas Perkimtan	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dinas Perkimtan	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{4,519}{133,16} \times 100\% = 3,393\%$	Dinas Perkimtan	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{10.553}{154.909} \times 100\% = 6,812\%$	Dinas Perkimtan	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{1.270}{2.557} \times 100\% = 49,667\%$	Dinas Perkimtan	
<b>5.</b>	<b>Trantibumlinmas</b>	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja	

		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{350}{640.224} \times 100\% = 0,054\%$	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{350}{640.224} \times 100\% = 0,054\%$	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{863}{863} \times 100\% = 100\%$	BPBD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{58}{66} \times 100\% = 87,878\%$	DPKP	
		Waktu tanggap (responsetime) penanganan kebakaran	12,3 menit	DPKP	
<b>6.</b>	<b>Sosial</b>	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{372}{1.200} \times 100\% = 31\%$	Dinas Sosial	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{28.050}{28.050} \times 100\% = 100\%$	Dinas Sosial	
<b>Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar</b>					
<b>1.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{8}{9} \times 100\% = 88,888\%$	Disnakertrans	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{495}{50.000} \times 100\% = 0,99\%$	Disnakertrans	

		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{116,72}{50.000} \times 100\% = 0,233\%$	Disnakertrans	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{796}{876} \times 100\% = 90,867\%$	Disnakertrans	
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	$\frac{2.019}{2.175} \times 100\% = 92,827\%$	Disnakertrans	
<b>2.</b>	<b>Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{214.513.461.341}{1.914.284.058.985} \times 100\% = 11,205\%$	DPPPA	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	$\frac{58}{58} \times 100\% = 100\%$	DPPPA	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{17}{316.073} \times 100\% = 5,378\%$	DPPPA	
<b>3.</b>	<b>Pangan</b>	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{24,78}{213,695} \times 100\% = 11,595\%$	Dinas Ketahanan Pangan	
<b>4.</b>	<b>Pertanahan</b>	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{508.464,5 \text{ M}^2}{508.464,5 \text{ M}^2} = 100\%$		
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	$\frac{49.400 \text{ M}^2}{49.400 \text{ M}^2} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perkimtan	

		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	$\frac{508.464,5 \text{ M}^2}{508.464,5 \text{ M}^2} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perkimtan	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dinas Perkimtan	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{508.464,5 \text{ M}^2}{508.464,5 \text{ M}^2} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perkimtan	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{12}{14} \times 100\% = 85,714\%$	Dinas Perkimtan	
<b>5.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	64,35	Dinas Lingkungan Hidup	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	$\frac{24.578,97}{85.838,11} \times 100\% = 28,634\%$	Dinas Lingkungan Hidup	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota	$\frac{0}{27} \times 100\% = 0\%$	Dinas Lingkungan Hidup	
<b>6.</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Capil</b>	Perekaman KTP elektronik	$\frac{453.498}{458.900} \times 100\% = 98,822\%$	Dinas Capil	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{106.664}{186.345} \times 100\% = 57,240\%$	Dinas Capil	

		Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{185.703}{192.413} \times 100\% = 96,512\%$	Dinas Capil	
		Jumlah perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{9}{56} \times 100\% = 16,071\%$	Dinas Capil	
<b>7.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	Persentase pengentasan desa tertinggal	100%	DPMD	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	$\frac{39}{119} \times 100\% = 32,773\%$	DPMD	
<b>8.</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan KB</b>	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.34	DPPKB	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{85.169}{116.274} \times 100\% = 73,248\%$	DPPKB	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{8.876}{116.274} \times 100\% = 7,633\%$	DPPKB	
<b>9.</b>	<b>Perhubungan</b>	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,6092	Dishub	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,092	Dishub	
<b>10.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{58}{58} \times 100\% = 100\%$	Diskominfo	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{17}{22} \times 100\% = 77,272\%$	Diskominfo	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah	$\frac{441.328}{443.536} \times 100\% = 99,502\%$	Diskominfo	

		daerah kabupaten/kota			
<b>11.</b>	<b>Koperasi dan UKM</b>	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{87}{322} \times 100\% = 27,018\%$	Dinkop UKM	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{2.010}{16.770} \times 100\% = 11,985\%$	Dinkop UKM	
<b>12.</b>	<b>Penanaman Modal</b>	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	$\frac{883.206.731.185,2}{8.224.475.803.656,3} \times 100\% = 10,738\%$	DPMPPTSP	
<b>13.</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{60}{178.142} \times 100\% = 0,033\%$	Dispora	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{637}{178.142} \times 100\% = 0,357\%$	Dispora	
		Peningkatan prestasi olahraga	304 medali	Dispora	
<b>14.</b>	<b>Statistik</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{58}{58} \times 100\% = 100\%$	Bappeda	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah	$\frac{58}{58} \times 100\% = 100\%$	Bappeda	
<b>15.</b>	<b>Persandian</b>	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{578}{918} \times 100\% = 62,962\%$	Diskominfo	

16.	<b>Kebudayaan</b>	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{6}{21} \times 100\% = 28,571\%$	Disdikbud	
17.	<b>Perpustakaan</b>	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	61,24	Dinas Perpus & Arsip	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	69,99	Dinas Perpus & Arsip	
18.	<b>Kearsipan</b>	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$\frac{100\% + 100\% + 100\% + 4,2\%}{4} = 76,1\%$	Dinas Perpus & Arsip	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$\frac{100\% + 0\% + 0\% + 100\% + 100\% + 0\%}{6} = 50\%$	Dinas Perpus & Arsip	

<b>Urusan Pilihan</b>					
1.	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	$\frac{13.866,01}{13.411,38} \times 100\% = 103,389\%$	Dinas Perikanan	
2.	<b>Pariwisata</b>	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{4}{10} \times 100\% = 40\%$	Dinas Pariwisata	

		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{22.995}{127.160} \times 100\% = 18,083\%$	Dinas Pariwisata	
		Tingkat Hunian Akomodasi	$\frac{94.885}{146.167} \times 100\% = 64,915\%$	Dinas Pariwisata	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{460.675,2}{116.724.408,9} \times 100\% = 0,394\%$	Dinas Pariwisata	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{70.254.802.260}{337.458.182.638,31} \times 100\% = 20,818\%$	Dinas Pariwisata	
<b>3.</b>	<b>Pertanian</b>	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{228.690}{41.988} \times 100\% = 544,655\%$	DTPHP	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$	DTPHP	

4.	<b>Kehutanan</b>	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	5 Dokumen, yaitu 1. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 889/KPTS/Bapedalda/2005 2. Perda Muara Enim Nomor 4 Tahun 2004 3. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 247/KPTS/BLH/2009 4. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 465/KPTS/Bapedalda/2008 5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 941/KPTS/Bapedalda/2005	Dinas Lingkungan Hidup	
5.	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	Dinas PerindagESDM	
6.	<b>Perdagangan</b>	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{43}{43} \times 100\% = 100\%$	Dinas PerindagESDM	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{2.841,13}{5.151,09} \times 100\% = 55,155\%$	Dinas PerindagESDM	
		Persentase alat — alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{2.880}{42.850} \times 100\% = 6,721\%$	Dinas PerindagESDM	

<b>7.</b>	<b>Perindustrian</b>	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{150}{2.265} \times 100\% = 6,622\%$	Dinas PerindagESDM	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	55,76%	Dinas PerindagESDM	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dinas PerindagESDM	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dinas PerindagESDM	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dinas PerindagESDM	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	Dinas PerindagESDM	
<b>8.</b>	<b>Transmigrasi</b>	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	100% (Tidak Ada Kewenangan Kabupaten)	Disnaker	

### 2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<b>Perencanaan dan Keuangan</b>	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{840.336.792.696,03}{3.917.575.110.243} \times 100\%$ = 21,450%	BPKAD	
		Rasio PAD	$\frac{380.979.531.113,52}{3.912.789.972.473,2} \times 100\%$ = 9,736%	BPKAD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,037 (level 3)	Inspektorat	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,000 (level 3)	Inspektorat	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{2.056.787.567.504,6}{3.917.575.110.243} \times 100\%$ = 52,501%	BPKAD	
		Opini Laporan Keuangan	2015 = WTP 2016 = WTP 2017 = WTP 2018 = WTP 2019 = WTP 2020 = WTP 2021 = WTP 2022 = WTP 2023 = WTP 2024 = WTP	BPKAD	

2.	<b>Pengadaan</b>	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{0}{564} \times 100\% = 0\%$	Bag. PBJ Setda	
		Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{2.556}{2.670} \times 100\% = 95,730\%$	Bag. PBJ Setda	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{1.322.871.998.154}{3.410.155.233.193} \times 100\% = 38,792\%$	Bag. PBJ Setda	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{159.201.331.261}{1.127.339.885.576} \times 100\% = 14,121\%$	Bag. PBJ Setda	
3.	<b>Kepegawaian</b>	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{1.777}{2.232} \times 100\% = 79,614\%$	BPKSDM	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{490}{2.232} \times 100\% = 21,953\%$	BPKSDM	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{112}{602} \times 100\% = 18,604\%$	BPKSDM	
4.	<b>Manajemen Keuangan</b>	Deviasi Realisasi Belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\frac{3.917.575.110.243}{3.228.308.417.458} - 1 \times 100\% = 21,350\%$	BPKAD	

		Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{380.979.531.113,52}{301.138.065.795} - 1 \times 100\%$ $= 26,513\%$	BPKAD	
		Assets Management	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya)</li> <li>2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya)</li> <li>3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya)</li> <li>4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya)</li> </ol>	BPKAD	
<b>5.</b>	<b>Transparansi dan Partisipasi Publik</b>	Cash Management: Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{560.300.286.213,21}{560.300.286.213,21} \times 100\%$ $= 100\%$	BPKAD	
		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{2.820.847.095}{3.008.995.940} \times 100\%$ $= 93,747\%$	BPKAD	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$	BPKAD	

### 2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024. Pengukuran kinerja ini merupakan penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024. Tahapan dalam pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui proses pengumpulan data dan analisa data.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim dilakukan dengan pengumpulan data yang diperoleh dari dua sumber yaitu secara internal yang berasal dari pelaporan masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Muara Enim dan secara eksternal yang berasal dari luar instansi atau lintas sektoral yaitu dari BPS. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun penghitungan capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan digunakan skala nilai dan kriteria penilaian kinerja organisasi yaitu :

**Tabel 2.3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN KINERJA
1.	$\geq 100\%$	Sangat Baik
2.	$76\% \geq 100\%$	Baik
3.	$56\% \geq 75\%$	Cukup
4.	$\leq 55\%$	Kurang

### 2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja



**BUPATI MUARA ENIM**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD RIZALI  
Jabatan : Pj. Bupati Muara Enim

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muara Enim, 5 Februari 2024  
Pj. **BUPATI MUARA ENIM,**  


PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024			
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan jasmani dan rohani masyarakat	Penilaian Capaian Kabupaten Sehat	Padapa (71-80)
2.	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	0,6
3.	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	Indeks Kota Toleran	5,08
4.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,84
5.	Meningkatnya pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal	Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	5,54
6.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	6,60
7.	Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	0,319
8.	Meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	69,79
9.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Usia Harapan Hidup	69,63
10.	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah	12,00 7,98
11.	Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	11.450
12.	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	B
13.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B
14.	Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	3,00
15.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Predikat SAKIP	BB
16.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kualitas Pelayanan Publik	4,22
17.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	10,71
18.	Meningkatkan penanganan PPKS	Persentase penurunan penanganan PPKS	81,73
19.	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,00
20.	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	87,00
21.	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,02
22.	Meningkatkan kualitas layanan hunian masyarakat	Persentase Rumah Layak Huni	93,88
23.	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan masyarakat dalam pembangunan daerah	Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	89,76 74,52
24.	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase Peningkatan IPG	0,09
25.	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Persentase Peningkatan IDG	2,87
26.	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	Nindya
27.	Meningkatkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Persentase Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	6,10

**PROGRAM PRIORITAS DAN ANGGARAN  
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024**

No	Program	Anggaran
1	Program Pengelolaan Pendidikan	219.627.150.198
2	Program Pengembangan Kurikulum	2.910.777.675
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	20.996.759.715
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	274.406.600
5	Program Pengembangan Kebudayaan	1.269.236.800
6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	934.798.700
7	Program Pembinaan Sejarah	150.707.800
8	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	210.015.000
9	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	206.477.500.536
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	20.861.946.096
11	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	295.840.080
12	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	8.499.624.400
13	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	53.948.236.598
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.843.036.519
16	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.504.355.000
17	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.140.922.100
18	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	34.558.026.488
20	Program Penataan Bangunan Gedung	11.115.924.790
21	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	11.115.924.790
23	Program Penyelenggaraan Jalan	152.398.688.631
24	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	376.058.190
26	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.568.302.062
27	Program Pengembangan Perumahan	2.507.279.000
29	Program Kawasan Permukiman	24.612.637.800
30	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	58.542.724.880
31	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	58.542.724.880
32	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	511.086.600
33	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	13.291.953.281
34	Program Pengelolaan Tanah Kosong	307.359.100
35	Program Penataan Tanah	258.803.500
36	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.996.968.240
37	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	4.311.251.018
38	Program Penanggulangan Bencana	3.320.899.937
39	Program Pemberdayaan Sosial	12.570.636.944
42	Program Rehabilitasi Sosial	1.328.379.845
43	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	782.733.600
45	Program Penanganan Bencana	935.224.300
46	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	368.902.126
48	Program Perencanaan Tenaga Kerja	135.503.700
49	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.665.395.350

No	Program	Anggaran
50	Program Penempatan Tenaga Kerja	616.205.479
51	Program Hubungan Industrial	1.114.881.900
52	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	529.480.765
53	Program Perlindungan Perempuan	606.276.500
54	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	371.637.223
55	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	548.475.200
56	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	851.758.860
57	Program Perlindungan Khusus Anak	979.058.300
58	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1.222.096.800
59	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.598.580.600
60	Program Penanganan Kerawanan Pangan	576.209.400
61	Program Pengawasan Keamanan Pangan	429.196.200
62	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.034.925.140
63	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.771.168.600
64	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	384.145.500
65	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	197.055.780
66	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Ppilh)	188.218.700
67	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Isha Yang Terkait Dengan Ppilh	57.642.300
68	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	234.830.800
69	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	205.092.000
70	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	171.138.100
71	Program Pengelolaan Persampahan	6.076.457.100
72	Program Pendaftaran Penduduk	2.153.416.740
73	Program Pencatatan Sipil	563.683.900
74	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	286.410.300
75	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	82.336.400
76	Program Penataan Desa	15.028.944.100
77	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	228.455.600
78	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.995.762.600
79	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	4.490.790.080
80	Program Pengendalian Penduduk	711.952.640
81	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	6.983.059.440
82	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	5.963.647.459
83	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llj)	5.152.314.587
84	Program Pengelolaan Pelayaran	503.940.900
85	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	7.781.492.640
86	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	11.387.992.250
87	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	428.423.800
88	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	418.920.200
89	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	108.437.000

No	Program	Anggaran
90	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	108.437.000
91	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	95.107.000
92	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	468.845.700
93	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1.419.406.100
94	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	1.206.441.400
95	Program Pengembangan Umkm	1.535.703.300
96	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	933.332.468
97	Program Promosi Penanaman Modal	585.762.600
98	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.267.178.239
99	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	731.436.700
100	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	523.508.088
101	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	5.384.905.260
102	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	21.696.315.066
103	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	857.594.240
104	Program Pembinaan Perpustakaan	2.732.656.959
105	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	84.512.600
106	Program Pengelolaan Arsip	694.496.400
107	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	165.467.798
108	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.132.317.445
109	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.815.137.529
110	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	5.815.137.529
111	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.889.901.778
112	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.563.926.566
113	Program Pemasaran Pariwisata	1.649.998.770
114	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	494.999.500
115	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	119.999.900
116	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	12.701.222.800
117	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	16.158.063.425
118	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.471.938.500
119	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	719.982.100
120	Program Penyuluhan Pertanian	2.300.922.207
121	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.308.175.500
122	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.572.437.300
123	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	538.948.000
124	Program Perzinaan Usaha Pertanian	1.748.198.025
125	Program Penyuluhan Pertanian	645.074.400
126	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	676.255.400
127	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	10.863.748.138
128	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	858.901.300
129	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	429.925.200
130	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	98.252.700

No	Program	Anggaran
131	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.359.497.588
132	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	1.359.497.588
133	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	254.475.000
134	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	16.925.692.794
135	Program Perekonomian Dan Pembangunan	6.302.648.165
136	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	35.635.677.900
137	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.811.149.074
138	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.013.619.500
139	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	463.669.944.083
140	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.939.526.439
141	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.040.345.803
142	Program Kepegawaian Daerah	6.127.288.620
143	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.569.501.899
144	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	5.732.247.465
145	Program Penyelenggaraan Pengawasan	5.103.125.400
146	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.677.413.640
147	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	7.488.948.253
148	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	13.015.132.483
149	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Tertib Umum	2.876.746.545
150	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.345.354.400
151	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.024.681.403
152	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.413.610.687
153	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	61.997.028.647
154	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	554.251.000
155	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	772.851.200
156	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	13.503.385.000
TOTAL		1.838.861.224.214

Jumlah program sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) program dengan anggaran sebesar Rp. 1.838.861.224.214,- (satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah).



### 2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3.2

#### Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Realisasi	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kualitas Kesehatan jasmani dan rohani masyarakat	Penilaian pencapaian Kabupaten Sehat	Kategori	Padapa (71-80)	Padapa** (72)	100	Baik
2.	Meningkatnya akses dan kualitas layanan Kesehatan masyarakat	Indeks keluarga sehat	Indeks	0.6	0.59	98.33	Baik
3.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks kota toleran	Indeks	5.08	5.387	106.04	Sangat Baik
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	61.84	64,35	104.06	Sangat Baik
5.	Meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal	Indeks pertumbuhan ekonomi inklusif	Indeks	5.54	5.54*	100	Baik
6.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	%	6.60	5.89	89.24	Baik
7.	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks gini	Indeks	0.319	0,31*	100	Baik
8.	Meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69.79	73,1	104.74	Sangat Baik
9.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	69.63	74,49	106.98	Sangat Baik
10.	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.00	12.02	100.17	Sangat Baik
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	7.98	8.27	103.63	Sangat Baik
11.	Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rp. Juta	11.450	12.291	107.34	Sangat Baik
12.	Meningkatkan akuntabilitas dan tata Kelola pemerintahan	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	B	B*	100	Baik
13.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks	B	B	100	Baik
14.	Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Indeks	3.00	3.29	109.67	Sangat Baik
15.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Predikat SAKIP	Kategori	BB	BB	100	Baik
16.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai kualitas pelayanan publik	Indeks	4.22	4.56	108.06	Baik
17.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Persentase penduduk miskin	%	10.71	9.79	109.40	Sangat Baik
18.	Meningkatkan penanganan PPKS	Persentase penurunan penanganan PPKS	%	81.73	78.83	96.45	Baik

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Realisasi	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19.	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	%	4.00	4,09*	97.80	Baik
20.	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan	Skor	87.00	94.53	108.66	Sangat Baik
21.	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	1.02	1.2	85	Baik
22.	Meningkatkan kualitas layanan hunian masyarakat	Persentase rumah layak huni	%	93.88	96.44	102.73	Sangat Baik
23.	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan Masyarakat dalam Pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89.76	89.82*	100.07	Baik
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74.52	69.66*	93.48	Baik
24.	Meningkatkan peran serta Perempuan dalam pembangunan	Persentase peningkatan IPG	%	0.09	0	0***	NA
25.	Meningkatkan pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Persentase peningkatan IDG	%	2.87	0	0***	NA
26.	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	Kategori	Nindya	Nindya**	100	Baik
27.	Meningkatkan desa ramah Perempuan dan peduli anak	Persentase desa ramah perempuan dan peduli anak	%	6.10	4.07	66.72	Cukup

\*) Nilai tahun sebelumnya

\*\*) Hasil evaluasi mandiri

\*\*\*) Belum dapat dihitung

### 2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

**Tabel 2.3.2**  
**Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Akhir RPD 2024-2026	Capaian 2023	Capaian 2024	% Terhadap Target Akhir RPD 2024-2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas Kesehatan jasmani dan rohani masyarakat	Penilaian pencapaian Kabupaten Sehat	Kategori	NA	Wiwerda (81-90)	NA	Padapa* (72)	88,89
2.	Meningkatnya akses dan kualitas layanan Kesehatan masyarakat	Indeks keluarga sehat	Indeks	0,6	0,8	NA	0,59	73,75
3.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks kota toleran	Indeks	4,98	5,28	5,02	5,387	102,03
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	61,70	70	61,74	64,35	91,93
5.	Meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal	Indeks pertumbuhan ekonomi inklusif	Indeks	5,46	5,70	5,54	5,54**	97,19
6.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	%	8,39	7,44	8,58	5,89	79,17
7.	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks gini	Indeks	0,320	0,317	3,19	0,319**	99,37
8.	Meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,43	70,51	72,33	73,1	103,67
9.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,38	70,05	72,29	74,49	106,34
10.	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,99	12,02	12,01	12,02	100
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,9	9,00	8,14	8,27	91,89
11.	Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rp. Juta	11.304	11.744	11.683	12.291	105
12.	Meningkatkan akuntabilitas dan tata	Indeks reformasi	Indeks	B	B	B	B**	100

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Akhir RPD 2024-2026	Capaian 2023	Capaian 2024	% Terhadap Target Akhir RPD 2024-2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kelola pemerintahan	birokrasi						
13.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks	B	B	B	B	100
14.	Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Indeks	2,91	3,20	3,00	3,29	102,81
15.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Predikat SAKIP	Kategori	BB	BB	BB	BB	100
16.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai kualitas pelayanan publik	Indeks	3,90	4,86	4,21	4,56	93,83
17.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Persentase penduduk miskin	%	11,12	9,88	10,93	9,79	100,92
18.	Meningkatkan penanganan PPKS	Persentase penurunan penanganan PPKS	%	85,55	75,76	105,43	78,83	104,05
19.	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,12	3,76	3,92	4,09	91,93
20.	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan	Skor	85,00	92,00	91,6	94,53	102,75
21.	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,03	1,00	1,23	1,2	83,33
22.	Meningkatkan kualitas layanan hunian masyarakat	Persentase rumah layak huni	%	91,88	97,88	119,66	96,44	98,53
23.	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan Masyarakat dalam Pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,67	89,93	89,82	89,82**	99,88
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	71,65	80,25	69,66	69,66**	87,21
24.	Meningkatkan peran serta Perempuan dalam pembangunan	Persentase peningkatan IPG	%	0,09	0,09	NA	0***	NA
25.	Meningkatkan pemberdayaan Perempuan	Persentase	%	2,87	2,87	NA	0***	NA

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Akhir RPD 2024-2026	Capaian 2023	Capaian 2024	% Terhadap Target Akhir RPD 2024-2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dalam pembangunan	peningkatan IDG						
26.	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	Kategori	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya*	85
27.	Meningkatkan desa ramah Perempuan dan peduli anak	Persentase desa ramah perempuan dan peduli anak	%	3,25	12,20	NA	4,07	33,36

\*) Hasil evaluasi mandiri

\*\*) Nilai tahun sebelumnya

\*\*\*) Belum dapat diukur

### 2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026

**Tabel 2.3.3**  
**Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Akhir RPD 2024-2026	Capaian 2023	Capaian 2024	% Terhadap Target Akhir RPD 2024-2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas Kesehatan jasmani dan rohani masyarakat	Penilaian pencapaian Kabupaten Sehat	Kategori	NA	Wiwerda (81-90)	NA	Padapa* (72)	88,89
2.	Meningkatnya akses dan kualitas layanan Kesehatan masyarakat	Indeks keluarga sehat	Indeks	0,6	0,8	NA	0,59	73,75
3.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks kota toleran	Indeks	4,98	5,28	5,02	5,387	102,03
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	61,70	70	61,74	64,35	91,93
5.	Meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal	Indeks pertumbuhan ekonomi inklusif	Indeks	5,46	5,70	5,54	5,54**	97,19
6.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	%	8,39	7,44	8,58	5,89	79,17
7.	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks gini	Indeks	0,320	0,317	3,19	0,319**	99,37
8.	Meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,43	70,51	72,33	73,1	103,67
9.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,38	70,05	72,29	74,49	106,34
10.	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,99	12,02	12,01	12,02	100
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,9	9,00	8,14	8,27	91,89
11.	Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rp. Juta	11.304	11.744	11.683	12.291	105
12.	Meningkatkan akuntabilitas dan tata Kelola pemerintahan	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	B	B	B	B**	100

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Akhir RPD 2024-2026	Capaian 2023	Capaian 2024	% Terhadap Target Akhir RPD 2024-2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Indeks	B	B	B	B	100
14.	Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Indeks	2,91	3,20	3,00	3,29	102,81
15.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Predikat SAKIP	Kategori	BB	BB	BB	BB	100
16.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai kualitas pelayanan publik	Indeks	3,90	4,86	4,21	4,56	93,83
17.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Persentase penduduk miskin	%	11,12	9,88	10,93	9,79	100,92
18.	Meningkatkan penanganan PPKS	Persentase penurunan penanganan PPKS	%	85,55	75,76	105,43	78,83	104,05
19.	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,12	3,76	3,92	4,09	91,93
20.	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan	Skor	85,00	92,00	91,6	94,53	102,75
21.	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,03	1,00	1,23	1,2	83,33
22.	Meningkatkan kualitas layanan hunian masyarakat	Persentase rumah layak huni	%	91,88	97,88	119,66	96,44	98,53
23.	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan Masyarakat dalam Pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,67	89,93	89,82	89,82**	99,88
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	71,65	80,25	69,66	69,66**	87,21
24.	Meningkatkan peran serta Perempuan dalam pembangunan	Persentase peningkatan IPG	%	0,09	0,09	NA	0***	NA
25.	Meningkatkan pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Persentase peningkatan IDG	%	2,87	2,87	NA	0***	NA
26.	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Predikat Kabupaten/ Kota	Kategori	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya*	85

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Akhir RPD 2024-2026	Capaian 2023	Capaian 2024	% Terhadap Target Akhir RPD 2024-2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Layak Anak						
27.	Meningkatkan desa ramah Perempuan dan peduli anak	Persentase desa ramah perempuan dan peduli anak	%	3,25	12,20	NA	4,07	33,36

\*) Hasil evaluasi mandiri

\*\*) Nilai tahun sebelumnya

\*\*\*) Belum dapat diukur

### 2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Laporan keuangan merupakan informasi bagi Pemerintah Daerah dan pengguna lainnya untuk menilai akuntabilitas keuangan daerah dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian dari komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode tertentu. Secara ringkas Laporan Realisasi APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.4**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (Konsolidasi)**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**01 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 (UNAUDITED)**

*(dalam rupiah)*

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
2	3	4	5	6
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.697.697.501.915,00</b>	<b>3.897.487.608.862,35</b>	<b>105,40</b>	<b>3.072.123.354.077,93</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>306.635.850.767,00</b>	<b>364.150.691.980,38</b>	<b>118,76</b>	<b>354.647.927.876,93</b>
Pajak Daerah	102.118.871.536,00	126.743.710.193,00	124,11	118.951.424.120,00
Retribusi Daerah	120.847.143.074,00	100.805.908.431,31	83,42	6.561.840.213,70
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.102.654.447,00	31.147.873.242,38	100,15	54.804.783.997,15
Lain-lain PAD yang Sah	52.567.181.710,00	105.453.200.113,69	200,61	174.329.879.546,08
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>306.635.850.767,00</b>	<b>364.150.691.980,38</b>	<b>118,76</b>	<b>354.647.927.876,93</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.377.588.613.451,00</b>	<b>3.524.646.144.599,22</b>	<b>104,35</b>	<b>2.704.324.918.994,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.115.940.499.950,00	3.198.030.938.052,00	102,63	2.418.868.422.019,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	261.648.113.501,00	326.615.206.547,22	124,83	285.456.496.975,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>13.473.037.697,00</b>	<b>8.690.772.282,75</b>	<b>64,50</b>	<b>13.150.507.207,00</b>
Pendapatan Hibah	1.325.000.000,00	327.192.879,00	24,69	1.006.407.510,00

**Tabel 2.3.4**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (Konsolidasi)**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**01 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 (UNAUDITED)**

*(dalam rupiah)*

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
2	3	4	5	6
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.148.037.697,00	8.363.579.403,75	68,85	12.144.099.697,00
<b>JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>13.473.037.697,00</b>	<b>8.690.772.282,75</b>	<b>64,50</b>	<b>13.150.507.207,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.697.697.501.915,00</b>	<b>3.897.487.608.862,35</b>	<b>105,40</b>	<b>3.072.123.354.077,93</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.351.719.271.996,21</b>	<b>3.912.075.172.411,84</b>	<b>89,90</b>	<b>3.336.289.056.357,12</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.549.011.276.706,21</b>	<b>2.209.976.637.043,07</b>	<b>86,70</b>	<b>1.891.605.435.158,08</b>
Belanja Pegawai	1.201.350.938.398,66	1.051.541.961.356,88	87,53	905.300.946.233,22
Belanja Barang dan Jasa	1.143.729.958.590,55	991.788.748.918,19	86,72	854.726.663.603,86
Belanja Bunga	9.000.000.000,00	7.485.321.723,00	83,17	6.504.239.596,00
Belanja Hibah	191.550.579.717,00	159.160.605.045,00	83,09	122.738.685.725,00
Belanja Bantuan Sosial	3.379.800.000,00	0,00	0,00	2.334.900.000,00
<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>2.549.011.276.706,21</b>	<b>2.209.976.637.043,07</b>	<b>86,70</b>	<b>1.891.605.435.158,08</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.281.008.118.240,00</b>	<b>1.194.678.658.318,77</b>	<b>93,26</b>	<b>1.018.994.610.340,04</b>
Belanja Modal Tanah	12.382.090.321,00	10.194.664.000,00	82,33	2.230.870.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.456.945.366,00	154.927.745.157,00	83,54	132.018.241.673,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	218.979.431.746,00	203.337.513.498,77	92,86	183.794.697.321,66
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	850.855.615.359,00	813.015.164.553,00	95,55	690.758.490.475,38
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.792.066.558,00	11.790.362.050,00	99,99	10.192.310.870,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.541.968.890,00	1.413.209.060,00	91,65	0,00
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>1.281.008.118.240,00</b>	<b>1.194.678.658.318,77</b>	<b>93,26</b>	<b>1.018.994.610.340,04</b>
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>720.000.000,00</b>	<b>4,80</b>	<b>1.964.524.977,00</b>
Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	720.000.000,00	4,80	1.964.524.977,00

**Tabel 2.3.4**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (Konsolidasi)**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**01 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 (UNAUDITED)**

*(dalam rupiah)*

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
2	3	4	5	6
<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>720.000.000,00</b>	<b>4,80</b>	<b>1.964.524.977,00</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>506.699.877.050,00</b>	<b>506.699.877.050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>423.724.485.882,00</b>
Belanja Bagi Hasil	22.333.251.461,00	22.333.351.461,00	100,00	9.835.810.693,00
Belanja Bantuan Keuangan	484.366.525.589,00	484.366.525.589,00	100,00	413.888.675.189,00
<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>506.699.877.050,00</b>	<b>506.699.877.050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>423.724.485.882,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.351.719.271.996,21</b>	<b>3.912.075.172.411,84</b>	<b>89,90</b>	<b>3.336.289.056.357,12</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(654.021.770.081,21)</b>	<b>(14.587.563.549,49)</b>	<b>2,23</b>	<b>(264.165.702.279,19)</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>654.021.770.081,21</b>	<b>654.021.770.083,21</b>	<b>100,00</b>	<b>824.465.988.492,40</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>660.300.286.213,21</b>	<b>660.300.286.213,21</b>	<b>100,00</b>	<b>879.327.121.622,40</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	560.300.286.213,21	560.300.286.213,21	100,00	879.327.121.622,40
Pencairan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	0,00
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>660.300.286.213,21</b>	<b>660.300.286.213,21</b>	<b>100,00</b>	<b>879.327.121.622,40</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>6.278.516.132,00</b>	<b>6.278.516.130,00</b>	<b>100,00</b>	<b>54.861.133.130,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	18.582.617.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.278.516.132,00	6.278.516.130,00	100,00	6.278.516.130,00
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>6.278.516.132,00</b>	<b>6.278.516.130,00</b>	<b>100,00</b>	<b>54.861.133.130,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>654.021.770.081,21</b>	<b>654.021.770.083,21</b>	<b>100,00</b>	<b>824.465.988.492,40</b>
<b>SILPA</b>	<b>0,00</b>	<b>639.434.206.533,72</b>	<b>0,00</b>	<b>560.300.286.213,21</b>

### 2.3.5.1 Efisiensi Penggunaan Anggaran

**Tabel 2.3.5 Efisiensi Penggunaan Anggaran**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIHAPUS/ DIALIHKAN/ TIDAK EFISIEN</b>	<b>NILAI ANGGARAN (Rp)</b>
(1)	(2)	(3)
1.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	356,442,000
	1 Kunjungan Kerja dalam Daerah	218,442,000
	2 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	138,000,000
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	720,000,000
	1 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	720,000,000
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	584,436,100
	1 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	24,761,500
	2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16,040,000
	3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	29,282,400
	4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	26,580,000
	5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	143,971,200
	6 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70,837,600
	7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	33,263,400
	8 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	239,700,000

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIHAPUS/ DIALIHKAN/ TIDAK EFISIEN</b>		<b>NILAI ANGGARAN (Rp)</b>
(1)	(2)		(3)
		Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		235,096,000
	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	235,096,000
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		44,546,000
	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	44,546,000
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		371,826,319
	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	346,696,319
	2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4,640,000
	3	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20,490,000
7.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		308,237,300
	1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5,835,000
	2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	176,812,000
	3	Fasilitasi Penyusunan Program	8,400,000

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIHAPUS/ DIALIHKAN/ TIDAK EFISIEN</b>	<b>NILAI ANGGARAN (Rp)</b>
(1)	(2)	(3)
	dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
4	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	22,750,800
5	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	94,439,500
8.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	117,510,000
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	87,120,900
2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30,389,100
9.	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	1,672,927,400
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	894,888,200
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	42,532,000
3	Penataan Administrasi Pemerintahan	566,143,000
4	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	169,364,200
10.	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	458,576,200
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	458,576,200
11.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN</b>	791,125,600

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIHAPUS/ DIALIHKAN/ TIDAK EFISIEN</b>	<b>NILAI ANGGARAN (Rp)</b>
(1)	(2)	(3)
	<b>BARANG MILIK DAERAH</b>	
1	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	282,000
2	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	464,463,000
3	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	124,034,000
4	Penilaian Barang Milik Daerah	33,927,600
5	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	71,446,000
6	Penyusunan Standar Harga	96,973,000
12.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	2,112,136,040
1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	620,843,240
2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	304,315,350
3	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	223,869,900
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	148,564,000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	316,869,900
6	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	88,274,000
7	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1,920,000
8	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	108,776,500

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIHAPUS/ DIALIHKAN/ TIDAK EFISIEN</b>		<b>NILAI ANGGARAN (Rp)</b>
(1)	(2)		(3)
	9	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	263,423,150
	10	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	35,280,000
13.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		1,132,490,801
	1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1,132,490,801
14.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>		47,110,000
	1	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	21,110,000
	2	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	26,000,000
15.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>		244,877,800
	1	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	77,920,000
	2	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	166,957,800
16.	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>		54,436,400
	1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	38,752,800

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIHAPUS/ DIALIHKAN/ TIDAK EFISIEN</b>		<b>NILAI ANGGARAN (Rp)</b>
(1)	(2)		(3)
	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15,683,600
17.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		122,250,000
	1	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	122,250,000
18.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		69,249,900
	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	69,249,900
19.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		18,315,452,599
	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	140,116,300
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,351,584
	3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	555,957,300
	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	58,895,980
	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	86,093,884
	6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	42,245,800
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38,797,863
	8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	57,971,353
	9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	128,317,029
	10	Koordinasi dan Penyusunan	49,476,600

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIHAPUS/ DIALIHKAN/ TIDAK EFISIEN</b>	<b>NILAI ANGGARAN (Rp)</b>
(1)	(2)	(3)
	Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
11	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	32,459,800
12	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	16,500,000
13	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	3,200,000
14	Pemeliharaan Mebel	52,038,000
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,400,863,840
16	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	22,730,000
17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,659,118,900
18	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	171,400,000
19	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	256,375,000
20	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	878,913,000
21	Pengadaan Mebel	528,991,500
22	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	38,183,500
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	575,002,000
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	153,856,200
25	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	118,346,435
26	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	88,308,000
27	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	224,494,000
28	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	409,877,700
29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	103,043,500
30	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,282,098,556

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIHAPUS/ DIALIHKAN/ TIDAK EFISIEN</b>	<b>NILAI ANGGARAN (Rp)</b>
(1)	(2)	(3)
	31 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	156,696,800
	32 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,115,665,505
	33 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,363,562,725
	34 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	906,310,000
	35 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	459,856,071
	36 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16,840,680
	37 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	704,500
	38 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	57,498,045
	39 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	147,498,000
	40 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61,244,820
	41 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	728,575,550
	42 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,240,000
	43 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31,754,500
	44 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29,602,900
	45 Operasional Pelayanan Puskesmas	394,459,050
	46 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	183,596,429
	47 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,441,640,000
	48 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22,683,400
20.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	31,871,300
	1 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong	31,871,300

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIHAPUS/ DIALIHKAN/ TIDAK EFISIEN</b>		<b>NILAI ANGGARAN (Rp)</b>
(1)	(2)		(3)
		Hewan	
21.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		716,186,500
	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	355,000,000
	2	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	312,143,800
	3	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	49,042,700
22.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		537,040,194
	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	121,288,900
	2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	125,460,000
	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	142,429,492
	4	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	76,560,000
	5	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	71,301,802
23.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		240,202,500
	1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2,052,300
	2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	78,973,600
	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	159,176,600
24.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		115,313,700

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIHAPUS/ DIALIHKAN/ TIDAK EFISIEN</b>		<b>NILAI ANGGARAN (Rp)</b>
(1)	(2)		(3)
	1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8,925,700
	2	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	25,884,000
	3	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	80,504,000
25.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		5,760,200
	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	5,760,200
26.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		2,056,082,267
	1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	259,932,724
	2	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	31,652,000
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,110,000
	4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4,000,000
	5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5,484,500
	6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,728,825,844
	7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,901,550
	8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7,085,168

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIHAPUS/ DIALIHKAN/ TIDAK EFISIEN</b>		<b>NILAI ANGGARAN (Rp)</b>
(1)	(2)		(3)
	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,090,481
27.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		1,432,130,940
	1	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	383,900,300
	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	67,345,000
	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	971,935,260
	4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	8,950,380
28.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>		1,466,167,400
	1	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	532,803,500
	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	57,239,400
	3	Pengawasan Desa	805,113,000
	4	Reviu Laporan Keuangan	9,931,000
	5	Reviu Laporan Kinerja	61,080,500
29.	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>		8,114,210,000
	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	8,114,210,000

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIHAPUS/ DIALIHKAN/ TIDAK EFISIEN</b>	<b>NILAI ANGGARAN (Rp)</b>
(1)	(2)	(3)
30.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20,216,303,302
	1 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4,969,076,750
	2 Pengembangan Rumah Sakit	4,268,963,000
	3 Operasional Pelayanan Puskesmas	9,254,363,250
	4 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	622,336,700
	5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	593,000,000
	6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	217,515,224
	7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	186,640,574
	8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	65,803,800
	9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	11,450,000
	10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	10,354,000
	11 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	10,000,000
	12 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	6,800,000
31.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2,620,149,900
	1 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,619,569,900
	2 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	580,000
32.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,372,137,000
	1 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	2,372,137,000
33.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	362,171,200

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIHAPUS/ DIALIHKAN/ TIDAK EFISIEN</b>	<b>NILAI ANGGARAN (Rp)</b>
(1)	(2)	(3)
	<b>DESA</b>	
	1 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	344,321,200
	2 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	17,850,000
34.	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	397,280,800
	1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	78,051,700
	2 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	313,403,600
	3 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5,825,500
35.	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	1,529,606,900
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	128,784,000
	2 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	352,740,000
	3 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	59,562,600
	4 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	158,507,600
	5 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	8,462,400
	6 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	821,550,300
36.	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	2,245,000
	1 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	1,057,000
	2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1,188,000
37.	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	173,658,751

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIHAPUS/ DIALIHKAN/ TIDAK EFISIEN</b>		<b>NILAI ANGGARAN (Rp)</b>
(1)	(2)		(3)
	1	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	76,778,400
	2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	73,443,351
	3	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	23,437,000
38.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		142,400,000
	1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	142,400,000
39.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		183,613,000
	1	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	64,800,000
	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	103,573,000
	3	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	15,240,000
40.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		433,488,500
	1	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	180,823,000
	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	41,240,000
	3	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	211,425,500
41.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		476,951,310
	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	36,327,810

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIHAPUS/ DIALIHKAN/ TIDAK EFISIEN</b>		<b>NILAI ANGGARAN (Rp)</b>
(1)	(2)		(3)
		Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	329,615,000
	3	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	111,008,500
42.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		4,000,000
	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	4,000,000
43.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		353,867,800
	1	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	47,198,400
	2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	160,750,000
	3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	17,600,000
	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	94,600,000
	5	Peningkatan Kesertaan KB Pria	14,000,000
	6	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	17,219,400
	7	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2,500,000
44.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		141,507,500
	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	116,517,500
	2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	24,990,000
45.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		270,500
	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	27,500

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIHAPUS/ DIALIHKAN/ TIDAK EFISIEN</b>		<b>NILAI ANGGARAN (Rp)</b>
(1)	(2)		(3)
		Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	220,000
	3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23,000
46.	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>		
	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	58,200,000
	2	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	75,874,700
	3	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	8,912,018
	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	35,549,601
	5	Penyusunan Rencana Kontijensi	70,030,000
	6	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	86,390,700
47.	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>		39,255,400
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	39,255,400
48.	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		13,200
	1	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	
49.	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>		55,400,000
	1	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	35,000,000
	2	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20,400,000
50.	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		123,363,100

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIHAPUS/ DIALIHKAN/ TIDAK EFISIEN</b>		<b>NILAI ANGGARAN (Rp)</b>
(1)	(2)		(3)
	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	123,363,100
51.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		87,059,000
	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	87,059,000
52.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		66,676,000
	1	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	24,721,500
	2	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	26,386,000
	3	Perluasan Kesempatan Kerja	15,568,500
53.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		92,606,500
	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	22,905,000
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	18,588,000
	3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	31,114,500
	4	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	19,999,000
54.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		200
	1	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	200
55.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		431,500,000
	1	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	36,000,000
	2	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	395,500,000
56.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN		19,266,000

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIHAPUS/ DIALIHKAN/ TIDAK EFISIEN</b>	<b>NILAI ANGGARAN (Rp)</b>
(1)	(2)	(3)
	PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	19,266,000
57.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	270,160,440
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	46,511,000
2	Pelayanan Informasi Publik	61,985,200
3	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	161,664,240
58.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	7,713,823,601
1	Pembangunan Laboratorium	1,289,385,400
2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1,248,673,120
3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	566,142,800
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2,016,519,212
5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,116,118,700
6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	212,971,719
7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	312,000,000
8	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	470,119,500
9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	115,505,600
10	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	176,698,000
11	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	300
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	135,875,000
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	53,814,250
59.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4,500
1	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	4,500

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIHAPUS/ DIALIHKAN/ TIDAK EFISIEN</b>	<b>NILAI ANGGARAN (Rp)</b>
(1)	(2)	(3)
60.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	3,951,800
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	3,951,800
61.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	502,027,341
1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	437,027,341
2	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	65,000,000
62.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	643,200,000
1	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	643,200,000
63.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	225,585,100
1	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	17,200,000
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	208,385,100
64.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	275,000
1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	275,000
65.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1,414,428,500
1	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	121,004,400
2	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	448,513,200
3	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	844,910,900
66.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	61,404,300

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIHAPUS/ DIALIHKAN/ TIDAK EFISIEN</b>		<b>NILAI ANGGARAN (Rp)</b>
(1)	(2)		(3)
	1	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	61,404,300
67.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		46,670,420
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	24,020,420
	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	22,650,000
68.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		140,254,200
	1	Pengawasan Penanaman Modal	95,848,000
	2	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	44,406,200
69.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		4,600
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	900
	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3,700
70	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		116,273,457
	1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64,200,000
	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	52,073,457
71.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		230,141,600
	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan	230,141,600

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIHAPUS/ DIALIHKAN/ TIDAK EFISIEN</b>		<b>NILAI ANGGARAN (Rp)</b>
(1)	(2)		(3)
		oleh Masyarakat	
72.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		450,800
	1	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	450,800
73.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		2,207,220,000
	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	40,920,000
	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2,166,300,000
74.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		31,464,400
	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	31,464,400
75.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		100,298,010
	1	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18,728,000
	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81,570,010
76.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		42,137,000
	1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	42,137,000
77.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		71,689,176
	1	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	71,689,176
78.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		121,300,600
	1	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3,434,000
	2	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9,696,000
	3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	5,174,000

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN YANG DIHAPUS/ DIALIHKAN/ TIDAK EFISIEN</b>	<b>NILAI ANGGARAN (Rp)</b>
(1)	(2)	(3)
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	102,550,000
5	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	446,600
79.	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	28,257,100
1	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	28,257,100
80.	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	259,840,650
1	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	259,840,650
81.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	27,174
1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	27,174
82.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	406,002,700
1	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	406,002,700
83.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	4,000
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4,000
84.	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	193,024,945
1	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	20,788,100
2	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	47,699,945
3	Pemberian Layanan Kedaruratan	51,297,100
4	Penyediaan Alat Bantu	7,200,000
5	Penyediaan Sandang	66,039,800
	<b>TOTAL</b>	<b>87,963,360,756</b>

Sumber : Data diolah dari APBD-P Kabupaten Muara Enim Tahun 2024

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Muara Enim berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp87.963.360.756 terdiri dari 84 program dan 273 kegiatan. Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 7 tujuan 20 sasaran yang mencakup 29 indikator sasaran, diketahui bahwa 11 indikator sasaran Sangat Baik, 15 indikator sasaran Baik, 1 indikator sasaran cukup, 2 indikator sasaran belum dapat diukur. Rata – rata realisasi capaian kinerja mencapai 95.92 Persen atau bermakna **Baik**, sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 berada dalam kategori **Baik**.

### 2.3.6 Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

#### 1. Analisis Capaian Tujuan 1 Meningkatnya kualitas Kesehatan jasmani dan Rohani masyarakat

**Tabel 2.3.6**  
**Analisis Pencapaian Tujuan 1**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Penilaian capaian Kabupaten sehat	Padapa (71-80)	Padapa* (72)	100	Wiwerda (81-90)	Padapa (72)	88.89
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			100			88.89

\*Hasil penilaian mandiri

Kabupaten/Kota sehat memiliki 3 kriteria penghargaan yang antara lain Swasti Saba Padapa, Swasti Saba Wiwerda Dan Swasti Saba Wistara, dengan mewujudkan 9 tatanan yang dipersyaratkan, yaitu kehidupan masyarakat yang sehat mandiri, kawasan hutan sehat, pemukiman saranan dan prasarana sehat, kawasan pariwisata sehat, kehidupan sosial yang sehat, ketahanan pangan dan gizi, pertambangan sehat, kawasan sarana lalulintas dan pelayanan transportasi, industri dan perkantoran sehat. Target penilaian capaian Kabupaten sehat Tahun 2024 Padapa (71-80) berdasarkan penilaian mandiri terealisasi Padapa (72) sehingga capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 persen. Tahun 2023 capaian penilaian mandiri Kabupaten Sehat adalah 67,7 belum mencapai kategori Padapa (71-80). Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 maka telah tercapai sebesar 88.89 persen.

Kabupaten/Kota Sehat (KKS) adalah program strategis nasional yang bertujuan untuk mewujudkan daerah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni. KKS dicapai melalui penerapan tatanan dan kegiatan yang terintegrasi, yang disepakati oleh masyarakat dan pemerintah daerah. 9 indikator tatanan pada KKS yaitu :

1. Tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri
2. Tatanan permukiman dan rumah ibadah
3. Tatanan pasar rakyat
4. Tatanan satuan pendidikan
5. Tatanan pariwisata
6. Tatanan transportasi dan tertib lalu lintas jalan
7. Tatanan perkantoran dan perindustrian
8. Tatanan perlindungan sosial
9. Tatanan pencegahan dan penanganan bencana

Penilaian KKS yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan hanya dilakukan dua tahun sekali, yakni pada tahun ganjil, sehingga pada tahun 2024 tidak dilakukan penilaian, Untuk mengetahui kesiapan penilaian di tahun 2024 telah dilakukan penilaian mandiri berdasarkan indikator 9 tatanan yang ditetapkan. Persyaratan yang ditetapkan untuk mendapatkan Swasti Saba Padapa adalah 71-80% indikator tercapai, dan Kabupaten Muara Enim telah mencapai nilai indikator 72%. Adapun capaian penilaian mandiri KKS sebagai berikut :

**Tabel 2.3.7 Capaian penilaian KKS Tahun 2024 Kabupaten Muara Enim**

Indikator Penilaian KKS		Target (%)	Capaian (%)
Persentase nilai capaian per tatanan (Indikator pokok dan indikator pendukung)	T1 Sehat Mandiri	71	79
	T2 Perkim	71	64
	T3 Pendidikan	71	100
	T4 Pasar	71	31
	T5 Pariwisata	71	65
	T6 Transportasi	71	81
	T7 Perindustrian	71	48
	T8 Sosial	71	100
	T9 Bencana	71	77
Rata-rata		71	72

Kabupaten Muara Enim dalam upaya dilakukan penilaian kabupaten/kota sehat telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan mengaktifkan forum kabupaten sehat, forum kecamatan dan pokja Desa. Forum kabupaten sehat dan Dinas Kesehatan telah melaksanakan sosialisasi KKS ke 8 (delapan) kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim, dan telah melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan seperti rapat koordinasi Tim Pembina dan Forum KKS, kaji banding Forum KKS ke Kabupaten Subang, Pertemuan Kaji Banding Forum KKS ke Kabupaten Subang dan Rehab Gedung Sekretaris Forum KKS.

Beberapa program/kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya :

1. Pembuatan jamban di desa/kelurahan yang belum semua warganya memiliki jamban
2. Rapat koordinasi tim pembina dan forum KKS
3. Kaji banding forum KKS ke Kabupaten Subang
4. Inisiasi Gerakan IVA test dan SADARI serentak dalam rangka menyabut Hari Ibu
5. Pembuatan jalur sepeda
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Senam Bersama dan Skreening PTM)
7. Pemenuhan Tempat Wisata Sehat Plumeria Ecopark
8. Pengawasan keamanan pangan di pasar
9. Tersedianya sarana Menyusui dan penyimpanan ASI di Lokasi Pasar

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator antara lain :

1. Melakukan advokasi kepada pembina Kabupaten Sehat.
2. Melakukan *self assesment* capaian indikator tatanan.
3. Melakukan monitoring/ evaluasi rutin terhadap capaian indikator per tatanan sesuai dengan Perangkat Daerah penanggungjawab.
4. Bersinergi dengan forum Kabupaten Sehat untuk penguatan kelembagaan di tingkat Kecamatan dan Desa serta membantu mendorong terlaksananya program dan lokasi unggulan per tatanan.

Selain itu upaya yang akan dilakukan melalui Perangkat Daerah yang nilainya masih dibawah target minimal yaitu :

1. Tatanan transportasi dan tertib lalu lintas
  - a. Mempersiapkan kawasan *car free day*
2. Tatanan pasar
  - a. Penataan tempat penjualan sesuai dengan jenis dagangan
  - b. Pembuatan petunjuk jenis dagangan
3. Tatanan pariwisata
  - a. Pembuatan regulasi tentang pariwisata sehat
  - b. Mempersiapkan sarana dan prasarana disabilitas di lokasi wisata
4. Tatanan perkantoran dan perindustrian
  - a. Mempersiapkan ruang laktasi di setiap perkantoran dan perindustrian
  - b. Memfasilitasi sarana dan prasarana disabilitas serta kaum rentan di perkantoran dan perindustrian
  - c. Meningkatkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Pencapaian indikator tujuan meningkatnya kualitas kesehatan jasmani dan rohani masyarakat di dukung program dari tiga sasaran strategis yaitu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

### 1.1 Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan akses dan kualitas layanan Kesehatan masyarakat

**Tabel 2.3.8**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Indeks Keluarga Sehat	0.6	0.59	98.33	0.8	0.59	73.75
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			98.33			73.75

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat yang mencakup aspek Kesehatan fisik, mental, sosial dan lingkungan, yang dinilai dari 12 indikator. Dari target IKS tahun 2024 sebesar 0.6 tercapai sebesar 0.59 sehingga capaian kinerja tahun 2024

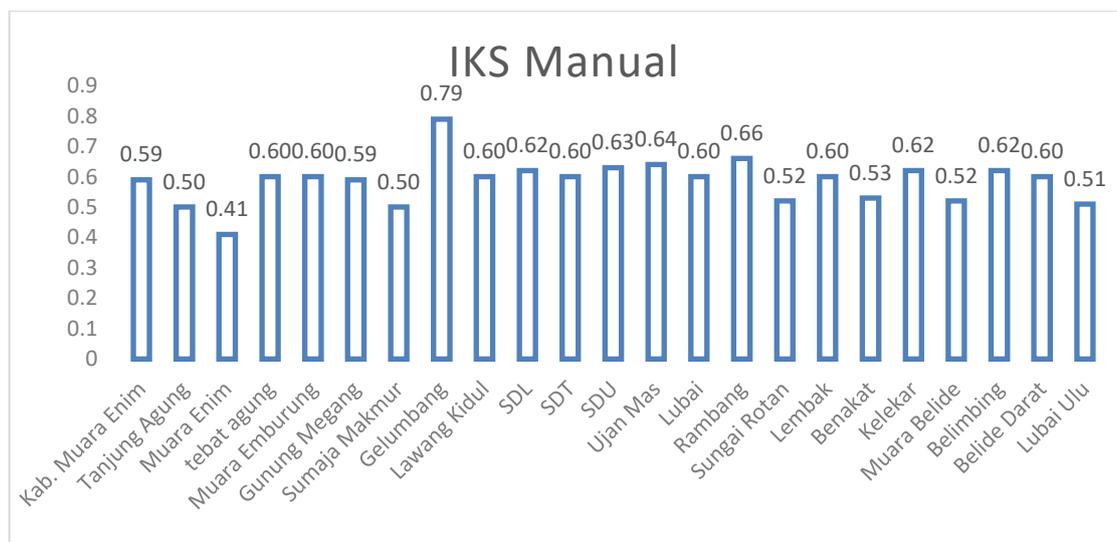
sebesar 98.33 persen berada pada kategori baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 maka realisasi tahun 2024 telah tercapai sebesar 73.75 persen.

Untuk Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :



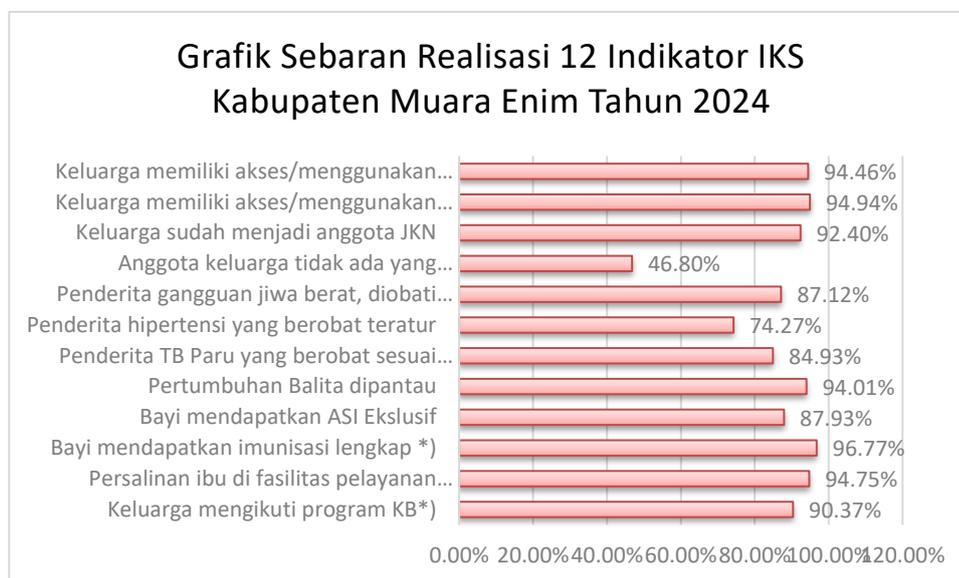
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim

Grafik capaian indikator IKS tahun 2024 Kabupaten Muara Enim



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim

Pada grafik dapat dilihat capaian tertinggi Indeks Keluarga Sehat ada di Puskesmas Gelumbang dengan angka capaian 0.79 dan terendah ada di Puskesmas Muara Enim dengan angka capaian 0.41. Adapun sebaran realisasi 12 indikator IKS dapat dilihat pada grafik berikut :



Upaya telah dilakukan oleh puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan cakupan IKS antara lain :

1. Pelatihan bagi pengelola program puskesmas
2. Monitoring dan evaluasi dari tim kabupaten
3. Mengoptimalkan anggaran BOK untuk melakukan intervensi
4. Melakukan kunjungan rumah dan intervensi terhadap keluarga yang belum sehat

Upaya yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan capaian indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) yaitu :

1. Dinas kesehatan akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap proses penginputan data.
2. Melakukan pelatihan pengelola untuk peningkatan pengetahuan terkait intervensi data guna menunjang angka IKS.
3. Memberikan prioritas intervensi kepada keluarga dengan kategori tidak sehat.
4. Bekerja sama dengan lintas program untuk sinkronisasi data capaian indikator PISPK.

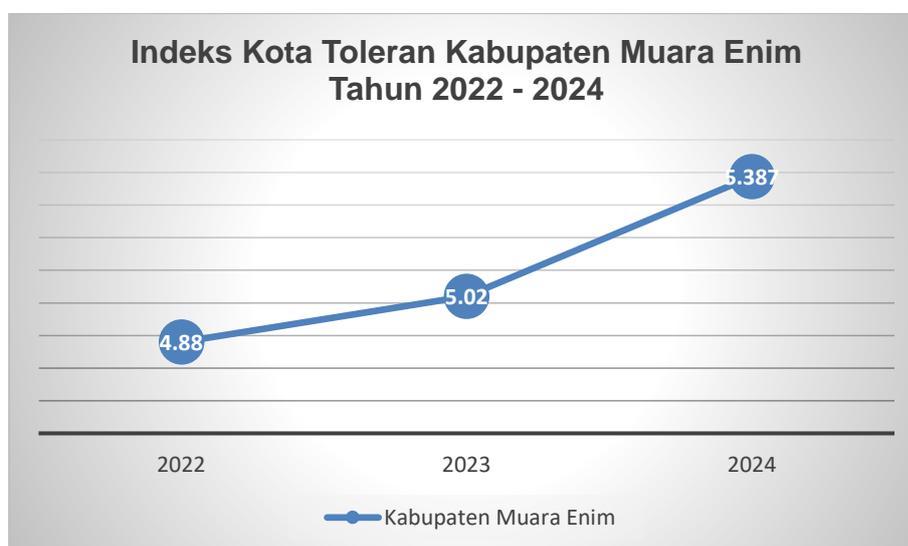
Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.

## 1.2 Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan kerukunan antar umat beragama

**Tabel 2.3.9**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Indeks Kota Toleran	5.08	5.387	106.04	5.28	5.387	102.03
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			106.04			102.03

Indeks Kota Toleran merupakan pengukuran kinerja kota meliputi pemerintah kota dan elemen Masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi, dan inklusi sosial. Target Indeks Kota Toleran Kabupaten Muara Enim tahun 2024 sebesar 5.08 terealisasi sebesar 5.387 sehingga capaian kinerjanya sebesar 106.04 berada pada kategori sangat baik. Dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 maka capaian di tahun 2024 telah melampaui target dengan capaian kinerja 102.03 persen.



Sumber : Bappeda Kabupaten Muara Enim

Indeks Kota Toleran Kabupaten Muara Enim merupakan penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim bekerjasama dengan SETARA Institute Jakarta. Indeks Kota Toleran Kabupaten Muara Enim semakin meningkat dari 4.88 di tahun 2022 menjadi 5.02 di tahun 2023 dan di tahun 2024 sebesar 5.387. Hal ini menunjukkan tren positif dalam implementasi komitmen pemajuan toleransi dan inklusi sosial di Kabupaten Muara Enim terutama dalam konteks peran pemerintah daerah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendorong pencapaian target kinerja antara lain :

1. Sosialisasi kerukunan umat beragama yang dilaksanakan di Kecamatan Rambang Niru.
2. Pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah melalui Forum Kerukunan Umat Beragama.
3. Dialog lintas agama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama
4. Pembentukan desa sadar kerukunan di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang.
5. Penyelesaian pendirian rumah ibadah di Kecamatan Lubai Ulu.
6. Fasilitasi perayaan hari raya semua agama.
7. Pembinaan kerukunan umat beragama bersama Forum Kerukunan Umat Beragama.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Meningkatkan dukungan anggaran kepada FKUB untuk menjalankan fungsi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan elemen Masyarakat sipil dalam pemajuan toleransi melalui kegiatan-kegiatan rutin yang melibatkan berbagai elemen Masyarakat dari kelompok minoritas untuk menjangkau aspirasi dan memfasilitasi setiap agenda kelompok keagamaan di Kabupaten Muara Enim.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program pengembangan kapasitas kepramukaan, program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

### 1.3 Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

**Tabel 2.3.10**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Indeks Lingkungan Hidup	61.80	64.35	104.06	70.00	64.35	91.93
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			104.06			91.93

Target Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 sebesar 61,80 dengan realisasi sebesar 64,35 sehingga capaian kinerja tahun 2024 sebesar 104.06 persen. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2026 maka capaian kinerjanya sebesar 91,93 persen. Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 masih berada dibawah Indeks Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan sebesar 72,67 dan Indeks Lingkungan Hidup Nasional sebesar 73,57.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim

Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan Indeks Lingkungan Hidup tahun 2023 sebesar 61,74. Faktor yang mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Muara Enim antara lain :

1. Komitmen para pihak dalam melakukan pemulihan kerusakan lingkungan melalui kegiatan penanaman pohon d lahan kritis dan bantaran sungai.
2. Upaya pencegahan kerusakan lingkungan.
3. Terbentuknya tim penggiat cinta lingkungan Sungai Enim.

Upaya yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim yaitu :

1. Melakukan kegiatan rehabilitasi lahan Bersama para pihak.
2. Melakukan kegiatan pemantauan Lokasi yang berpotensi mengalami kerusakan lahan.
3. Meningkatkan identifikasi jenis tutupan lahan untuk data perhitungan indeks kualitas lahan.
4. Melakukan kegiatan pemantauan rutin kualitas air dan udara di titik pantau yang telah ditetapkan.
5. Melakukan aksi bersih sampah di bantaran sungai bersama masyarakat dan organisasi pencinta lingkungan.
6. Menyediakan sarana dan prasarana pemantauan air berupa online monitoring (onlimo) : Onlimo KLHK – 108, Onlimo KLHK – 204 dan Onlimo KLHK – 234.

7. Menyediakan sarana dan prasarana pemantauan udara berupa stasiun pemantau kualitas udara ambien – Air Quality Monitoring System (SPKUA – AQMS) – DLH Muara Enim.
8. Melakukan kegiatan uji emisi gas buang kendaraan berbahan bakar diesel dan non diesel.
9. Melakukan pengawasan rutin terhadap pelaku usaha yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim.

Program yang mendukung ketercapaian kinerja yaitu program pengembangan sistem dan pengelolaan sampah regional, program pemulihan pencemaran/ kerusakan lahan dan program pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, program penyelenggaraan penataan ruang, program perencanaan lingkungan hidup, program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati), program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), program pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, program penanganan pengaduan lingkungan hidup, program pengelolaan persampahan.

## 2. Analisis Capaian Tujuan 2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

**Tabel 2.3.11**  
**Analisis Pencapaian Tujuan 2**  
**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Indeks pembangunan ekonomi inklusif	5.54	5.54*	100	5.70	5.54*	97.19
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			100			97.19

\*) Nilai tahun 2023

Pertumbuhan yang inklusif diartikan dengan pertumbuhan yang bisa menjamin pada meratanya akses pertumbuhan, tidak diskriminatif, serta mampu untuk meminimalkan kesenjangan antar kelompok. Konsep menurut World Bank, pertumbuhan ekonomi inklusif yaitu dengan memperluas akses aset perekonomian, memperluas pasar dan skala ekonomi dan mampu menciptakan pemerataan peluang untuk generasi yang akan datang. Konsep lain mengenai pertumbuhan inklusif

dinyatakan oleh Bappenas yang menjelaskan bahwa pertumbuhan inklusif merupakan pembangunan perekonomian agar tercapai kesempatan dan akses yang luas untuk seluruh masyarakat secara adil, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan kelompok serta meningkatkan kesejahteraan.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memantau dan mengukur tingkat inklusivitas pembangunan di level Kabupaten/ Kota, provinsi dan nasional. IPEI terbentuk melalui 3 pilar, 8 sub pilar, 21 indikator. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif tahun 2024 belum dirilis oleh Bappenas sehingga menggunakan capaian tahun 2023 sebesar 5.54 dengan capaian kinerja 100 persen berada dalam kategori baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 capaian kinerjanya sebesar 97.19 persen. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Muara Enim cenderung meningkat setiap tahun.



Sumber : Bappeda Kabupaten Muara Enim

Pertumbuhan ekonomi inklusif dapat tercapai dengan adanya peran pemerintah. Peran pemerintah tersebut dikaitkan dengan kebijakan fiskal yaitu dengan mengalokasikan anggaran secara efektif. Secara umum anggaran yang dikeluarkan pemerintah di setiap fungsi berfluktuasi setiap tahun sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Belanja pemerintah tersebut yaitu belanja pemerintah yang pro rakyat diantaranya belanja fungsi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah memiliki korelasi jika dikaitkan dengan teori teori “Keynes” dimana pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah memiliki hubungan positif. Dalam *The General Theory Keynes* menjelaskan bahwa

belanja pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi. Keynes menerangkan jika belanja pemerintah meningkat dapat mendorong meningkatnya permintaan agregat yang diikuti oleh meningkatnya produksi dari barang dan jasa sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan.

Upaya yang telah dilakukan agar belanja pemerintah daerah sesuai dengan target antara lain :

1. Percepatan belanja melalui e-katalog, e-katalog lokal, toko daring dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Melakukan pengadaan dini dimulai setelah nota kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
3. Pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai dengan kemajuan kegiatan.
4. Pembentukan tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melakukan rapat secara periodik.
5. Melakukan rekonsiliasi realisasi kegiatan fisik dan non fisik APBD Bersama Perangkat Daerah.

Upaya yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja selanjutnya antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan belanja daerah melalui e-katalog
2. Menyusun Surat Edaran Bupati Muara Enim terkait dengan percepatan pelaksanaan kegiatan APBD.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan APBD.
4. Melaksanakan proses pembayaran sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam anggaran kas dan kontrak.
5. Percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
6. Melakukan penyederhanaan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan.
7. Mendorong peran APIP dalam melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan dan keuangan.
8. Meminta pendampingan dan asistensi APH dan Korsupgah KPK RI.

Pencapaian indikator tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di dukung oleh program dari dua sasaran strategis yaitu meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.

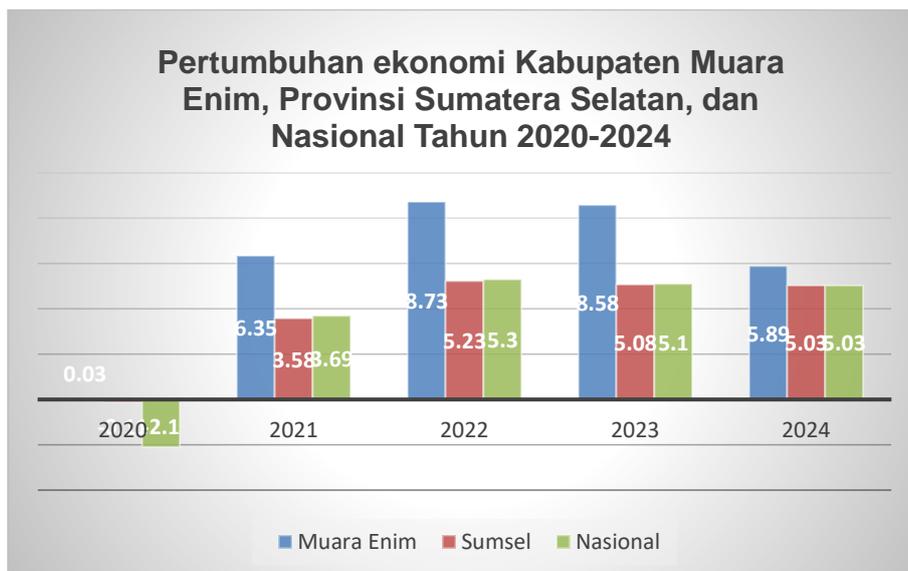
## 2.1 Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal

**Tabel 2.3.12**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal**

Indikator Sasaran	Satuan	Baseline Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
			Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Pertumbuhan ekonomi	persen	8.58	6.60	5.89	89.24	7.44	5.89	79.17
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>					89.24			79.17

Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim tahun 2024 sebesar 5.89 persen dengan capaian kinerja 89.24 persen. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 maka capaian kinerjanya sebesar 79.17 persen.

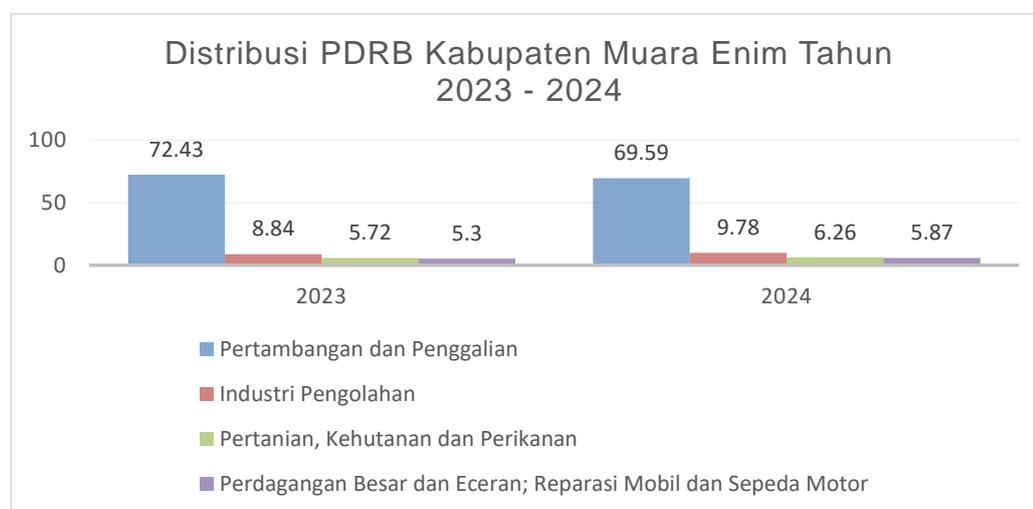
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim tahun 2024 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 8.58 persen, namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5.03 dan Nasional sebesar 5.03.



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi. PDRB Kabupaten Muara Enim atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, nilai tambah yang terbentuk sebesar Rp 118,52 triliun, dan pada tahun 2024 menurun menjadi Rp 116,72 triliun. Sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 mengalami peningkatan dari Rp 52,23 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp 55,30 triliun di tahun 2024.

Struktur ekonomi Kabupaten Muara Enim tahun 2024 atas dasar harga berlaku masih didominasi oleh sektor primer yaitu 75,85 persen dari total PDRB. Kontribusi sektor primer berasal dari kategori pertambangan dan penggalian sebesar 69,59 persen dan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 6,26 persen. Berdasarkan harga berlaku terdapat empat sektor yang dominan memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB yaitu :



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Batubara menjadi komoditas dominan di Kabupaten Muara Enim, bahkan di Sumatera Selatan. Hal ini dibuktikan dengan besarnya peranan kategori pertambangan dalam perekonomian Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2024, kategori pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 69.59 persen terhadap perekonomian Kabupaten Muara Enim.

Selain itu pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis bagi perekonomian Kabupaten Muara Enim baik sebagai penyedia pangan maupun sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi penduduk Muara Enim. Kategori ini memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Muara Enim sebesar 6.26 persen pada tahun 2024 naik dari 5.72 persen di tahun 2023. Kontribusi ini merupakan kontribusi terbesar ketiga setelah kategori pertambangan dan penggalian serta kategori industri pengolahan.

Luas panen padi tahun 2023 sebesar 38.930 Ha, dengan produksi padi sebesar 200.022,34 ton. Untuk tanaman palawija, jagung memiliki luas panen dan hasil produksi lebih besar dari tanaman palawija lainnya yaitu dengan luas panen sebesar 530,5 Ha dengan produksi sebesar 3.553,29 ton. Komoditas perkebunan yang menjadi andalan di Kabupaten Muara Enim adalah komoditas karet, kelapa sawit dan kopi. Luas tanaman karet pada tahun 2023 di Kabupaten Muara Enim sebesar 147.611 Ha dan menghasilkan getah karet seberat 177.487,00 ton. Dari seluruh tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Muara Enim, tanaman karet memang menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian di daerah ini, diikuti kemudian oleh komoditi kelapa sawit dan kopi.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim antara lain :

1. Melakukan pengembangan varietas kopi liberika, selain jenis arabika dan robusta yang telah dikembangkan saat ini. Pemerintah Kabupaten Muara Enim memberikan sarana dan prasarana serta pendampingan kepada petani yang meliputi kegiatan optimasi kopi, pengendalian OPT tanaman kopi dan bantuan alat pasca panen kopi, peningkatan sumber daya manusia pekebun kopi melalui kegiatan magang petani dan bimbingan teknis dan kegiatan inovasi sekolah petani kopi.
2. Pemberian bantuan barang untuk peningkatan mutu bokar (karet) untuk kelompok tani pekebun karet.
3. Pemberian bantuan barang untuk peningkatan mutu tanaman kopi bagi kelompok tani pekebun kopi.
4. Pemberian bantuan barang untuk peningkatan produksi kopi dan karet bagi kelompok tani pekebun kopi dan karet.
5. Pemberian bantuan berupa pembukaan jalan produksi untuk peningkatan akses angkutan produksi tanaman perkebunan.

6. Pemberian bantuan untuk peremajaan kebun karet.
7. Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan.
8. Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian.
9. Pengawasan mutu benih/ bibit ternak, bahan pakan/ pakan/ tanaman skala kecil.
10. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani.
11. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani.
12. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa.

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim antara lain :

1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
2. Peningkatan iklim usaha mikro kecil.
3. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan.
4. Peningkatan produktivitas sektor pertanian sebagai salah satu sektor unggulan.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program peningkatan daya tarik pariwisata, program pemasaran pariwisata, program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif, program pelayanan izin usaha simpan pinjam, program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, program penilaian kesehatan KSP/ USP koperasi, program pendidikan dan latihan perkoperasian, program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), program pengembangan UMKM, program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal, program pelayanan penanaman modal, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, program perencanaan dan pembangunan industri, program pengendalian izin usaha industri, program pengelolaan sistem informasi industri nasional, program pengembangan ekspor, program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

## 2.2 Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat

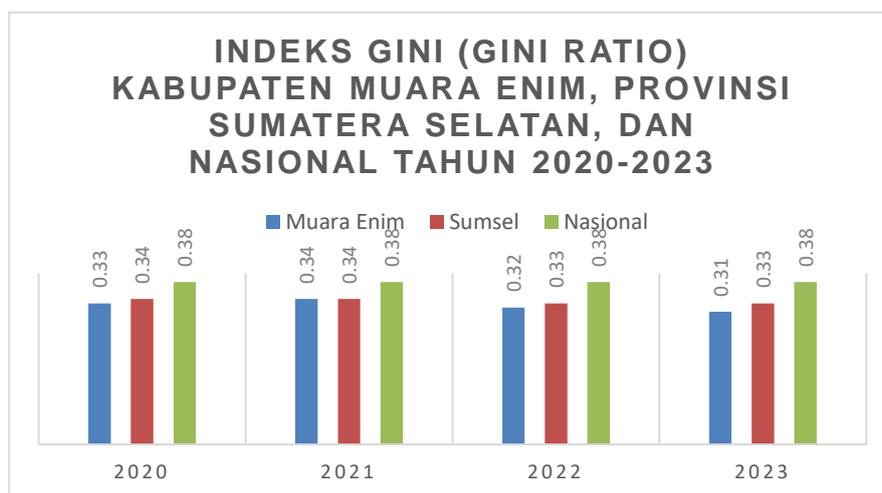
**Tabel 2.3.13**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Indeks gini	0.319	0.319*	100	0.317	0.319	99.37
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			100			99.37

\*) Nilai tahun 2023

Indeks gini Kabupaten Muara Enim tahun 2024 belum dirilis oleh BPS sehingga masih menggunakan nilai terakhir yaitu di tahun 2023 sebesar 0.319 dengan capaian kinerja 100 persen berada pada kategori baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 capaian kinerjanya sebesar 99.37 persen.

Indeks gini digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai Indeks Gini mendekati 1, maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, jika nilainya mendekati 0, maka distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna.



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap indeks gini ratio sesuai dengan yaitu jumlah penduduk, PDRB dan investasi. Selain itu, berdasarkan hasil

penelitian lainnya dipaparkan sesungguhnya faktor pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, IPM maupun tenaga kerja juga berpengaruh terhadap indeks gini.

Dilihat dari nilai realisasi investasi ke Kabupaten Muara Enim berfluktuatif setiap tahunnya. Untuk data realisasi investasi tahun 2024 baru dirilis sampai dengan triwulan ke 3.



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Muara Enim

Terkait dengan peningkatan investasi, beberapa hal yang telah dilakukan antara lain :

1. Mengoptimalkan pelayanan perizinan di Mall Pelayanan Publik melalui rapat koordinasi dengan OPD internal pengelola tenant dan instansi vertikal.
2. Mengoptimalkan proses penerbitan perizinan secara online dengan menggunakan aplikasi SiCantik, OSS dan SIMBG agar mempermudah penerbitan perizinan yang bertujuan untuk memangkas birokrasi.
3. Melakukan pengawasan penanaman modal bersama DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan.
4. Sosialisasi tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SiCantik *Cloud* ke Kecamatan.
5. Melaksanakan kegiatan jemput bola pembuatan NIB di Kecamatan secara gratis.
6. Monitoring ke Perusahaan terkait pemenuhan komitmen perizinan yang ada di OSS.

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Muara Enim antara lain :

1. Mengoptimalkan proses penerbitan perizinan secara online dengan menggunakan aplikasi SiCantik Cloud, OSS RBA dan SIM BG.
2. Mensosialisasikan secara masif keberadaan MPP kepada masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap seluruh tenant yang ada di MPP setiap bulan.
3. Melanjutkan kegiatan jemput bola fasilitasi pembuatan NIB bagi pelaku usaha di Kecamatan secara gratis.
4. Melanjutkan pelaksanaan pengawasan penanaman modal dan perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi ke pelaku usaha bersama OPD terkait.
5. Pelatihan pengelolaan aplikasi SiCantik Cloud.
6. Pemberian penghargaan kepatuhan LKPM kepada pelaku usaha.
7. Bimbingan teknis/ sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online dan Online Single Submission (OSS).
8. Sosialisasi pemberdayaan usaha dan fasilitasi kemitraan usaha dalam masalah dengan peserta sosialisasi merupakan pelaku usaha dan asosiasi dagang.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, program penyuluhan pertanian, program perizinan usaha pertanian, program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, program pengelolaan sumber daya air (SDA), program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program pengembangan permukiman, program penataan bangunan gedung, program penataan bangunan dan lingkungannya, program penyelenggaraan jalan, program pengembangan jasa konstruksi, program peningkatan kerjasama desa.

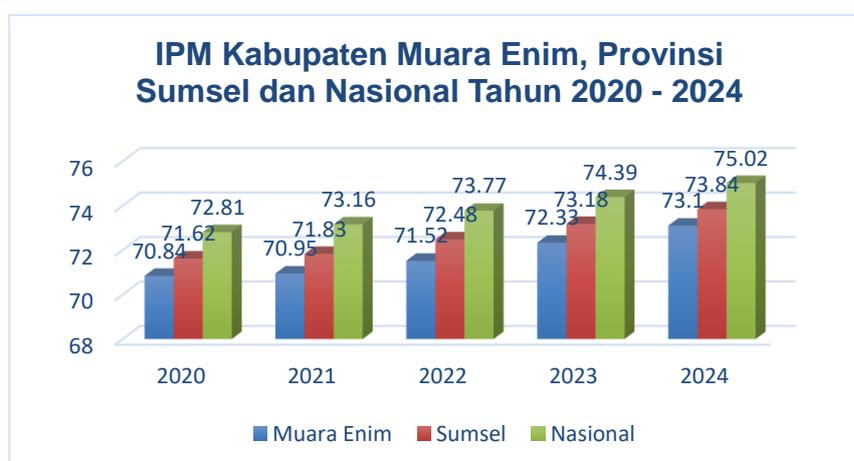
**3. Analisis Capaian Tujuan 3  
Meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia**

**Tabel 2.3.14  
Analisis Pencapaian Tujuan 3  
Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69.79	73.1	104.74	70.51	73.1	103.67
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			104.74			103.67

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muara Enim cenderung meningkat setiap tahunnya. Di Tahun 2024 dari target IPM sebesar 69.79 terealisasi sebesar 73,1 dengan capaian kinerja sebesar 104.74 persen berada dalam kategori sangat baik. Dibandingkan dengan target akhir RPD 2026 capaian kinerjanya sebesar 103.67 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu umur panjang dan sehat yang tercermin dari angka harapan hidup, pengetahuan yang tercermin dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan standar hidup layak yang dicerminkan oleh pengeluaran per kapita riil. IPM Kabupaten Muara Enim tahun 2024 masih berada di bawah IPM Provinsi Sumatera Selatan sebesar 73.84 dan IPM Nasional sebesar 75.02.



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Pencapaian indikator tujuan meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia di dukung oleh program dari dua sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat, meningkatnya kualitas hidup masyarakat, dan meningkatnya daya beli masyarakat.

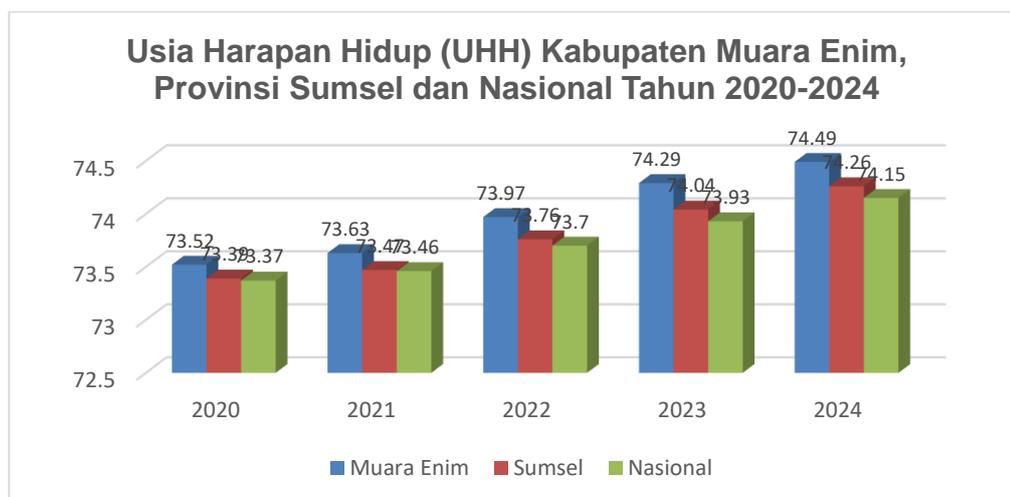
### 3.1 Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

**Tabel 2.3.15**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Usia Harapan Hidup (UHH)	69.63	74.49	106.98	70.05	74.49	106.34
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			106.98			106.34

Salah satu indikator yang menunjukkan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia adalah meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH). Target UHH Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 sebesar 69.63 dan terealisasi sebesar 74.49 sehingga capaian kinerja tahun 2024 sebesar 106.98 persen. Capaian tahun 2024 telah melampaui target pada akhir RPD 2024-2026 dengan capaian kinerja 106.34 persen.

UHH Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan UHH Provinsi Sumatera Selatan sebesar 74.26 dan UHH Nasional sebesar 74.15.



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Menurut BPS, angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain angka kematian bayi, persentase bayi berusia 0-11 bulan yang diberi ASI selama 4-6 bulan, dan persentase Balita berusia 1-4 tahun yang mendapatkan imunisasi lengkap.

Untuk memberikan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menyediakan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit tipe B, C dan D, Puskesmas dan Puskesmas pembantu.

**Tabel 2.3.16**  
**Jumlah Layanan Rumah Sakit Umum Daerah**  
**Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No	Jenis Layanan	Rumah Sakit Umum Daerah			
		RSUD dr.HM. Rabain	RSUD Lubai Ulu	RSUD Gelumbang	RSUD SDL
A	Pelayanan Standar	19 layanan	7 layanan	7 layanan	7 layanan
B	Pelayanan Spesialis	19 layanan	3 layanan	4 layanan	3 layanan

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka peningkatan Usia Harapan Hidup antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan Posyandu Balita dan Ibu Hamil.
2. Pemberian biaya operasional kelompok DASHAT (Dapur Sehat Cegah Stunting) di tiga Kecamatan.
3. Pengadaan sarana KKA (Kartu Kembang Anak) untuk memantau perkembangan anak di 262 kelompok BKB (Bina Keluarga Balita).
4. Pendistribusian telur untuk keluarga berisiko stunting di 18 kelompok PPKS.
5. Penyaluran bantuan Bapak Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) sebesar Rp. 450.000 per anak.
6. Penyediaan sarana dan prasarana menuju akses air minum layak di Kabupten Muara Enim pada APBD tahun 2024 dilakukan dengan pengembangan SPAM perdesaaan yang tersebar di 6 Desa (Desa Ibul Belide Darat, Desa Talang Beliung Belide Darat, Desa Pajar Indah Gunung Megang, Desa Embawang Tanjung Agung, desa Cahaya Alam SDU dan desa Pulau Panggung SDL) dengan jumlah total 310 Sambungan Rumah (SR) sedangkan untuk

pengembangan SPAM Perkotaan dengan melakukan pemasangan sebanyak lebih kurang 500 SR melalui program PDAM dan Inpres, rehab pipa distribusi dan pengembangan pemasangan jalur pipa distribusi ke pelanggan.

7. Workshop Kesehatan Calon Pengantin dan Keluarga Berencana bagi Pemegang Program, Lintas Program/Lintas Sektor, Tenaga Sehat di Kabupaten Muara Enim.
8. Pendampingan Tim Ahli Dokter Spesialis Obgyn dan Dokter Spesialis Anak ke Puskesmas dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan Maternal Neonatal.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Muara Enim antara lain :

1. Meningkatkan upaya pencegahan kematian bayi dan balita dengan imunisasi, pencegahan stunting, dan pencegahan penyakit menular.
2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
3. Peningkatan pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan.
4. Melakukan pendekatan pelayanan kesehatan melalui integrasi layanan primer di Puskesmas dan jajarannya.
5. Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di masyarakat.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman.

### 3.2 Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat

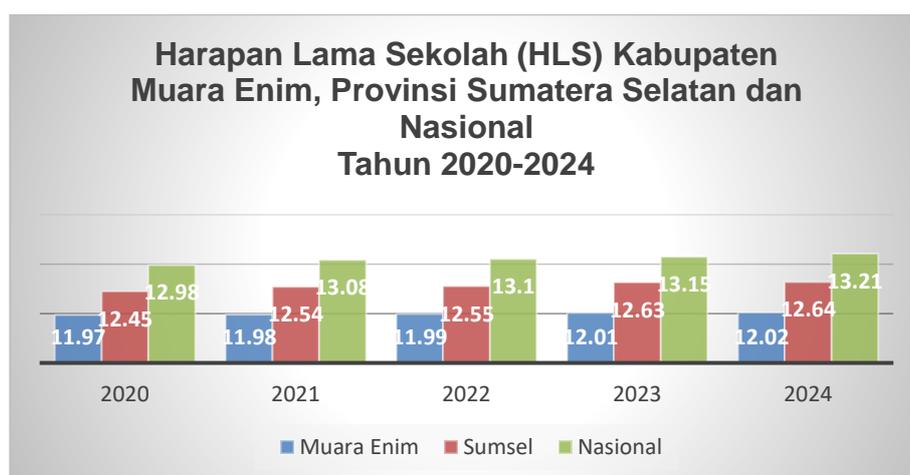
**Tabel 2.3.17**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Angka Harapan Lama Sekolah (AHH)	12.00	12.02	100.17	12.02	12.02	100
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7.98	8.27	103.63	9.00	8.27	91.89
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			101.90			95.94

Sasaran strategis meningkatkan kualitas Pendidikan Masyarakat terdiri dari dua indikator sasaran yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Tahun 2024 dari target AHH sebesar 12.00 terealisasi sebesar 100.17 dengan capaian kinerja 100.17 persen berada pada kategori sangat baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 capaian kinerjanya telah tercapai sebesar 100 persen.

Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 12,02 tahun berarti bahwa rata-rata anak di Kabupaten Muara Enim diharapkan dapat menempuh Pendidikan formal selama 12,02 tahun sepanjang hidupnya. 12,02 tahun menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Muara Enim diharapkan menyelesaikan Pendidikan hingga Tingkat SMA/ sederajat (Kelas 12).

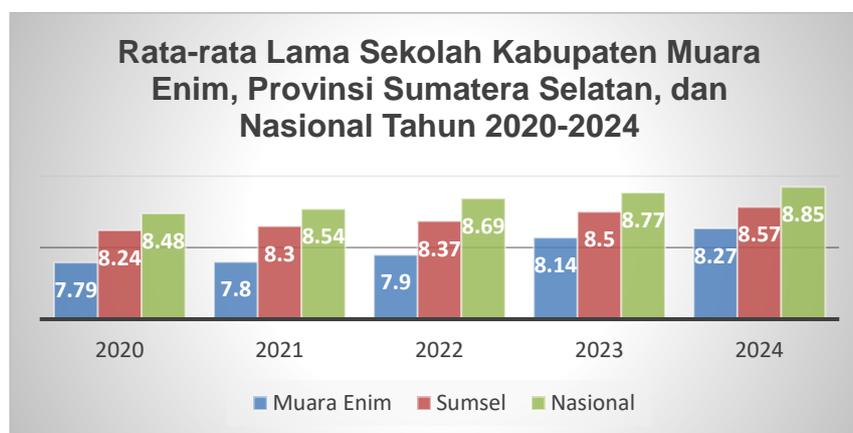
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Muara Enim meningkat setiap tahunnya namun masih lebih rendah dibandingkan dengan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional.



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Untuk indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terealisasi sebesar 8.27 dari target 7.98 sehingga capaian kinerja sebesar 103.63 persen berada pada kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 maka capaian kinerjanya sebesar 91.89 persen. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 8,27 tahun berarti bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Muara Enim telah menempuh Pendidikan formal selama 8,27 tahun. 8,27 tahun menunjukkan bahwa rata-rata penduduk hanya mencapai Pendidikan sekitar kelas 8 (SMP Kelas 2).

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Muara Enim cenderung meningkat setiap tahun akan tetapi masih berada dibawah Rata-rata Lama Sekolah tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional.



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Jika dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah 12,02 tahun, ada kesenjangan sekitar 3,75 tahun. Ini menunjukkan bahwa banyak orang yang belum menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA biasanya didominasi oleh usia yang sudah tua yang berpendidikan terakhir SD sehingga dirata-ratakan dengan usia muda yang banyak berpendidikan terakhir SMA sehingga didapat rata-rata lama sekolahnya menjadi SMP.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat antara lain :

1. Dalam upaya Peningkatan Kurikulum Lokal Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan kegiatan sosialisasi sekaligus Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru dalam melestarikan Cahaya Lintera Bahasa Daerah dengan semangat Merdeka Belajar Tahun Anggaran 2024 dengan peserta sebanyak 68 orang guru perwakilan dari SD, SMP, PAU, SKB dan PKBM.
2. Meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan Pendidikan.
3. Melaksanakan kegiatan pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Paket B dan C secara masif
4. Sinkronisasi akurasi data anak usia sekolah.

Upaya yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat antara lain :

1. Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah melalui peningkatan akses pelayanan Pendidikan bagi seluruh penduduk usia sekolah.
2. Meningkatkan partisipasi penduduk usia sekolah melalui pemberian bantuan biaya Pendidikan siswa miskin dan peningkatan kesadaran kepada orang tua untuk menyekolahkan anaknya.
3. Peningkatan angka kelulusan SD/MI, SMP/ MTS, dan SMA/ MA melalui peningkatan sertifikasi tenaga pendidik.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini yaitu program pengelolaan Pendidikan, program pengembangan kurikulum, program pendidik dan tenaga kependidikan, program pengembangan bahasa dan sastra, program pengembangan kebudayaan, program pengembangan kesenian tradisional, program pembinaan sejarah, program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, program pengelolaan permuseuman.

### 3.3 Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan daya beli masyarakat

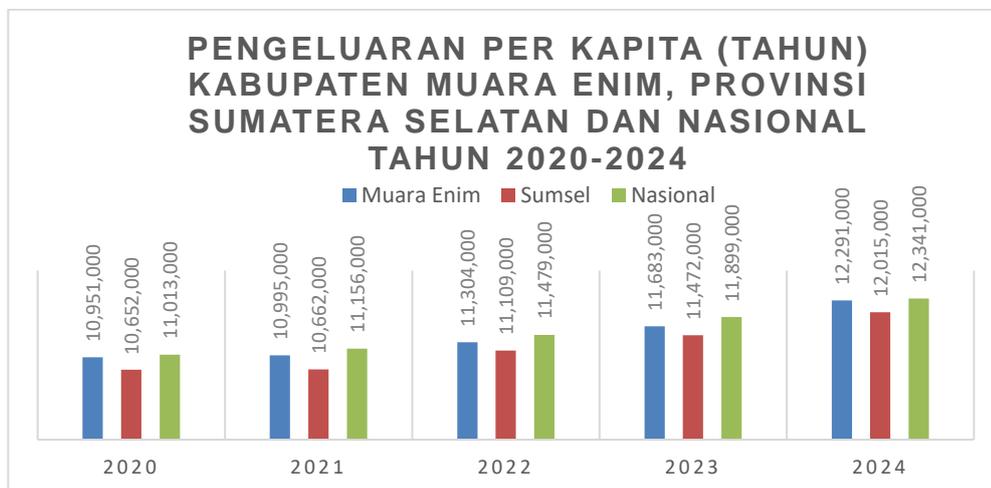
**Tabel 2.3.18**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Meningkatkan Daya Beli Masyarakat**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Pengeluaran Per Kapita	11.450	12.291	107.34	11.744	12.291	105
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			107.34			105

Realisasi indikator sasaran meningkatnya daya beli masyarakat Kabupaten Muara Enim tahun 2024 sebesar Rp. 12.291.000 dari target Rp. 11.450.000 sehingga capaian kinerjanya sebesar 107.34 persen berada pada kategori sangat baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 maka capaian kinerjanya sebesar 105 persen.

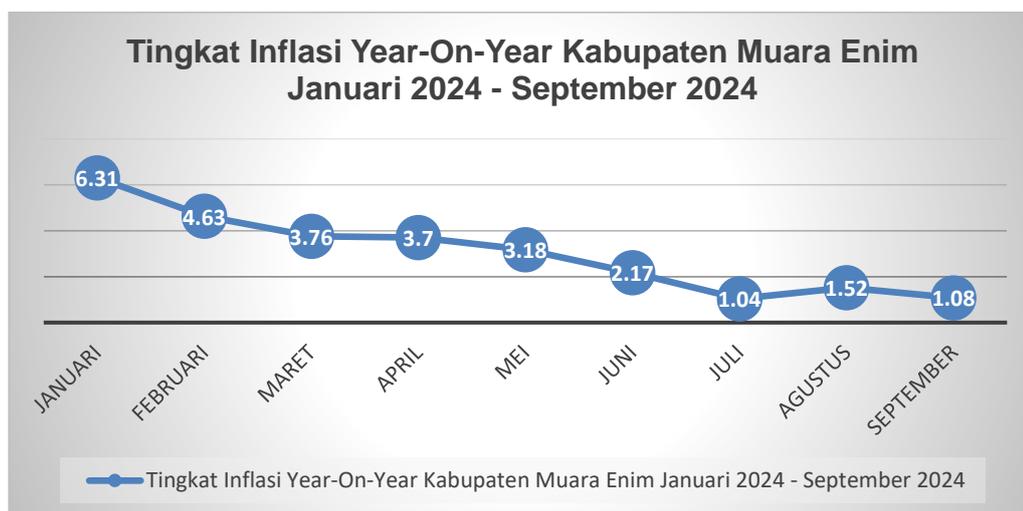
Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu. Daya beli masyarakat di Kabupaten

Muara Enim cenderung meningkat setiap tahunnya. Pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Muara Enim tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita di Provinsi Sumatera Selatan namun lebih rendah daripada pengeluaran per kapita nasional.



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk menjaga daya beli masyarakat yaitu dengan pengendalian inflasi. Tingkat inflasi Year-On-Year (Y-On-Y) Kabupaten Muara Enim (2022=100), Januari 2024 – September 2024 sebagai berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Inflasi di Kabupaten cenderung menurun. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk pengendalian inflasi antara lain :

1. Melaksanakan operasi pasar murah.

2. Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui subsidi komoditi peternakan (telur dan daging) dan komoditi hortikultura (cabe).
3. Pengadaan cadangan pangan pemerintah (pengadaan beras premium).
4. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang.
5. Penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen.
6. Melaksanakan monitoring pengendalian inflasi daerah.

Untuk menjaga agar inflasi tetap terkendali, Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan melakukan :

1. Melakukan operasi pasar murah khususnya menjelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.
2. Melakukan sidak pasar terutama menjelang hari besar keagamaan.
3. Mengoptimalkan penggunaan APBD untuk membiayai program dan kegiatan stabilisasi harga barang.
4. Kerjasama dengan Bulog Sub Divre Lahat perihal rencana pembelian beras dari petani Kabupaten Muara Enim dalam rangka menaikkan Nilai Tukar Petani (NTP).
5. Terus menjalin kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.
6. Rencana pembentukan toko pangan murah.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis antara lain program hubungan industrial, program perekonomian dan pembangunan, program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

#### 4. Analisis Capaian Tujuan 4 Meningkatnya akuntabilitas dan tata Kelola pemerintahan

**Tabel 2.3.19**  
**Analisis Pencapaian Tujuan 4**  
**Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Indeks Reformasi Birokrasi	B	B*	100	B	B*	100
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			100			100

\*Nilai tahun sebelumnya

Target capaian tujuan meningkatnya akuntabilitas dan tata Kelola pemerintahan dengan indikator sasaran indeks reformasi birokrasi saat ini hasilnya belum dirilis oleh Kementerian PAN RB sehingga masih menggunakan data capaian tahun sebelumnya yaitu “B” dengan capaian kinerja 100 persen berada pada kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 maka capaian kinerjanya telah tercapai 100 persen.

Adapun indeks reformasi Kabupaten Muara Enim tahun 2020 – 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.3.20 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim 2020 - 2023**

No	Keterangan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	Indeks reformasi birokrasi	CC (58.53)	CC (59.42)	B (60.78)	B (63.28)

Sumber : Data diolah

Di tahun 2024 selain menyusun rencana aksi reformasi birokrasi general, Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga menyusun rencana aksi reformasi tematik yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, peningkatan produk dalam negeri, peningkatan penanganan stunting, dan pengendalian inflasi. Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain :

1. Melakukan evaluasi atas rencana aksi RB General dan Tematik tahun 2024 secara triwulanan untuk memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB di lingkungan Kabupaten Muara Enim.
2. Melakukan penunjukan unit/satuan kerja untuk melaksanakan pembangunan zona integritas melalui SK Bupati Muara Enim nomor 632/KPTS/INSPEKTORAT/2024 tentang Penunjukan Unit/Satuan Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
3. Secara aktif dan berkelanjutan melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan proses pembangunan Zona Integritas pada unit/satuan kerja berjalan baik dan tepat sasaran sehingga unit/satuan kerja yang diusulkan telah memenuhi kriteria pengusulan dan penetapan unit/satuan kerja berpredikat menuju WBK.
4. Melakukan penguatan implementasi reformasi birokrasi dengan narasumber dari LAN RI.

Pencapaian indikator tujuan meningkatnya akuntabilitas dan tata Kelola pemerintahan di dukung dengan empat sasaran strategis yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

#### 4.1 Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

**Tabel 2.3.21**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	100	B	B	100
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			100			100

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan indikator sasaran yang baru dihitung pada tahun 2023. Nilai IPKD tahun 2024 merupakan hasil pengukuran IPKD tahun 2023. IPKD Kabupaten Muara Enim tahun 2024 adalah B sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kerjanya sebesar 100 persen berada dalam kategori baik. Dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 capaian kerjanya telah tercapai 100 persen.

IPKD didapat dengan menjumlahkan seluruh indeks pada setiap dimensi yaitu :

**Tabel 2.3.22**  
**IPKD Kabupaten Muara Enim Tahun 2023**

DIMENSI	TARGET NILAI	TAHUN 2023
Dimensi 1 – Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	15	11,3935
Dimensi 2 – Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	20	20
Dimensi 3 – Transparansi pengelolaan keuangan daerah	15	13,9655
Dimensi 4 – Penyerapan anggaran	20	15
Dimensi 5 – Kondisi keuangan daerah	15	6,2016
Dimensi 6 – Opini BPK atas LKPD	15	15
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>81,5605</b>
<b>KATEGORI PERINGKAT</b>	<b>A</b>	<b>B</b>

Sumber : <https://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id>

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator indeks pengelolaan keuangan daerah antara lain :

1. Percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Melakukan tender dini untuk kegiatan yang bersumber dari perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Melaksanakan rapat koordinasi bulanan dengan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka konsolidasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Muara Enim.
4. Mendorong peran APIP dalam melakukan reuiu terhadap dokumen perencanaan dan keuangan.
5. Melakukan pendampingan dan asistensi APH dan Korsupgah KPK RI dalam pelaksanaan kegiatan.

Nilai beberapa dimensi pada IPKD yang masih dapat ditingkatkan lagi antara lain dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah, dimensi penyerapan anggaran serta dimensi kondisi keuangan daerah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IPKD Kabupaten Muara Enim selanjutnya antara lain :

1. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Melakukan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja antara lain program pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan pendapatan daerah, program pengelolaan barang milik daerah.

#### 4.2 Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

**Tabel 2.3.23**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	

Indeks SPBE	3.00	3.29	109.66	3.20	3.29	102.81
Rata – rata capaian kinerja			109.66			102.81

Capaian indikator kinerja Indeks SPBE Kabupaten Muara Enim dari target 3.00 telah terealisasi sebesar 3.29 sehingga capaian kinerja tahun 2024 sebesar 109.66 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 realisasi indikator kinerja telah melampaui target dengan capaian kerjanya sebesar 102.81 persen.

**Tabel 2.3.24**  
**Hasil Evaluasi eksternal Penyelenggaraan SPBE**  
**Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

Indeks SPBE	3.29
Domain	Indeks
Domain Kebijakan SPBE	4.30
Domain Tata Kelola SPBE	3,20
Domain Manajemen SPBE	1.36
Domain Layanan SPBE	3.75

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim

Indeks SPBE Kabupaten Muara Enim tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks SPBE Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional.



Sumber : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim

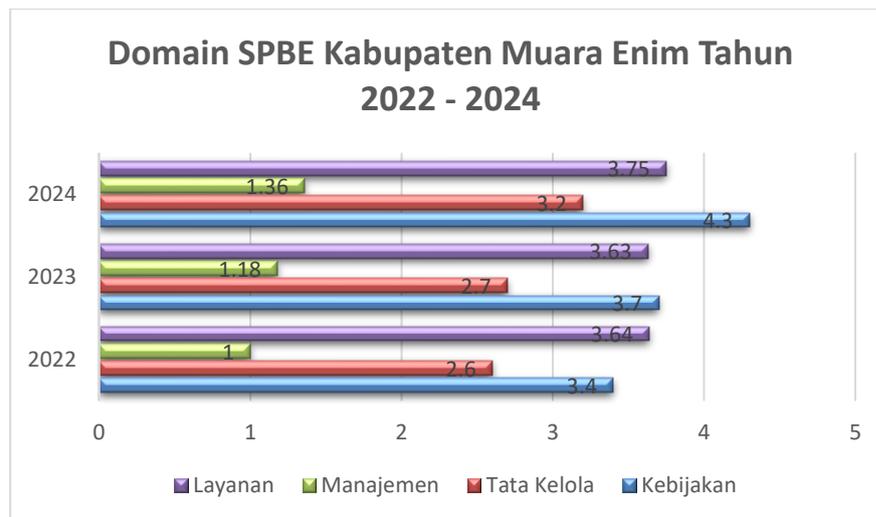
**Tabel 2.3.25**  
**Hasil Evaluasi Eksternal Penyelenggaraan SPBE**  
**Pemerintah Kabupaten Muara Enim**  
**Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024**

	2022	2023	2024
Indeks SPBE	2,91	3.00	3,29
Domain	Indeks	Indeks	Indeks

Kebijakan	3,40	3.70	4.30
Tata Kelola	2,60	2.70	3,20
Manajemen	1.00	1.18	1.36
Layanan	3.64	3.63	3.75

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim

Domain SPBE Kabupaten Muara Enim setiap tahun cenderung meningkat.



Sumber : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan koordinasi SPBE di lingkup Kabupaten Muara Enim dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE yang diatur dalam SK Bupati nomor 54/KPTS/Diskominfo/2024 tentang Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024. Program kerja yang dilakukan pada tahun 2024 oleh Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Muara Enim adalah :

1. Mengelar rapat koordinasi tim koordinator SPBE tahun 2024.
2. Mengikuti SPBE SUMMIT tahun 2024 secara daring.
3. Mengikuti peluncuran SIA SPBE v2 secara daring.
4. Mengikuti pelatihan/Bimbingan Teknis SIA SPBE v2 yang dilakukan oleh Kemenpan RB.
5. Menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi SPBE tahun 2024.
6. Menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Tim Asesor Internal Evaluasi SPBE tahun 2024.

7. Melakukan koordinasi teknis bersama Kemenpan RB terkait pendampingan/narasumber kegiatan penyusunan Arsitektur SPBE *to-be* dan Peta Rencana SPBE.
8. Menyusun dokumen Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *to-be* Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
9. Menyusun dokumen Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
10. Melakukan Sosialisasi Penyusunan Peta Rencana dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *to-be* Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Tim Narasumber Kemenpan RB yang diikuti sebanyak 40 unit kerja lingkup pemerintah kabupaten muara enim.
11. Melakukan *Final Meeting* Penyusunan Peta Rencana dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *to-be* Pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama Tim Narasumber Kemenpan RB yang diikuti sebanyak 40 unit kerja lingkup pemerintah kabupaten muara enim.
12. Melakukan koordinasi teknis bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait persiapan Audit Aplikasi dan Infrastruktur TIK.
13. Mengikuti Sosialisasi secara daring Pemantauan dan Evaluasi SPBE tahun 2024.
14. Melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE tahun 2024.
15. Mengikuti penilaian interviu pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Peningkatan Pelaksanaan SPBE di Kabupaten Muara Enim, didukung dengan adanya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Dalam rangka upaya memperluas cakupan pembangunan infrastruktur digital yang dapat dinikmati secara merata diseluruh wilayah Kabupaten Muara Enim, peran infrastruktur telekomunikasi dalam meningkatkan tingkat teledensitas sangatlah penting untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pemerintahan Kabupaten Muara Enim dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) saat ini Kabupaten Muara Enim sudah menerapkan 100% sambungan internet dengan menggunakan Fiber optik (FO) ke seluruh Perangkat Daerah termasuk 22 Kecamatan di Muara Enim sudah terhubung kabel fiber optik yang jauh lebih efisien dengan menggunakan sewa metro ethernet untuk kecamatan. Untuk jaringan internet dalam kota yang melayani internet ke setiap OPD dibangun secara mandiri atau menggunakan kabel sendiri, namun untuk kecamatan masih menggunakan vendor untuk jaringan Fonya dan sampai dengan tahun 2022 ini masih sewa. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melakukan sewa jaringan Online/Internet/ Bandwidth internet dengan kecepatan 600 Mbps, sewa collocation untuk back up data center yang ada di nix data center jakarta dan batam. Untuk daerah yang sebelumnya tidak ada sinyal internet, di tahun 2024 ini telah dilakukan akses internet untuk desa blankspot dengan menggunakan jaringan Via Vsat.

Pada tahun 2024 ini telah dilakukan sewa internet Via V-Sat untuk desa pariwisata yang beralokasi di :

1. Desa Bedegung yang merupakan wisata air terjun curup tenang
2. Desa Karya Mulia yang merupakan wisata kampong melaka
3. Desa Sumber Rahayu yang merupakan wisata betung berseri
4. Desa Pinang Banjar merupakan Wisata air
5. Desa Ujan Mas Baru merupakan wisata air danau emas

Akses internet di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim menggunakan jaringan fiber optik sendiri dengan menyewa bandwidth dari PT. Jala Lintas Media/JLM. Pusat operasi jaringan dari provider tersebut terhubung melalui fiber optic ke dua lokasi yaitu :

1. NOC 1 DISKOMINFO
2. NOC 2 KANTOR BUPATI MUARA ENIM

## 2. Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pada tahun 2024 untuk meningkatkan nilai indeks SPBE pemkab muara enim menyusun arsitektur spbe to-be dan peta rencana spbe yang merupakan amanat dari perpres 95 tahun 2018 tentang spbe dan perpres 132 tentang arsitektur spbe nasional. kegiatan penyusunan arsitektur spbe to-be dan peta rencana spbe pemkab muara enim didampingi oleh tim narasumber dari kemenpan rb sebanyak 3 orang. kegiatan penyusunan arsitektur spbe to-be diawali dengan melakukan reviu dan evaluasi terhadap arsitektur spbe as-is pemkab muara enim yang dilakukan bersama antar tim internal pemkab dan tim narasumber. selanjutnya dilakukan sosialisasi mengenai kegiatan penyusunan arsitektur spbe to-be dan peta rencana spbe pemkab muara enim kepada 40 unit kerja lingkup pemkab muara enim yang dilakukan oleh tim narsum. kemudian setelah itu dilakukan pendampingan penyusunan kepada para pic spbe unit kerja melalui daring dan luring mengenai tata cara penyusunan/penginputan data di SIA SPBE.

Dalam mendukung program penyusunan Arsitektur Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menyiapkan kegiatan evaluasi mandiri SPBE dan Penyusunan SPBE dalam mendukung terwujudnya layanan pemerintah yang terintegrasi secara nasional.

## 3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Untuk menunjang kebutuhan dalam pengembangan aplikasi pada tahun anggaran 2024 telah dianggarkan belanja lisensi software yang dipergunakan untuk pembuatan desain visual, konversi desain ke Cascading Style Sheet (CSS) dan Hypertext Markup Language (html) karena saat ini Pemerintah Kabupaten Muara Enim masih menggunakan software trial dan software yang bersifat open source, hal ini kurang optimal dikarenakan adanya batasan fitur yang diberikan antara versi open source, trial dan lisensi berbayar. Pemeliharaan Server juga dianggap krusial karena mendukung aktifitas aplikasi yang ada di *Data Center Kominfo. Maintenance Data center* ini sendiri meliputi untuk memperbarui operating system (OS), setting RAID server, membackup data, memperbarui versi aplikasi, mengaturstruktur direktori di server dan memastikan DNS berjalan.

Dalam peningkatan pelayanan publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melakukan pengembangan website desa. Untuk menjalankan website desa telah ada program satu desa satu tenaga IT (Informasi Teknologi) pada tahun 2024 telah dilakukan pelatihan – pelatihan kepada para Tenaga IT agar bisa mengoperasikan website desa dengan baik sebanyak 510 peserta dari desa dan kelurahan, kemudian para tenaga IT diberi template website serta didukung dengan hosting (tempat untuk menyimpan semua file dan data, sehingga bisa diakses oleh semua orang melalui internet).

#### 4. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Untuk mendukung program Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten Kota Cerdas Dan Kota Cerdas, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah mengikuti kegiatan evaluasi tahap I yang bersifat konsultatif kepada kabupaten/kota yang tergabung pada program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) agar kabupaten/kota dapat berkonsultasi dengan praktisi smart city dan perwakilan Kementerian lain untuk membahas berbagai tantangan dalam mengimplementasikan program kota cerdas (smart city) di kabupaten/kotanya, mendapatkan arahan tentang inovasi pada program percepatan (quick win) yang akan atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan berbagai hal lainnya terkait implementasi program kota cerdas (smart city). Selanjutnya, evaluasi tahap I dimaksud dilanjutkan dengan evaluasi tahap II untuk melakukan penilaian terhadap kualitas dan progress implementasi program kota cerdas (smart city) di setiap kabupaten/kota. Evaluasi dilakukan tidak hanya mengukur tingkat keberhasilan dan mengidentifikasi adanya masalah dalam pelaksanaan, namun juga untuk dapat memberikan masukan serta saran kepada pemerintah kota dan kabupaten tentang bagaimana sepatutnya proses pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dilaksanakan. Dengan demikian, secara umum hasil evaluasi mencakup penilaian kemajuan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) berdasarkan berdasarkan 5 (lima) dimensi, pengenalan kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Masterplan Kota Cerdas (Smart City), dan saran untuk perbaikan untuk pemerintah kabupaten atau kota.

Dalam mendukung program Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistemkabupaten Kota Cerdas Dan Kota Cerdas, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan kegiatan Penilaian Kota Cerdas dan sewa wifi di 33 titik lokasi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Muara Enim menjadi Kota Cerdas (Smart City) terhadap birokrasi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kabupaten Muara Enim merupakan satu dari 100 Kabupaten atau Kota di Indonesia yang terpilih sebagai *pilot project* dalam program *smart city* atau *smart regency*, dan juga telah membangun infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK yang terdiri dari :

- Layanan internet pemerintah terpusat
- Pusat data (data center) terintegrasi
- Pembangunan jaringan FO untuk keamanan data
- Muara Enim Command Center atau MECC

Untuk mendukung smart city telah dipasang akses wifi publik di lingkup Kabupaten Muara Enim tahun 2024 diantaranya :

- Pasar Muara Enim
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pemda Dalam Gedung
- Seputaran Jembatan Enim Dua
- Tugu Kopi
- RSUD HM Rabain
- Seputaran Tugu Monpera
- Taman Adipura 1
- Taman Adipura 2
- Kolam Renang
- Gor Sekundang Bara 1
- Gor Pancasila 2
- Gor Pancasila 1
- Gor Sepak Takraw
- Kantor DPRD 1
- Kantor DPRD 2
- Taman Serasan Sekundang

- Tugu Pahlawan ME
- Gedung Arsip Dinas Perpustakaan
- Rumah Baca Kelurahan Muara Enim
- Gerai Oleh-oleh
- Taman Adipura 3
- Tugu Menpora Tanjung Enim

5. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah

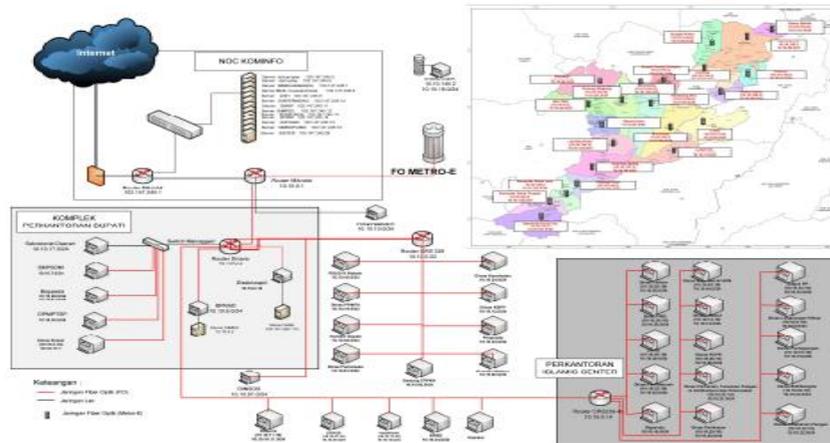
Dalam rangka meningkatkan konektivitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) saat ini Kabupaten Muara Enim sudah menerapkan 100% sambungan internet dengan menggunakan Fiber optik (FO) ke seluruh Perangkat Daerah termasuk 22 Kecamatan di Muara Enim sudah terhubung kabel fiber optik yang jauh lebih efisien. Untuk jaringan internet dalam kota yang melayani internet ke setiap OPD dibangun secara mandiri atau menggunakan kabel sendiri, namun untuk kecamatan masih menggunakan vendor untuk jaringan FO-nya dan sampai dengan tahun 2024 ini masih sewa.

Untuk meningkatkan infrastruktur dan dalam mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menyiapkan peralatan dan pemeliharaan jaringan intra pemerintah untuk kebutuhan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Adapun peralatan dan pemeliharaan jaringan intra pemerintah yang dimaksud adalah pemeliharaan CCTV, pemeliharaan jaringan *Fiber Optic*, peralatan media command center, peralatan videotron indoor dan outdoor, peralatan jaringan *Fiber Optic*, router utama dan router kecamatan. Pemeliharaan CCTV yang dilakukan pemeliharaan di 6 lokasi berbeda yaitu:

1. Bundaran air mancur
2. Jembatan Enim II
3. Tugu Selamat Datang Muara Enim
4. Simpang Islamic Center
5. Tugu Kopi
6. Kecamatan Tanjung Agung

Pemeliharaan jaringan *Fiber Optic* berlokasi disepanjang jaringan intra perkantoran Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

### Network Maps Kabupaten Muara Enim



Sumber : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim

#### 6. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non elektronik

Untuk mengatasi ancaman terhadap penyadapan Informasi tersebut, maka perlu upaya untuk mengamankan Informasi, sehingga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Informasi menjadi terjaga, Salah satu cara mencegah terjadinya penyadapan Informasi adalah melalui kegiatan Kontra Penginderaan atau *counter surveillance*. Kegiatan ini dilakukan dengan mengecek terhadap barang-barang yang berada di dalam ruangan yang berpotensi menjadi peralatan penyadapan / *surveillance* seperti *hidden camera*, *button camera*, *security camera*, *spy camera*, *stealth wireless headset*, *wireless pinhole camera*, *wireless tapping* dan perangkat sadap lainnya, melakukan analisis dan melokalisir alat sadap, sehingga ruangan menjadi steril dari alat penyadap. Dengan dilaksanakannya kegiatan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non elektronik/kontra penginderaan agar aset / fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim menjadi terlindungi dari upaya pencurian informasi yang menggunakan alat penyadap Radio Frequency (RF) yang mungkin dipasang permanen oleh pihak yang berwenang, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara ilegal.

Pada tahun 2024 kegiatan ini dilaksanakan 4 kali dalam setahun dengan lokasi/tempat sebagai berikut :

- Ruang kerja Bupati Muara Enim
- Ruang rapat Bupati Muara Enim
- Ruang kerja Sekda kab. Muara Enim
- Rumah jabatan Bupati Muara Enim
- Ruang kerja Asisten III
- Kantor Kepala Dinas DPMTSP
- Ruang Kerja Ketua DPRD Kab. Muara Enim
- Ruang Kerja Wakil Ketua 1 DPRD Kab. Muara Enim
- Ruang Kerja Wakil Ketua 2 DPRD Kab. Muara Enim
- Ruang Kerja Wakil Ketua 3 DPRD Kab. Muara Enim

#### 7. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sistem informasi yang digunakan perlu ditunjang oleh sistem Persandian yang memadai seperti Jaring Komunikasi Sandi (JKS) pada e-mail Sanapati. Pentingnya Jaring Komunikasi Sandi dalam tata kelola pemerintahan, salah satu fungsinya adalah mencegah dan mengantisipasi terjadinya kebocoran data yang dapat mengganggu roda kegiatan pemerintahan khususnya di Kabupaten Muara Enim. E-mail Sanapati adalah email khusus dengan user tertentu dengan enkripsi yang lebih kompleks dengan tingkat keamanan yang tinggi serta memiliki beberapa kelebihan.

Kelebihan dari E-mail Sanapati ini dapat memproteksi terhadap fake email, spam email, phising link, dan email bombing. Email ini juga sudah diuji dan terbukti berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan antara jajaran Pemerintah Pusat, BUMN, TNI, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemda Kabupaten / Kota).

Dalam kegiatan ini dilaksanakan sosialisasi Jaring Komunikasi Sandi (JKS) melalui E-mail Sanapati ditujukan untuk Perangkat Daerah agar OPD dapat memanfaatkan dan menerapkan secara optimal penggunaan *e-mail* Sanapati ini, dikarenakan pendistribusian surat masuk baik dari Instansi pusat maupun dari provinsi akan di distribusikan melalui e-mail Sanapati ini dan tidak lagi door to door yang mana kurang efektif dan tidak efisien.

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Sosialisasi Jaring Komunikasi Sandi (JKS) melalui E-mail Sanapati ini adalah agar dalam proses pendistribusian surat baik dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, maupun dari pemerintah daerah itu sendiri dapat berjalan secara cepat, efektif, dan efisien serta dapat menerapkan konsep (paperless) atau meminimalkan penggunaan kertas dan tentu saja tidak melupakan dari sisi keamanan informasi dan data, dimana e-mail Sanapati ini dikelola langsung oleh BSSN RI, sehingga meminimalkan resiko terhadap pencurian data dan informasi penting.

Selain sosialisasi jaring komunikasi sandi, tahun 2024 telah dilaksanakan sosialisasi keamanan informasi mengingat pengamanan Informasi menjadi kebutuhan yang sangat vital khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim bahwa seiring dengan perkembangan teknologi yang terintegrasi melalui jaringan dan komunikasi data menyebabkan banyak data dan informasi terdistribusi, kondisi inilah yang menjadi rentan terhadap akses bagi pihak yang tidak memiliki otoritas, insiden Keamanan Informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai serangan terhadap sistem elektronik namun tidak terbatas pada virus, malware, maupun deface terhadap sebuah situs.

Di era digitalisasi saat ini, keamanan informasi menjadi hal yang sangat krusial, dengan semakin banyaknya data dan Informasi yang kita kelola, resiko kebocoran data dan serangan siber pun semakin meningkat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang Keamanan Informasi adalah suatu keharusan bagi kita semua, karena Informasi merupakan suatu asset yang memiliki nilai vital bagi suatu organisasi, maka dari itu kita harus waspada terhadap kerawanan pencurian informasi sehingga pelaksanaan sosialisasi keamanan informasi ini dianggap penting dalam meningkatkan kapasitas dan kesadaran SDM akan pentingnya pengamanan dan Keamanan Informasi, khususnya dalam memahami dan mengenali perkembangan ancaman Teknologi Informasi terkini serta cara meminimalisir dan mencegah terhadap pencurian data dan Informasi, sehingga dapat membantu meminimalisir resiko terjadinya pencurian data dan insiden siber lainnya. Sehingga tercapainya aspek keamanan sistem informasi, diantaranya kerahasiaan, keutuhan/ integritas dan ketersediaan Informasi.

Langkah-langkah yang akan dilakukan kabupaten muara enim untuk meningkatkan capaian indeks SPBE antara lain dengan mencapai keberhasilan penerapan program *smart regency* yaitu:

1. Membentuk dewan smart city dan memastikan bahwa dewan *smart city* memiliki wawasan dan niat baik untuk membangun kabupaten melalui upaya-upaya inovatif;
2. Menggalang kerja sama dengan semua pihak
3. Mengembangkan kebijakan pro inovatif dan kolaboratif.

Program yang mendukung pencapaian target indikator sasaran kinerja antara lain program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota, program informasi dan komunikasi publik, program aplikasi informatika, program penyelenggaraan statistik sektoral.

#### 4.3 Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah

**Tabel 2.3.26**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Predikat SAKIP	BB	BB	100	BB	BB	100
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			100			100

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah sebesar 100 persen yaitu dari target predikat SAKIP BB dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 maka capaian kinerja sudah tercapai 100 persen. Adapun nilai SAKIP Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3.27 Nilai SAKIP Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 – 2024**

No	Keterangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai SAKIP	BB (73.49)	BB (74.54)	BB (74.83)	BB (75.41)	BB (76.51)

Sumber : Data diolah

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mencapai target predikat SAKIP antara lain :

1. Melakukan pembinaan untuk memastikan dokumen perencanaan Pemda dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim berorientasi hasil dan indikator kinerjanya memenuhi kriteria SMART-C" melalui evaluasi AKIP atas dokumen perencanaan OPD terkait.
2. Melakukan pembinaan terhadap OPD terkait Cascading dengan prinsip *logical framework* telah dilakukan sejak tahun 2019 dan secara kontinu terus dilaksanakan.
3. Melakukan Review dan perbaikan perjanjian kinerja/cascading. Hal ini tercermin dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun 2023. Dalam Dokumen RPD tersebut Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menetapkan cascading di setiap tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan yang tercantum dalam Bab V dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Bab VIII di Dokumen RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026. Yang selanjutnya indikator tersebut menjadi pedoman bagi OPD dalam penyusunan Renja, Restra dan Perjanjian Kinerja.
4. Melakukan pembinaan untuk memastikan seluruh target kinerja yang ditetapkan telah sesuai dengan indikator kinerja dan jelas yaitu tidak menimbulkan dwi makna serta ditetapkan secara realistis dan berdasarkan informasi capaian kinerja tahun sebelumnya melalui evaluasi AKIP.
5. Melakukan pembinaan untuk memastikan seluruh formulasi telah sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian kinerja melalui evaluasi AKIP.
6. Informasi capaian kinerja atau realisasi capaian kinerja pada tahun sebelumnya menjadi bahan dan pedoman dalam memutuskan permasalahan dan isu strategis dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Muara Enim serta menjadi pedoman dalam merumuskan program Pemerintah Daerah.
7. Inspektorat telah memastikan seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP telah ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah yang dilengkapi dengan data dukung melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 700/458/Inspektorat-I/2024.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 masih terdapat beberapa catatan perbaikan yang harus ditindaklanjuti. Beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian sasaran strategis kedepannya antara lain :

1. Melakukan perubahan *timeline* evaluasi SAKIP internal untuk dilaksanakan sesuai dengan tahun berjalan sehingga hasil evaluasi dapat lebih relevan untuk ditindaklanjuti untuk perbaikan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja perangkat daerah di tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
2. Melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap OPD agar dapat mendorong peningkatan implemementasi SAKIP.
3. Melakukan Bimbingan Teknis terkait Evaluasi SAKIP dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar terjadi peningkatan kualitas dalam pembuatan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP OPD yang dilakukan oleh Inspektorat.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota, program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, program pengembangan sumber daya manusia, program penelitian dan pengembangan daerah, program penyelenggaraan pengawasan, program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, program penyelenggaraan pemerintahan umum.

#### 4.4 Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik

**Tabel 2.3.28**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IPP)	4.22	4.56	108.06	4.86	4.56	93.83
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			108.06			93.83

Realisasi indikator sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik tahun 2024 yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang dirilis oleh Kementerian PAN RB sebesar 4,56 berada pada kategori A (pelayanan prima) sehingga capaian kinerja tahun 2024 sebesar 108.06 atau kategori baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 maka capaian kinerjanya telah tercapai sebesar 93.83 persen.

Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim menunjukkan tren yang positif dapat dilihat dari meningkatnya nilai IPP setiap tahun.



Sumber : Bagian Organisasi Setda

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendorong pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelayanan publik antara lain :

1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim per tiga bulan yang dilakukan melalui evaluasi tenant MPP, evaluasi fasilitas pelayanan MPP, evaluasi petugas pelayanan.
2. Memenuhi prasarana dan sarana pelayanan publik pada Perangkat Daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan, diantaranya ruang tunggu yang representative, fasilitas toilet, ruang bermain anak, fasilitas penunjang kaum disabilitas, ruang parkir, sarana dan prasarana P3K, tempat sampah, dan ruang ibadah.
3. Melakukan penilaian mandiri terhadap kinerja pelayanan publik pada Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat.
4. Meningkatkan alokasi anggaran dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim.

5. Melakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap SOP terkait dengan aktifitas/ kegiatan, kelengkapan, dan waktu serta mempublikasikan SOP yang telah disusun melalui kanal digital.
6. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait pelayanan di Mall Pelayanan Publik dengan narasumber dari Kementerian PAN RB.
7. Melaksanakan kegiatan pendampingan pra penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik bekerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan.

Selanjutnya untuk semakin meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim akan dilakukan :

1. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala terutama pada Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat.
2. Memperluas layanan dan mengembangkan aplikasi layanan online agar masyarakat dapat mengakses dan menerima seluruh layanan tanpa datang langsung.
3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas melalui pelatihan teknologi, komunikasi, dan manajemen konflik untuk meningkatkan kualitas layanan.
4. Membuat jadwal sosialisasi ke masyarakat dalam rangka memperkenalkan layanan-layanan publik yang ada di Dinas Sosial sehingga masyarakat bisa mengetahui apa saja layanan yang dapat diterima di Dinas Sosial.
5. Menyediakan Gedung kantor Dinas Sosial yang lebih representative.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis antara lain program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program pengelolaan energi baru terbarukan, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program standarisasi dan perlindungan konsumen, program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, program penanggulangan bencana, program pengelolaan taman makam pahlawan, program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, program penyelesaian sengketa tanah garapan, program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, program penetapan tanah ulayat, program pengelolaan tanah kosong, program penatagunaan tanah, program pendaftaran penduduk, program pencatatan sipil, program pengelolaan informasi administrasi kependudukan, program pengelolaan profil kependudukan, program penataan desa, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan Masyarakat hukum adat, program

penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), program pengelolaan pelayaran, program pembinaan perpustakaan, program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, program pengelolaan arsip, program perlindungan dan penyelamatan arsip, program pengembangan Kawasan transmigrasi, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.

**5. Analisis Capaian Tujuan 5  
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat**

**Tabel 2.3.29  
Analisis Pencapaian Tujuan 5  
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Persentase penduduk miskin	10.71	9.79	109.40	9.88	9.79	100.92
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			109.40			100.92

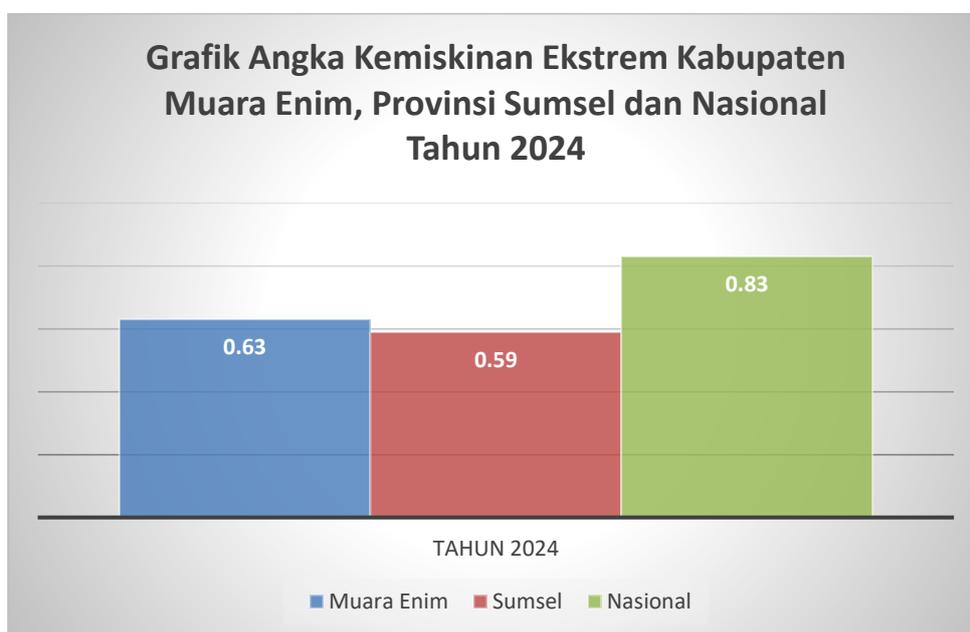
Indikator sasaran persentase penduduk miskin tahun 2024 terealisasi sebesar 9.79 persen dari target sebesar 10.71 persen sehingga capaian kerjanya sebesar 109.40 persen. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026, realisasi tahun 2024 telah melampaui target dengan capaian kinerja sebesar 100.92 persen.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Muara Enim lebih rendah dibandingkan dengan persentase rata-rata penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan sebesar 10,97 persen namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan persentase rata-rata penduduk miskin tingkat nasional sebesar 9.03 persen.



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Muara Enim tahun 2024 sebesar 0,63 persen, masih lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan ekstrem Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,59 persen namun lebih rendah daripada angka kemiskinan ekstrem nasional sebesar 0,83 persen.



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem antara lain :

1. Pembinaan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 246 desa untuk 5.505 jiwa.

2. Pengelolaan jaminan kesehatan Masyarakat sebanyak 180.732 peserta.
3. Pemberian bansos anak yatim, piatu, fakir miskin dan lansia, dengan penerima manfaat sebesar 3.069 jiwa.
4. Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif kepada masyarakat miskin.
5. Pemberian asuransi kematian dengan jumlah 469.781 jiwa.
6. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis, dan masyarakat berupa pelatihan budidaya ikan lele.
7. Pemberian bantuan dan pelatihan kepada perempuan sebagai kepala keluarga dan keluarga miskin.
8. Bantuan kepada desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) sebanyak 4 desa.
9. Pengadaan pakaian seragam sekolah gratis sebanyak 110.000 stel pakaian siswa.
10. Pemberian bantuan budidaya ikan dalam ember (Budikdamber) untuk masyarakat miskin ekstrem sebanyak 210 KK di 21 Kecamatan.
11. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin sebanyak 1.000 unit.
12. Pembangunan sanitasi layak bagi masyarakat miskin sebanyak 900 unit.  
Upaya selanjutnya dalam Penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Muara Enim akan dilakukan dengan tiga strategi yaitu :

1. Peningkatan pendapatan.
  - a. Melaksanakan program padat karya di perdesaan.
  - b. Bantuan modal bergulir pada pelaku UMKM
2. Mengurangi beban pengeluaran.
  - a. Memberikan bantuan sembako murah kepada masyarakat.
  - b. Bantuan premi BPJS Kesehatan.
  - c. Bantuan pakaian dan perlengkapan sekolah.
3. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
  - a. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
  - b. Meningkatkan peran dunia usaha melalui bantuan CSR

Pencapaian tujuan meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat didukung oleh sasaran strategis meningkatkan penanganan PPKS, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk, dan meningkatkan kualitas layanan hunian Masyarakat.

## 5.1 Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan penanganan PPKS

**Tabel 2.3.30**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Meningkatkan Penanganan PPKS**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Persentase penurunan penanganan PPKS	81.73	78.83	96.45	75.76	78.83	104.05
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			96.45			104.05

Realisasi indikator sasaran persentase penurunan penanganan PPKS tahun 2024 sebesar 78.83 persen dengan capaian kinerja sebesar 96.45 persen berada pada kategori baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 capaian kinerjanya sebesar 104.05 persen.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran persentase penurunan penanganan PPKS antara lain :

1. Penyediaan alat bantu untuk penyandang disabilitas.
2. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat.
3. Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.
4. Memberikan bantuan asuransi kematian.
5. Memberikan bantuan logistik untuk tanggap darurat bencana.

Upaya yang akan dilakukan selanjutnya untuk lebih meningkatkan capaian sasaran strategis antara lain :

1. Lebih meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan kesejahteraan sosial pada PMKS sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang sosial.

2. Memperluas cakupan sosialisasi kepada masyarakat dan kalangan dunia usaha untuk dapat meningkatkan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan pemberdayaan PSKS

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program penanganan bencana, program perlindungan dan jaminan sosial.

## 5.2 Analisis Capaian Sasaran Strategis Menurunkan tingkat pengangguran terbuka

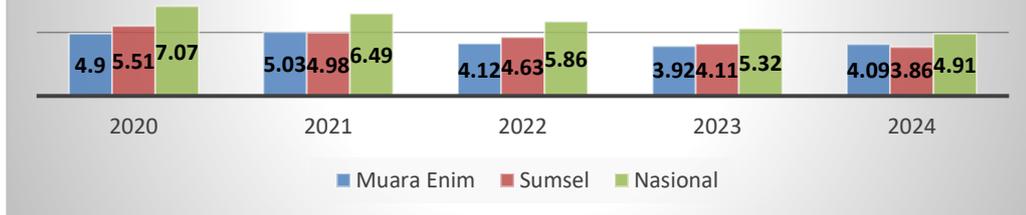
**Tabel 2.3.31**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Tingkat pengangguran terbuka	4.00	4.09	97.80	3.76	4.09	91.93
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			97.80			91.93

Capaian indikator sasaran tingkat pengangguran terbuka dari target 4.00 persen terealisasi sebesar 4.09 persen sehingga capaian kinerja tahun 2024 sebesar 97.80 persen berada dalam kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 capaian kinerja sebesar 91.93 persen.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Muara Enim lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Selatan sebesar 3.86 persen namun lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 4.91 persen. Perbandingan tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Nasional Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

**Tabel 2.3.32**  
**Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

Angkatan Kerja (Jiwa)			Pengangguran Terbuka (Jiwa)	
Bekerja	Menganggur	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
328.288	13.995	342.283	8.024	5.971

Faktor yang menghambat pencapaian target kinerja antara lain :

1. Keterbatasan kesempatan kerja yang diakibatkan masih kurangnya skill yang dimiliki penduduk usia kerja.
2. Pendidikan penduduk usia kerja belum memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh pihak pemberi kerja.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Muara Enim antara lain :

1. Pelatihan dan sosialisasi terhadap pelaku ekonomi kreatif.
2. Memberikan pelatihan kepada pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi.
3. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan.
4. Mengoptimalkan program penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).
5. Bekerjasama dengan Politeknik ASDP Palembang dalam peningkatan kapasitas peserta pelatihan di Dinas Ketenagakerjaan.
6. Bekerjasama dengan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN)/ Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk pelatihan

dan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Kabupaten Muara Enim ke luar negeri.

7. Melaksanakan sosialisasi bimbingan teknis perizinan dan pelayanan bagi Usaha Mikro di 5 Kecamatan.
8. Memproses persiapan pelaksanaan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas, produktifitas, dan daya saing koperasi dan UMK melalui pelatihan pemasaran produk koperasi, pelatihan manajemen koperasi, pelatihan teknis keterampilan menjahit, dan pelatihan kewirausahaan.

Upaya yang akan dilakukan agar lebih meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi.
2. Penjajakan Kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) D'Sakura Cendikia yang menangani peserta pelatihan untuk keberangkatan ke luar negeri (Jepang).
3. Melakukan pembinaan kepada Perusahaan untuk meminimalisir pemutusan hubungan kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi Masyarakat setempat.
4. Melakukan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi ke Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di sekolah-sekolah sebagai upaya penempatan tenaga kerja dari BKK.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, program perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja.

### 5.3 Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat

**Tabel 2.3.33**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Skor Pola Pangan Harapan	87.00	94.53	108	92.00	94.53	102.75
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			108			102.75

Capaian indikator sasaran skor pola pangan harapan tahun 2024 sebesar 94.53 dari target sebesar 87.00 dengan capaian kinerja sebesar 108 persen berada pada kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 maka capaian kinerjanya telah tercapai sebesar 102.75 persen. Skor pola pangan harapan tahun 2024 meningkat dibandingkan skor pola pangan harapan tahun 2023 sebesar 91,6. Adapun skor pola pangan harapan Kabupaten Muara Enim tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Muara Enim sudah cukup beragam akan tetapi untuk pangan sumber karbohidrat masih didominasi oleh padi-padian yaitu beras sehingga masih perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pemenuhan kebutuhan karbohidrat dari jenis pangan yang lain seperti umbi-umbian. Untuk konsumsi pangan sumber protein mengalami peningkatan pada sumber protein hewani dan pada konsumsi pangan sumber vitamin dan mineral kelompok sayur-sayuran memberikan kandungan gizi lebih besar dibandingkan kelompok pangan yang berasal dari buah-buahan sehingga diperlukan pula pemahaman kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan konsumsi buah-buahan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran skor pola pangan harapan antara lain :

1. Gerakan gemar makan buah dan sayur.

2. Sosialisasi menu beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA).
3. Meningkatkan populasi ternak dan pendapatan ekonomi kelompok tani.
4. Pemanfaatan pekarangan untuk komoditas hortikultura.
5. Meningkatkan ketersediaan pasokan benih padi.
6. Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/ LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/ KP2B, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/ LCP2B.
7. Memberikan bantuan pangan kepada daerah rawan pangan (berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA)) dan Daerah Lokus Stunting berdasarkan target intervensi KK Pra Sejahtera, mempunyai Balita dan Lansia, serta mempunyai Balita Stunting dengan penerima manfaat sebanyak 1050 KK untuk 21 desa di 22 kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim. Jenis bantuan yang diberikan terdiri dari beras 20 Kg, gula pasir 2 Kg, minyak goreng 2 liter, dan ikan sarden kaleng 3 kaleng melalui dana APBD sebesar Rp. 497.650.000,-.
8. Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS) sebanyak 20 kali, dengan target intervensi siswa Sekolah Dasar yang masuk dalam kategori prioritas 3 dan 4 pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) sebanyak 565 siswa.

Program yang mendukung pencapaian target sasaran kinerja skor pola pangan harapan antara lain program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota, program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, program peningkatan diversifikasi ketahanan pangan masyarakat, program penanganan kerawanan pangan, program pengawasan keamanan pangan.

#### 5.4 Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk

**Tabel 2.3.34**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Laju pertumbuhan penduduk	1,02	1,2	85	1,00	1,2	83,33
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			85			83,33

Realisasi indikator sasaran laju pertumbuhan penduduk tahun 2024 sebesar 1,2 persen dari target 1,02 persen dengan capaian kinerja sebesar 85 persen berada pada kategori baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 maka capaian kinerjanya sebesar 83,33 persen.

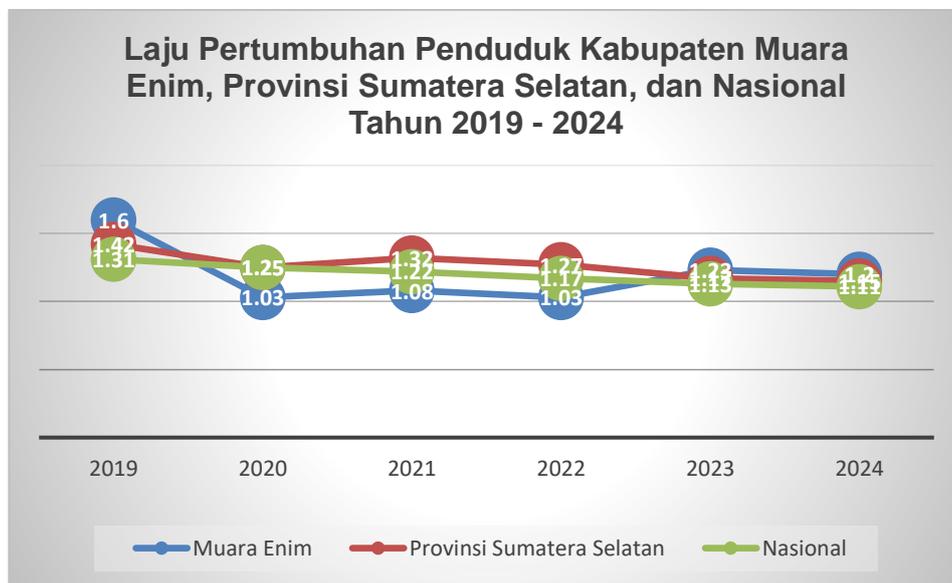
Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu daerah setiap tahunnya, diukur dalam persentase. Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor demografi seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi. Akan banyak masyarakat yang menganggur karena tidak mendapatkan pekerjaan dan kemudian melakukan tindakan kriminalitas. Jumlah penduduk yang tidak terkendali juga berpengaruh terhadap angka kemiskinan karena dengan semakin bertambahnya penduduk tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun penyediaan lapangan kerja maka akan terjadi penurunan tingkat kesejahteraan.

Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan penduduknya. Secara umum jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk ini diiringi dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif stabil meskipun ada sedikit fluktuasi setiap tahunnya.

**Tabel 2.3.35**  
**Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin**  
**Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 – 2024**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)	Rasio Jenis Kelamin
2019	636.815	1,60	102,97
2020	612.900	1,03	104,34
2021	617.846	1,08	104,21
2022	624.019	1,03	104,09
2023	633.779	1,23	104,11
2024	640.962	1,20	-

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2024 sebesar 1,20 persen, lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,15 persen dan laju pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,11 persen.

Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 berjumlah 640.962 jiwa, meningkat sebesar 7.183 jiwa dibandingkan tahun 2023 sejumlah 633.779 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Muara Enim masuk ke dalam kategori waspada yaitu sebesar 1,20 yang didominasi oleh usia produktif (umur pada rentang 15-59 tahun).



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Muara Enim

Piramida Penduduk Kabupaten Muara Enim termasuk ke dalam golongan Piramida Ekspansif yang berbentuk seperti kerucut, limas, atau piramida penduduk muda dengan ciri-ciri sebagian besar penduduk berusia muda, penduduk lanjut usia relatif sedikit, angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian, pertumbuhan penduduk sangat cepat dan membutuhkan banyak lapangan pekerjaan. Piramida ekspansif ini umumnya terbentuk di mayoritas wilayah lainnya. Dari piramida tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk Kabupaten Muara Enim memiliki banyak jumlah usia produktif yang nantinya akan mempengaruhi angka kelahiran yang menjadi indikator laju pertumbuhan penduduk. Salah satu upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dari indikator kelahiran yaitu dengan meningkatkan kepesertaan KB baru.

Beberapa Upaya yang telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk antara lain :

1. Sosialisasi Pembinaan Keluarga Berencana.
2. Pendataan dan Pelaporan Pelayanan KB setiap bulan di 57 Faskes.
3. Pelayanan KB di 57 Faskes dan memanfaatkan momentum tertentu untuk penyediaan pelayanan KB, seperti TMMD, hari kartini, HUT Kabupaten.
4. Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan ke beberapa sekolah di Kabupaten Muara Enim.
5. Penyediaan pelayanan kontrasepsi jangka panjang yang tidak hanya dititik beratkan kepada wanita, namun juga untuk pria.

Berikut upaya-upaya yang harus ditingkatkan dalam rangka pengendalian jumlah penduduk :

1. Meningkatkan pendataan dan sosialisasi ke sasaran akseptor KB terutama kalangan pasangan usia subur (PUS) dan peserta KB baru.
2. Meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan, seperti rumah sakit, puskesmas, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta, dan bidan desa khususnya dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan KB.
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelayanan KB di Kabupaten Muara Enim hingga di tingkat desa/kelurahan.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program pengendalian penduduk, program pembinaan keluarga berencana, program pemberdayaan dan peningkatan keluarga Sejahtera.

## 5.5 Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas layanan hunian masyarakat

**Tabel 2.3.36**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Meningkatkan Kualitas Layanan Hunian Masyarakat**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Persentase rumah layak huni	93.88	96.44	102,73	97.88	96.44	98.53
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			102.73			98.53

Realisasi indikator sasaran persentase rumah layak huni tahun 2024 sebesar 96,44 persen dengan capaian kinerja 102,73 persen berada pada kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 capaian kinerjanya sebesar 98,53 persen.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Rumah layak huni sangat penting bagi kesejahteraan keluarga.

Rumah yang layak huni akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga. Kondisi ini akan mempengaruhi peningkatan produktivitas rumah tangga. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya pendapatan secara berkelanjutan sehingga mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan melaksanakan Program Bedah Rumah dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1000 Unit di 40 lokasi yang tersebar di Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga akan melaksanakan Program Bedah Rumah bekerja sama dengan TNI dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-120 sebanyak 5 unit di Kecamatan Gunung Megang. Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani sampai saat ini sebesar 11.739 unit.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain :

1. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) baru direkrut belum berpengalaman dalam pendampingan kepada masyarakat.
2. Masyarakat bekerja pada pagi sampai siang hari, sehingga pengerjaan fisik rumah hanya dilakukan pada sore hari.
3. Masih adanya budaya pelaksanaan kegiatan mengikuti tradisi setempat yaitu berpedoman pada hari baik bulan baik.
4. Akses menuju penerima bantuan cukup sulit dicapai.
5. Penerima bantuan membangun rumah yang lebih besar dibanding nilai bantuan.
6. Terbatasnya ketersediaan tenaga tukang.

Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain :

1. Dilakukan pendampingan oleh Koordinator Fasilitator dan TFL yang lebih senior.
2. Mendorong agar TFL tetap berkomunikasi dengan kelompok penerima bantuan.
3. Secara berkala diadakan monitoring ke lokasi penerima bantuan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Muara Enim.
4. Selalu mendorong masyarakat dan ketua kelompok untuk berkomitmen menyelesaikan pengerjaan fisik rumah sesegera mungkin.

5. Melakukan pengiriman material dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.
6. Memberikan pengertian akan target yang harus diselesaikan sesuai dengan jumlah bantuan dan tambahan swadaya.
7. Mendorong kelompok agar bergotong royong dalam menyelesaikan target pembangunan.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program pengembangan perumahan, program kawasan permukiman, program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh, program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan Kawasan permukiman.

**6. Analisis Capaian Tujuan 6  
Meningkatnya peran serta dan kesetaraan masyarakat dalam pembangunan daerah**

**Tabel 2.3.37  
Analisis Pencapaian Tujuan 6  
Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Masyarakat  
Dalam Pembangunan Daerah**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.76	89.82*	100.07	89.93	89.82*	99.88
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74.52	69.66*	93.48	80.25	69.66*	87.21
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			96,77			93.55

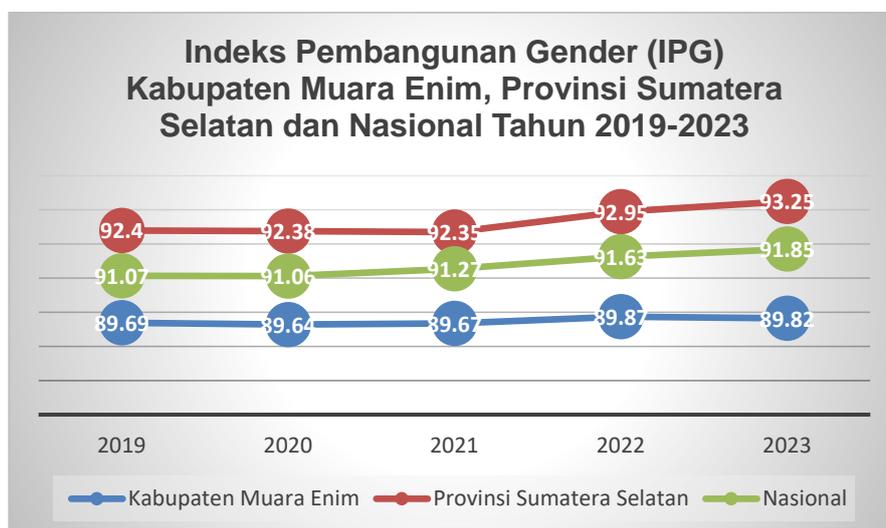
\*) Capaian tahun 2023

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2024 belum dirilis oleh BPS sehingga menggunakan capaian tahun sebelumnya. IPG terealisasi sebesar 89,82 atau capaian kinerja 100,07 persen berada pada kategori sangat baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 capaian kinerjanya sebesar 99,88 persen. Untuk IDG terealisasi sebesar 69,66 dengan capaian kinerja 93,48 persen. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 capaian kinerjanya sebesar 87,21 persen. Rata-rata capaian kinerja tujuan

meningkatnya peran serta dan kesetaraan masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2024 sebesar 96,77 persen.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan alat ukur yang menunjukkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Variabel pembentuk IPG sama dengan variabel pembentuk IPM tetapi yang dihitung adalah rasio antara IPM laki-laki dan IPM Perempuan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan ukuran yang menilai sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dalam kesempatan ekonomi dan politik serta partisipasi dalam pengambilan keputusan diberbagai bidang kehidupan.

IPG Kabupaten Muara Enim ditahun 2023 sebesar 89,82 masih berada dibawah IPG Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional.



Sumber : DPPP Kabupaten Muara Enim

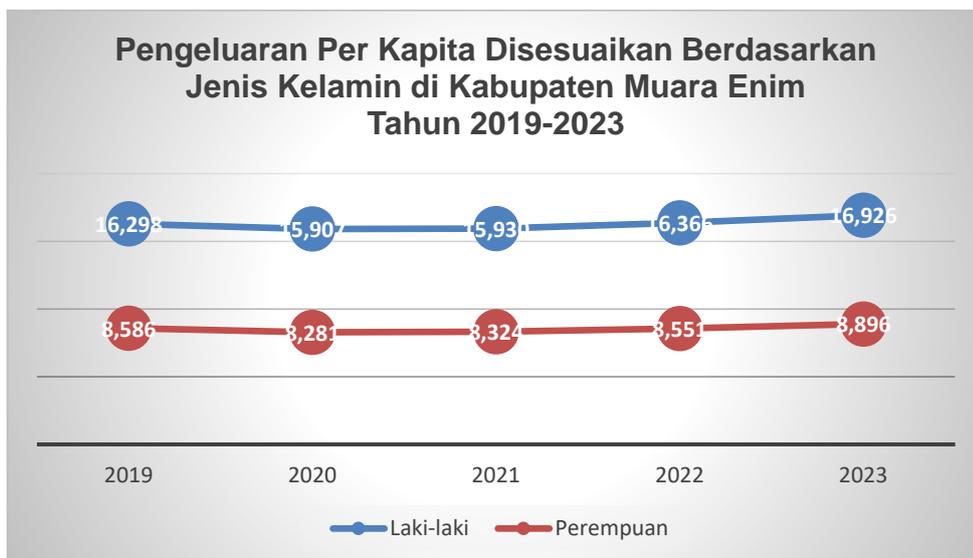
Komponen pembentuk IPG terdiri dari Umur Harapan Hidup mewakili dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi. Dari keempat komponen pembentuk IPG tersebut, pada tahun 2023 Umur Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah didominasi oleh perempuan namun pengeluaran per kapita dan rata-rata lama sekolah didominasi oleh laki-laki.

Tahun 2023 Rata-rata lama sekolah didominasi oleh laki-laki sebesar 8,65 tahun dibandingkan perempuan sebesar 7,57 tahun dapat dilihat pada gambar berikut :



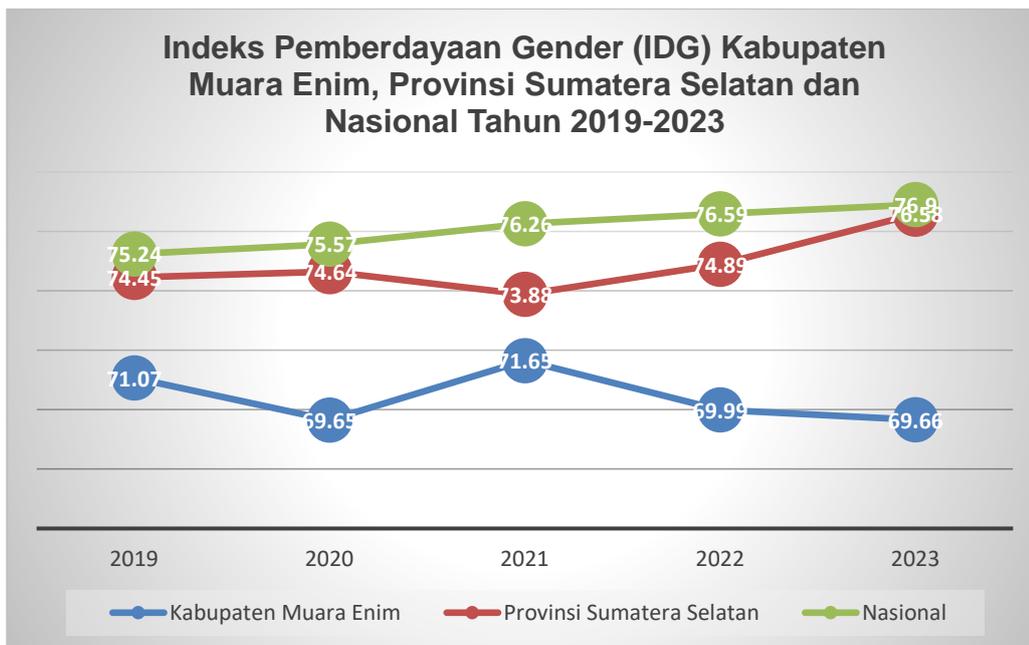
Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Untuk pengeluaran per kapita laki-laki tahun 2023 sebesar Rp.16.926 lebih tinggi dibandingkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar Rp.8.896 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Muara Enim menunjukkan fluktuatif. Capaian IDG Kabupaten Muara Enim berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional.



Sumber : DPPP Kabupaten Muara Enim

Pada tahun 2023, pencapaian IDG Kabupaten Muara Enim sebesar 69,99 menempati urutan ke 1 tertinggi di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan.



Sumber : DPPP Kabupaten Muara Enim

Pencapaian tujuan meningkatnya peran serta dan kesetaraan masyarakat dalam pembangunan daerah didukung oleh program dari dua sasaran strategis yaitu meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.

**6.1 Analisis Capaian Sasaran Strategis**  
**Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan**

**Tabel 2.3.38**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Persentase peningkatan IPG	0.09	0	NA	0.09	0	NA
Rata-rata capaian kinerja			NA			NA

Realisasi persentase peningkatan IPG tahun 2024 serta perbandingan dengan target akhir RPD 2024-2026 belum dapat diukur karena nilai IPG tahun 2024 belum dirilis oleh BPS.

Pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesempatan kerja tetapi tidak dapat dengan sendirinya mengurangi ketimpangan gender. Ketimpangan gender dalam bidang ketenagakerjaan masih merupakan isu dan permasalahan yang sering terjadi. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan waktu di rumah, perbedaan tingkat pendidikan dan keterampilan, pembatasan sosial budaya, segregasi sektoral dan pekerjaan, migrasi laki-laki, dan akses ke input produktif, semuanya mengarah pada ketimpangan gender dalam partisipasi pekerjaan yang layak. Berdasarkan jenis kelamin di tahun 2023 jumlah penduduk perempuan yang bekerja tahun 2023 di Kabupaten Muara Enim sebanyak 128.989 orang, sementara penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 196.771 orang. Jika dilihat berdasarkan status formal diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja pada sektor formal di tahun 2023 sebanyak 47.777 orang masih didominasi penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 43.388 orang dan perempuan sebanyak 4.389 orang.

Untuk meningkatkan capaian IPG diperlukan kebijakan yang responsif gender diperlukan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami dan mendukung usaha-usaha ekonomi yang dilakukan perempuan di daerah, misalnya terkait dengan tempat usaha, pendampingan, akses informasi, dan pemasaran guna meningkatkan kualitas hidup mereka.

Langkah-langkah keberpihakan yang nyata pada perempuan diperlukan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Identifikasi upaya-upaya praktis yang inovatif untuk membantu perempuan dalam aspek ekonomi dan ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan menyediakan akses terhadap informasi, tempat dan lembaga keuangan bagi perempuan khususnya yang bergerak di sektor dominan seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan serta sektor informal. Peningkatan partisipasi perempuan dalam keanggotaan koperasi, dan meningkatkan indeks paritas gender dalam keanggotaan koperasi, peningkatan akses UMKM terhadap kredit permodalan usaha dan akses pasar produk/ jasa khususnya bagi pengusaha perempuan, peningkatan kemampuan manajemen usaha dagang kecil dan menengah yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan.

Sedangkan pada bidang kesehatan didorong melalui penyediaan layanan kesehatan, Keluarga Berencana (KB), kesehatan reproduksi, peningkatan gizi, serta perluasan cakupan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi kelompok perempuan secara menyeluruh. Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program pengelolaan sistem data gender dan anak.

## 6.2 Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan

**Tabel 2.3.39**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Persentase peningkatan IDG	2.87	0	NA	2.87	0	NA
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			NA			NA

Realisasi persentase peningkatan IDG tahun 2024 serta perbandingan dengan target akhir RPD 2024-2026 belum dapat diukur karena nilai IDG tahun 2024 belum dirilis oleh BPS. Indikator pembentuk IDG antara lain keterlibatan perempuan di

parlemen, perempuan sebagai tenaga professional, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan.

Secara umum, upaya pemberdayaan perempuan harus dilakukan secara komprehensif (*hardskill* dan *softskill* yang mendorong kepemimpinan perempuan, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, keberanian berpendapat). Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kesetaraan gender pada bidang pendidikan dilakukan melalui jalur jalur formal, khususnya untuk perempuan-perempuan pra-sejahtera, sementara untuk pendidikan non-formal mencakup pendidikan baca tulis, *life skill*, berpikir kritis, managerial, dan kepemimpinan perempuan.

Kebijakan yang dapat meringankan beban ganda perempuan dan mendukung ekosistem tenaga kerja perempuan perlu terus diupayakan, diantaranya dengan kebijakan *maternity*, *paternity*, *child care*, dan insentif ketenagakerjaan lainnya bagi tenaga kerja perempuan. Penyediaan layanan pengasuhan anak (*child care*) yang terjangkau dan berkualitas, dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan partisipasi dan kontribusi perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan, misalnya dengan layanan pengasuhan anak berbasis komunitas.

Layanan *child care* yang terjangkau dan berkualitas akan dapat membantu mengurangi pekerjaan tidak berbayar (pengasuhan) yang dilakukan perempuan, sehingga memberikan perempuan peluang dan kesempatan untuk masuk dan bertahan di pasar tenaga kerja. Selain itu perlu didukung pula oleh penyediaan sarana parasarana dan ruang publik yang mendukung dan aman bagi perempuan.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

**7. Analisis Capaian Tujuan 7  
Meningkatnya pemenuhan hak anak**

**Tabel 2.3.40  
Analisis Pencapaian Tujuan 7  
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Predikat Kabupaten/ Kota layak anak	Nindya	Nindya*	100	Utama	Nindya	85
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			100			85

\*) Penilaian mandiri

Berdasarkan hasil evaluasi mandiri yang dilakukan tahun 2024, realisasi indikator sasaran predikat Kabupaten/ Kota layak anak Kabupaten Muara Enim yaitu Nindya sehingga capaian kerjanya sebesar 100 persen berada pada kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 maka capaian kerjanya telah mencapai 85 persen.

Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk memenuhi hak-hak anak. Sistem ini melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan lembaga masyarakat. Klaster Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah pembagian hak-hak anak menjadi lima klaster yaitu :

1. Hak sipil dan kebebasan.
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan.
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
5. Perlindungan khusus.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Kabupaten Muara Enim dalam memastikan pemenuhan hak anak dalam klaster-klaster tersebut antara lain :

1. Memastikan anak tercatat dan memiliki akta kelahiran. Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, persentase anak yang memiliki akta kelahiran untuk usia 0-18 tahun ditahun 2022

sebesar 95,26 persen naik menjadi 95,69 persen di semester I tahun 2023. Kabupaten Muara Enim telah melakukan berbagai inovasi pelayanan percepatan pembuatan akta kelahiran anak seperti “Belah Dadaku (Begitu Lahir Dapat Dokumen Kependudukan)”.

2. Memastikan anak mendapat akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan. Fasilitas informasi layak anak harus disediakan dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mendukung pemenuhan hak anak untuk mendapatkan/mengakses informasi yang sesuai dengan umur dan kebutuhan anak. Fasilitas informasi layak anak yang disediakan Pemerintah Kabupaten Muara Enim antara lain perpustakaan, rumah pintar/ rumah baca, pojok baca, taman digital, taman baca kemala, Suara Muara Enim radio, Tanjung Enim radio, Layanan CAROLINE, SAPA 129 (Sahabat Perempuan dan Anak 129).
3. Meningkatkan cakupan puskesmas ramah anak. Cakupan puskesmas ramah anak meningkat sejak tahun 2019 dimana capaiannya sebesar 18,20 persen, naik ditahun berikutnya menjadi 91 persen dan hingga tahun 2021-2022 sudah mencapai 100 persen.
4. Memastikan anak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Sekolah ramah anak di Kabupaten Muara Enim paling banyak adalah Sekolah Dasar yaitu sebanyak 359 unit dari total SD yang ada di Kabupaten Muara Enim sebanyak 409 unit. Kemudian disusul dengan PAUD ramah anak sebanyak 131 unit dari total 348 unit. Adapun Sekolah Menengah Pertama yang ramah anak sebanyak 145 unit dari total SMP di Kabupaten Muara Enim sebanyak 150 unit dan SMA ramah anak sebanyak 2 unit dari total 84 unit pada tahun 2022.
5. Sementara untuk sekolah berstandar agama Islam ramah anak meningkat di tahun 2021 sebanyak 31 unit MI yang sudah menerapkan sekolah ramah anak, naik menjadi 53 unit di tahun 2022. Madrasah Tsanawiyah (MTs) juga mengalami peningkatan dari 38 unit di tahun 2021 naik menjadi 41 unit di tahun 2022. Sedangkan Madrasah Aliyah (MA) ramah anak di tahun 2022 jumlahnya sebanyak 33 unit.

Pencapaian tujuan pemenuhan hak anak didukung oleh program dari sasaran strategis meningkatkan desa ramah perempuan dan peduli anak.

## 7.1 Analisis Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan desa ramah perempuan dan peduli anak

**Tabel 2.3.41**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Meningkatkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak**

Indikator Sasaran	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	RPD 2024-2026		Capaian Kinerja 2024 (%)
	Target	Realisasi		Target 2026	Realisasi 2024	
Persentase desa ramah perempuan dan peduli anak	6.10	4.07	66.72	12.20	4.07	33.36
<b>Rata – rata capaian kinerja</b>			66.72			33.36

Realisasi indikator sasaran persentase Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) tahun 2024 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yaitu terdapat 10 desa dari 246 desa yang telah mengimplementasikan DRPPA sehingga terealisasi sebesar 4,07 persen atau capaian kinerjanya sebesar 66,72 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026 maka capaian kinerjanya sebesar 33,36 persen.

Pembentukan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) ini diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bekerja sama dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak. Terdapat 10 indikator pada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yaitu :

1. Adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa.
2. Tersedianya data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak.
3. Tersedianya peraturan desa tentang DRPPA.
4. Tersedia pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan asset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa.
5. Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga kemasyarakatan desa, dan Lembaga adat desa.
6. Persentase perempuan wirausaha di desa utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana dan penyintas kekerasan.
7. Semua anak di desa mendapatkan pengasuhan berbasis anak.

8. Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak dan korban tindak pidana perdagangan orang.
9. Tidak ada pekerja anak.
10. Tidak ada perkawinan anak.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah melakukan pendampingan dan pembinaan ke desa untuk mengimplementasikan DRPPA, selain itu dilakukan kegiatan lintas sektor terkait dengan 10 indikator tersebut.

Misalnya berdasarkan data dari pengadilan agama jumlah perkawinan usia anak di Kabupaten Muara Enim tahun 2022 sebanyak 220 jiwa dengan anak perempuan yang paling banyak 141 jiwa dan laki-laki sebanyak 79 jiwa. Beberapa kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim antara lain sosialisasi pencegahan perceraian dan pernikahan dini, penguatan Program Minimal Belajar 12 Tahun untuk Anak Perempuan dapat mendukung anak perempuan untuk menyelesaikan sekolah sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Data Susenas menunjukkan bahwa baik untuk anak perempuan maupun laki-laki yang menikah sebelum berumur 18 tahun, banyak yang jenjang pendidikan tertingginya adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Memberikan bantuan modal usaha kepada keluarga rentan, kegiatan pusat konseling remaja serta kegiatan kepemudaan.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini antara lain program perlindungan perempuan, program peningkatan kualitas keluarga, program pemenuhan hak anak, program perlindungan khusus anak.

## **Daftar Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 :**

1. Anugerah Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan Kategori A (Hijau) atau Opini Kualitas Tertinggi dari Ombudsman Republik Indonesia.
2. Penghargaan sebagai “Inisiator Pengukuran Toleransi Tingkat Kabupaten” pada Peluncuran Indeks Kota Toleran 2023.
3. Penghargaan Piala Adipura Kategori Kota Kecil Terbersih Tahun 2023 ke-15 kali berturut-turut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK).
4. Penghargaan Top Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 2024 oleh Majalah Top Business.
5. Penghargaan Kabupaten Terbaik Pertama Perencanaan dan Pencapaian Pembangunan Daerah (PPD) dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Tahun 2024 se-Sumatera Selatan pada Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.
6. Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
7. Sertifikat Ambung Ujan Mas sebagai Kekayaan Intelektual Komunal pada Kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) Tahun 2024 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Sertifikat Eliminasi Malaria dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Puncak Peringatan Hari Malaria se-dunia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
9. Penghargaan atas Dukungan dan Partisipasi dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Muara Enim pada Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2024.
10. Penghargaan Genre Award Tahun 2024 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

11. Penghargaan atas Apresiasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim membantu tugas-tugas Kepolisian dari Polda Sumatera Selatan pada Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-78 Tahun 2024.
12. Penghargaan sebagai Daerah yang memberikan Dukungan Penyaluran Pembiayaan 100 % (seratus persen) yang bersumber dari APBD untuk KPUD, Bawaslu, TNI dan Polri dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
13. Penghargaan Indeks Pembangunan Keluarga atau Bangga Award Tahun 2024 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan.
14. Juara 1 Total Capaian Pelayanan KB Tingkat Provinsi Sumatera Selatan kategori target total lebih dari 1300 Akseptor dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.
15. Peringkat 1 BKB Terbaik (BKB HI Tulip) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan.
16. Penghargaan “Universal Health Coverage Award Tahun 2024” untuk kategori utama atau tertinggi atas keberhasilan cakupan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN - KIS) dari Wakil Presiden Republik Indonesia.
17. Penghargaan atas Komitmen dan Upaya Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendukung Pengembangan named dan nakes melalui alokasi APBD dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
18. Penghargaan atas Keberhasilan menerapkan Sistem Merit dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Tahun 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
19. Penghargaan atas keberhasilan penanggulangan AIDS, TBC dan Malaria di Kabupaten Muara Enim dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes).
20. Penghargaan Terbaik Kinerja Penanganan Stunting Tahun 2024 dari Provinsi Sumatera Selatan.
21. Penghargaan Predikat BB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada ajang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Award Tahun 2024.

22. Penghargaan Predikat Baik atas Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dengan Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebesar 2,92 dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI).
23. Sertifikat Tanda Daftar Varietas Tanaman atas keberhasilan Muara Enim mengembangkan dua varietas padi organik unggulan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
24. Penghargaan Impelementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes).

### **BAB III**

## **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

### **1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

Penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dilakukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

### **2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Unit Organisasi sebagai berikut :

- a) Direktorat Jenderal Pengelolaan Air Irigasi Pertanian
- b) Direktorat Jenderal Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan
- c) Direktorat Jenderal Pupuk dan Pestisida

### **3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

#### **3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Muara Enim**

Tugas Pembantuan Pusat dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan :

- a) Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25/KPTS/DIS.PTPH/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
- b) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Nomor 120/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024
- c) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Tahun 2024 Nomor : SP DIPA - 018.08.4. 119137/2024 Tanggal 24 November 2023

##### **3.1.1 Target Kinerja**

Program dan kegiatan yang diterima pelaksanaannya dalam rangka pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2024, Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim, adalah “**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**”.

### 3.1.2 Realisasi

**Tabel 3.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Muara Enim**

No.	K/LNPK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sub Urusan Pertanian								
1.	Kementerian Pertanian Republik Indonesia, melalui Unit Organisasi adalah sebagai berikut : a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Air Irigasi Pertanian b. Direktorat Jenderal Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan c. Direktorat Jenderal Pupuk dan Pestisida	1. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25/KPTS/DIS.PTPH/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan  2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Nomor 120/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024	<b>A. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>  <b>1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian</b>  a. Irigasi Perpipaan	Kec Muara Enim, Ujan Mas, Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, Semende Darat Ulu, Tanjung Agung	Dinas tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim	19,359,780,000.00	18,937,222,850.00	97.82%			
						5,760,000,000.00	5,537,096,800.00	96.13%			
						1,200,000,000.00	1,157,466,800.00	96.46%			

	3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Tahun 2024 Nomor : SP DIPA - 018.08.4. 119137/2024 Tanggal 24 November 2023	b. Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat	Kecamatan Muara Enim, Ujan Mas, Belimbing, Empat Petulai Dangku, Muara Belida, Semende Darat Laut, Tanjung Agung		4,560,000,000.00	4,379,630,000.00	96.04%			
		<b>2. Perlindungan dan Penyediaan Lahan</b>			<b>13,542,500,000.00</b>	<b>13,358,821,050.00</b>	<b>98.64%</b>			
		a. Optimasi Lahan	Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Empat Petulai Dangku		13,542,500,000.00	13,358,821,050.00	98.64%			
		<b>3. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian</b>			<b>10,000,000.00</b>	<b>4,750,000.00</b>	<b>47.50%</b>			
		a. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup			10,000,000.00	4,750,000.00	47.50%			

			Alat dan Mesin Pertanian							
			<b>4. Program Dukungan Manajemen</b>			<b>47,280,000.00</b>	<b>36,555,000.00</b>	<b>77.32%</b>		
			a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			47,280,000.00	36,555,000.00	77.32%		
			Keluaran (Output) : - Pengembangan Irigasi Perpipaan 12 Unit - Pengembangan Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat 38 Unit - Kontruksi Optimasi Lahan Seluas 2.400 Ha - Pengolahan Lahan Optimasi Seluas 1.904 Ha							

### 3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim

#### 3.2.1 Target Kinerja

Target program yang ditetapkan berdasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 410/KPTS/BPKAD/2024 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

#### 3.2.2 Realisasi

Pada Tahun 2024, Dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dialokasikan untuk pelaksanaan program-program strategis prioritas provinsi dan prioritas kabupaten. Adapun program-program tersebut yaitu:

1. Pelaksanaan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp20.000.000.000,00;
2. Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp30.000.000.000,00;
3. Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.999.799.000,00.

Adapun secara terperinci dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2 Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Program/ Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Nilai Kontrak	Realisasi	
						Keuangan	Fisik
1.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	a. Kecamatan Muara Enim b. Kecamatan Ujan Mas c. Kecamatan Rambang Niru d. Kecamatan Gelumbang e. Kecamatan Sungai Rotan f. Kecamatan Belide Darat	20.000.000.000,00	19.573.137.600,00	19.573.137.600,00	100%

			g. Kecamatan Lubai h. Kecamatan Lubai Ulu i. Kecamatan Tanjung Agung j. Kecamatan Semende Darat Laut k. Kecamatan Semende Darat Tengah l. Kecamatan Lawang Kidul m. Kecamatan Panang Enim				
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Kecamatan Empat Petulai Dangku	30.000.000.000,00	28.454.833.000,00	28.454.833.000,00	100%
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kecamatan Muara Enim	3.999.799.000,00	3.931.000.000,00	3.931.000.000,00	100%
<b>TOTAL</b>				<b>53.999.799.000,00</b>	<b>51.958.970.600,00</b>	<b>51.958.970.600,00</b>	<b>100%</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024

Sumber dana berasal dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersifat *reimburse* dengan 3 (tiga) tahap penyaluran, yaitu :

1. Tahap I sebesar 30% dari nilai kontrak.
2. Tahap II sebesar 40% dari nilai kontrak, bilamana penggunaan tahap I sudah mencapai 75%.
3. Tahap III sebesar 30% dari nilai kontrak, bilamana penggunaan tahap II sudah mencapai 75%.

### **3.3 Permasalahan dan Kendala**

Permasalahan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam pelaksanaan tugas pembantuan dari aspek realisasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dimana Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mengajukan permohonan pencairan tahap I, II dan III pada T.A. 2024 kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, namun realisasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada T.A. 2024 hanya tahap I sebesar 30% dari nilai kontrak sebesar Rp15.587.691.180,00 yang diterima pada RKUD Kab. Muara Enim pada tanggal 20 November 2024.

Rincian realisasi Tahap I dari Pemerintah Provinsi Sumsel yaitu :

1. Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebanyak 16 paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp19.573.137.600,00 terealisasi sebesar Rp5.871.941.280,00.
2. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 3 paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp32.385.833.000,00 terealisasi sebesar Rp9.715.749.900,00.

### **3.4 Saran dan Tindak Lanjut**

Penyelesaian dari kendala aspek realisasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut ditindak lanjuti dimana pelaksanaan atas pekerjaan tersebut telah selesai 100% dan pembayaran kepada pihak ketiga telah terealisasi sebesar 100% dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

**BAB IV**  
**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**4.1. URUSAN PENDIDIKAN**

Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Muara Enim dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim sebagai implementasi dari mewujudkan wajib belajar pendidikan secara maksimal, agar jangan sampai ada anak usia sekolah yang tidak sekolah legal baik formal maupun non formal dari PAUD (TK, RA, dsb), SD/MI, SMP/MTS, paket A, paket B, ataupun, sekolah luar biasa, dan atau kalau ada anak usia sekolah yang sudah sekolah tapi rentan / berpotensi putus sekolah karena kemiskinan dan belum mendapat KIP, PKH, dsb, kurang keterjangkauan jarak transportasi dengan sekolah, kurang adanya fasilitas sarana prasarana pendidikan, tenaga pendidik kependidikan, tenaga penunjang, tenaga lab, dsb maka Pemerintah Daerah wajib mendata, mendorong dan memfasilitasi, agar anak usia sekolah mendapat pendidikan untuk kehidupan yang layak sesuai amanat UUD 1945.

Stimulasi bisa berupa apa saja misal penyediaan sarana transportasi sekolah, sekolah dengan sarana prasarana, serta tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai, bantuan sosial hibah kepada siswa kurang mampu, menyediakan pendidikan gratis, buku gratis, seragam, tas hingga sepatu gratis, sarapan gratis jika anggaran ada, mampu dan memungkinkan.

**4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang urusan pendidikan daerah Kabupaten Muara Enim terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia dini;
- b. Pendidikan Dasar dan;
- c. Pendidikan Kesetaraan.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
1	2	3	4
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Warga Negara Usia 4 s/d 6 Tahun	a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/Atau Jasa;
2	Pendidikan Dasar	Warga Negara Usia 7 s/d 15 Tahun	b. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan

3	Pendidikan Kesetaraan	Warga Negara Usia 7 s/d 18 Tahun	c. Petunjuk Teknis Atau Tata Cara Pemenuhan Standar
---	-----------------------	----------------------------------	---

#### 4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

##### A. Pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilakukan dengan cara :

- a. Menghitung jumlah anak usia 4 sampai 6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. Menghitung jumlah anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD; dan
- c. Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud huruf b di bagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- d. Dalam hal peserta didik mengikuti PAUD pada kabupaten/kota lain, peserta didik tersebut telah dihitung memenuhi SPM Pendidikan.

##### B. Pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Dasar dilakukan dengan cara :

- a. Menghitung jumlah anak usia 7 sampai 15 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. Menghitung jumlah anak usia 7 sampai dengan 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Dasar ; dan
- c. Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud huruf b di bagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- d. Dalam hal peserta didik mengikuti Pendidikan Dasar pada kabupaten/kota lain, peserta didik tersebut telah dihitung memenuhi SPM Pendidikan.

##### C. Pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan cara :

- a. Menghitung jumlah anak usia 7 sampai 18 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. Menghitung jumlah anak usia 7 sampai dengan 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan; dan

- c. Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud huruf b di bagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- d. Dalam hal peserta didik mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada kabupaten/kota lain, peserta didik tersebut telah dihitung memenuhi SPM Pendidikan.

Sebagai realisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada tahun 2024 jumlah warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS) sebanyak 93.320 jiwa dengan capaian sebesar 100%. Jumlah warga negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan sebanyak 2.733 jiwa dengan capaian sebesar 100%. Sedangkan jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD sebanyak 12.324 jiwa dengan capai sebesar 100%.

#### 4.1.3 Realisasi

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

PENCAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2024

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		Jumlah penduduk usia sekolah	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Capaian = (4):(3) x100%	Jumlah penduduk usia sekolah	Target Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Capaian = (7):(6) x100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1. PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	104.092	96.047	92,27 %	109.979	93.320	84,85 %
2. PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	136.887	577	0,42 %	137.280	2.733	1,99 %
3. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	23.322	10462	44,85 %	23.166	12.324	53,19 %

Untuk capaian SPM Pendidikan Tahun 2024 telah mendapat capaian 95,63%  
(TUNTAS PARIPURNA).

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran kegiatan yang mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Muara Enim tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Nama Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 244.722.017.236	Rp 232.004.144.505	94,80
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 146.974.969.162	Rp 144.535.635.098	98,34
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 74.486.800.113	Rp 68.247.241.844	91,62
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 18.390.487.241	Rp 16.524.587.170	89,85
	Pengelolaan Pendidikan Non Formal /Kesetaraan	Rp 4.869.760.720	Rp 2.696.680.393	55,38
2.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp 18.376.609.815	Rp 16.820.665.557	91,53
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Rp 18.376.609.815	Rp 16.820.665.557	91,53

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Dalam melaksanakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan dengan dukungan personil sebagai berikut :

Tabel Data Dukungan Personil

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

KELOMPOK PEGAWAI	JENIS PEGAWAI	JENJANG TEMPAT TUGAS				JUMLAH
		Dinas	SD	SMP	TK	
PNS	Guru	-	2352	813	29	3194
	Pengawas	52	-	-	-	52
	Penjaga Sekolah	-	38	1	-	39
	Tata Usaha	-	2	40	1	43
NON PNS	Guru	-	1783	1130	639	3552
	Penjaga Sekolah	-	102	54	6	162
	Tata Usaha	-	574	364	44	982

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
2. Kesulitan mendapatkan data pendidikan pada sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama.
3. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana penunjang guna pemenuhan SPM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4. Adanya kesulitan dalam pengelompokan anggaran SPM dikarenakan nama Program dan Kegiatan pada website SPM milik Kementerian Dalam Negeri tidak sama dengan nama program dan kegiatan pada aplikasi penganggaran Pemerintah Daerah yaitu Website SIPD.
5. Belum meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, belum gencarnya sosialisasi yang dilakukan, sedangkan yang menjadi faktor penghambat antara lain : keterbatasan pendanaan, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pendidik terkait dengan pendidikan khususnya anak usia dini dan Pendidikan Non Formal, dan rendahnya partisipasi masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Kesetaraan terutama yang di perdesaan.

Solusi yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim terkait permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan SDM yang tersedia saat ini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
2. Berupaya segera berkoordinasi dengan Kementerian Agama guna mendapatkan data pendidikan yang dibutuhkan tepat waktu.
3. Akan memperbaiki bahkan menambah sarana dan prasarana penunjang guna pemenuhan SPM tersebut.
4. Mengelompokkan nama-nama program dan kegiatan yang ada kesamaannya antara nama-nama program dan kegiatan di website

SPM Kementerian Dalam Negeri dengan nama-nama program dan kegiatan yang ada di Website SIPD

## **4.2 URUSAN KESEHATAN**

### **4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar kesehatan daerah Kabupaten Muara Enim terdiri atas adalah jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh pemerintah.

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang urusan kesehatan yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal nya ada 12 jenis Pelayanan yaitu :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar
4. Pelayanan kesehatan anak balita mendapatkan pelayanan sesuai standar
5. Pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
6. Pelayanan kesehatan pada usia Produktif usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 Tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
8. Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
10. Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11. Pelayanan kesehatan orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
12. Pelayanan kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan pemeriksaan sesuai standar

#### 4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Target dan sasaran SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024

NO	INDIKATOR LAYANAN SPM	Sasaran 2024	Target (%)
1	2	3	4
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	10.900	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	10.212	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	10.211	100
4	Pelayanan kesehatan anak balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	500.469	100
5	Pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	24.490	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	410.948	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	50.622	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	139.990	100
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	40.048	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1.280	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	11.998	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar	14.184	100

### 4.2.3 Realisasi

Hasil Capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024  
Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim

INDIKATOR SPM		Total Capaian 2024	
		% Cakupan	% Realisasi Anggaran
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	92.81	87.18
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	92.98	85.56
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	93.14	76.30
4	Pelayanan kesehatan anak balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	90.42	81.23
5	Pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	98.26	78.63
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95.84	70.05
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95.51	83.05
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	97.54	99.32
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	97.36	90.81
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	86.17	84.89
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	92.59	83.47
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar	98.98	89.89

#### 4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari dana APBD dan APBN Tahun Anggaran 2024.

#### Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Muara Enim 2024

NO	INDIKATOR LAYANAN SPM	Total Anggaran SPM (Rp)
1	2	3
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.506.385.902,00
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	77.700.000,00
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	323.625.600,00
4	Pelayanan kesehatan anak balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	271.459.356,00
5	Pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	81.601.200,00
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1.843.236.730,00
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	523.660.400,00
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1.192.345.120,00
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	899.007.220,00
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	67.575.000,00
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	408.751.300,00
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar	275.903.400,00
Total		7.471.251.228,00

## 4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal.

REKAPITULASI TENAGA KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KAB. MUARA ENIM TAHUN 2024

No.	Nama Fasyankes	dr. Spesialis					Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Terapis Gigi dan Mulut	Nutrisi	Pranata Laboratorium Kesehatan	Tenaga Sanitasi Lingkungan	Apoteker	Asisten Apoteker	Rekam Medis	Radiografer	Fisioterapi	Psikolog	Kesehatan Masyarakat (S1, S2)	Admin	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Epidemiolog Kesehatan	Entomolog Kesehatan	Jumlah
		dr. Sp. A	dr. Sp. PD	dr. Sp. B	dr. Sp. OG	dr. Sp. KGA																				
1	Puskesmas Pajar Bulan	0	0	0	0	0	2	3	27	39	1	1	3	2	1	3	0	0	0	0	1	2	5	0	0	87
2	Puskesmas Tanjung Raya	0	0	0	0	0	2	1	29	24	1	1	3	2	0	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	66
3	Puskesmas Pulau Pangung	0	0	0	0	0	1	0	21	27	2	2	2	2	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	61
4	Puskesmas Tanjung Agung	0	0	0	0	0	3	1	35	73	1	5	4	3	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	132
5	Puskesmas Tanjung Enim	0	0	0	0	0	4	1	36	43	2	7	5	2	1	2	1	0	0	0	2	1	1	0	0	106
6	Puskesmas Muara Enim	0	0	0	0	0	3	1	31	49	0	2	0	1	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	92
7	Puskesmas Ujan Mas	0	0	0	0	0	1	1	4	31	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
8	Puskesmas Gunung Megang	0	0	0	0	0	4	0	15	32	0	0	5	1	0	1	1	0	0	0	0	1	2	0	0	60
9	Puskesmas Sumaja Makmur	0	0	0	0	0	4	1	11	24	1	3	4	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	48
10	Puskesmas Benakat	0	0	0	0	0	0	1	14	23	2	1	4	2	0	1	1	0	0	0	2	2	1	0	0	52
11	Puskesmas Teluk Lubuk	0	0	0	0	0	2	1	14	41	0	1	1	1	1	3	1	0	0	0	1	1	1	0	0	70
12	Puskesmas Tebat Agung	0	0	0	0	0	3	1	22	41	3	1	6	2	0	3	1	0	0	0	0	1	2	0	0	84
13	Puskesmas Muara Emburung	0	0	0	0	0	1	1	14	41	1	2	7	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	59
14	Puskesmas Sugih Waras	0	0	0	0	0	3	1	16	44	1	0	4	2	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	72
15	Puskesmas Beringin	0	0	0	0	0	3	1	10	47	1	1	4	3	1	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	72
16	Puskesmas Sumber Mulia	0	0	0	0	0	3	2	15	35	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	63
17	Puskesmas Lembak	0	0	0	0	0	3	1	16	33	2	1	4	1	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	67
18	Puskesmas Gelumbang	0	0	0	0	0	2	2	37	97	1	2	6	2	1	1	0	0	0	0	1	7	4	1	0	162
19	Puskesmas Sukarami	0	0	0	0	0	2	1	18	44	4	2	4	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	80
20	Puskesmas Kelekar	0	0	0	0	0	4	2	15	42	3	2	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	71
21	Puskesmas Muara Belida	0	0	0	0	0	1	1	15	41	1	2	4	0	0	3	0	0	0	0	3	2	2	0	0	73
22	Puskesmas Belida Darat	0	0	0	0	0	1	1	26	52	1	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	88
23	RSUD Semende Darat laut	1	0	1	1	0	5	2	37	22	2	1	4	2	1	5	0	2	2	0	2	1	1	0	0	87
24	RSUD Lubal Ulu	1	1	0	1	1	8	1	48	45	3	2	6	3	2	5	1	5	1	1	1	1	0	0	0	134
25	RSUD Gelumbang	1	1	1	2	0	7	4	50	34	3	2	6	3	1	4	2	4	3	0	8	1	1	0	0	133
		3	2	2	4	1	72	32	576	1024	37	44	94	40	20	46	13	11	6	1	34	34	27	1	0	2057

## 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

### Permasalahan

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 92.81% belum mencapai target yang ditetapkan karena kurangnya pengetahuan ibu tentang pemeriksaan kehamilan, belum semua sasaran terdata, capaian pelayanan di fasilitas swasta tidak dilaporkan, faktor geografis yang sulit, dan sasaran yang berpindah tempat.
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar capaian di tahun 2024 sebesar 92.98%, capaian ini belum sesuai dengan target dikarenakan masih ada persalinan dirumah, ibu bersalin

di fasilitas kesehatan lain/swasta tidak terdata/terlaporkan, dan sasaran yang berpindah tempat

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar belum mencapai target sebesar 93.14 karena tidak terlapor/terdata bayi yang lahir di pelayanan kesehatan swasta dan ditolong non nakes.
4. Pelayanan kesehatan anak balita mendapatkan pelayanan sesuai standar belum mencapai target sebesar 90.42% karena masih ada balita yang tidak memantau pertumbuhan dan perkembangannya ke Posyandu / Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar belum mencapai target yaitu sebesar 98.26% karena ada siswa yang tidak hadir saat skrining dan siswa yang putus sekolah/pindah.
6. Capaian Pelayanan kesehatan pada usia produktif usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar masih dibawah target yaitu 95.84 % hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat usia >15 tahun tentang posbindu PTM dalam pelaksanaan deteksi dini faktor resiko PTM, serta ketersediaan posbindu kit di posyandu baru dipenuhi pada akhir tahun 2024.
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar belum mencapai target sebesar 96.51 dikarenakan kurangnya partisipasi usia lanjut melakukan pelayanan kesehatan di posyandu.
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar capaian di tahun 2024 sebesar 97.54% capaian ini masih jauh dibawah target dikarenakan kurangnya tingkat kepatuhan penderita Hipertensi untuk kontrol dan minum obat setiap hari.
9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar belum mencapai target yaitu sebesar 97.36% hal ini dikarenakan kurang maksimalnya pelaksanaan posyandu PTM di masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan deteksi dini faktor resiko PTM.

10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 86.17 hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang lebih memilih melakukan pengucilan terhadap penderita gangguan jiwa, terutama bagi yang dalam kondisi mengganggu masyarakat.
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis belum mencapai target sebesar 93,5% hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit TBC, masih ada masyarakat yang tidak mau memberikan sampel sputum, capaian pelayanan di fasilitas swasta tidak terlapor, faktor geografis yang sulit, dan kurangnya pengetahuan bidan desa mengenai program TBC.
12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar sesuai dengan target sebesar 98.98% karena adanya temuan kasus TB yang merupakan salah satu target dalam SPM HIV belum tercapai.

#### Solusi

Akan dilakukan transformasi sistem pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) sampai ke desa. Dengan mengintegrasikan semua program yang ada di Dinas Kesehatan. Layanan primer adalah layanan dasar yang dilakukan oleh puskesmas. Integrasi dilakukan ke semua program termasuk FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) lainnya.

### **4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM**

#### **4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang urusan pekerjaan umum adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang pekerjaan umum yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan

Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari;
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik;

#### 4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama kurun waktu tertentu dan termasuk perhitungan pembiayaannya adalah 100% (Seratus Persen).

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Capaian
		Indikator Pencapaian	Target Capaian	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	2024
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	100%	2024

#### 4.3.3 Realisasi

Pengukuran capaian pelaksanaan SPM pada jenis pelayanan Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten dan jenis pelayanan pengukuran SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik yang terealisasi sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Capaian
		Indikator Pencapaian	Capaian %	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	67.64	2024
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	84.55	2024

#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

Berdasarkan hasil realisasi anggaran sampai dengan bulan desember 2024, maka diperoleh data sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1.	Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4,502,612,545	4.367.524.079	97.00
2.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	137,565,129	135.458.400	98.47
3.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2,395,000,000	2.286.768.500	95.48
4.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	10,789,799,000	10.750.806.000	99.64
5.	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	3,612,967,845	3.531.457.862	97.74
6.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	13.136.703.100	12.438.207.996	95.08
7.	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	1.424.218.900	1.128.350.000	80.60
8.	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	277.769.700	106.597.500	38.38
9.	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	197.763.063	23.779.794	12.02
JUMLAH		35.397.628.282	33.820.637.135	95.54

#### 4.3.5 Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM bidang urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2024 didukung oleh personil sebanyak 123 orang.

a. Jumlah Pegawai Dinas PUPR dari Bulan Januari s.d Desember 2024 : 123 orang.

1. Aparatur Sipil Negara : 58 Orang.
2. Non Aparatur Sipil Negara : 65 Orang.

b. Rincian Pegawai PUPR.

1. Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	17
2.	S1	25
3.	D4	1
4.	D3	4
5.	SLTA	11
6.	SLTP	-
7.	SD	-
JUMLAH		58 Orang

2. Tingkat Pangkat / Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1.	I	-
2.	II	5
3.	III	43
4.	IV	6
5.	NON GOLONGAN	4
JUMLAH		58 Orang

3. Jenis Kediklatan

NO	DIKLAT	JUMLAH
1.	DIKLAT STRUKTURAL	1
2.	DIKLAT FUNGSIONAL	-
3.	DIKLAT PPNS	-
JUMLAH		1 Orang

Jumlah Eselon

- a. Eselon II : 1 Orang.
- b. Eselon III : 6 Orang.
- c. Eselon IV : 15 Orang.

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dihadapi terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

1. Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatasnya anggaran / APBD.
2. Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.
3. Kelembagaan dari Tingkat Desa Kelompok Pengelola Sarana dan Prasarana Air Minum (KPSPAM) belum bekerja dengan maksimal dan kurangnya dukungan dari pihak desa.

4. Penyelenggara terkait Pemeliharaan dan Operasional Perkotaan yaitu PDAM Lematang Enim belum menerapkan SOP yang benar
5. Masih sangat kecilnya partisipasi dari pihak swasta dan Dunia Usaha.
6. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) di desa belum bekerja maksimal pasca pembangunan.
7. Jarangnya iuran dari warga penerima manfaat IPAL Komunal.
8. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam menjaga, memelihara dan mengelola sarana dan prasarana air minum (SPAM) yang terbangun dan Air Limbah sehingga masih ada yang melakukannya di Pinggiran Sungai.
9. Kurangnya penyuluhan dari Pihak desa dan Sanitarian terkait pentingnya penggunaan jamban dan tangka septik sehat.

Solusi yang mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim terkait permasalahan di atas adalah :

- a. Menambah anggaran untuk kegiatan yang belum terlaksana.
- b. Meningkatkan kompetensi atau menambah personil dalam proses pendataan serta identifikasi kegiatan.
- c. Perlunya sosialisasi SPM Bidang Air Minum dan Air Limbah agar bisa dipahami juga oleh Dinas yang terkait untuk mendukung SPM tersebut.
- d. Menambah atau membuat penganggaran untuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan SPM ke lokasi sasaran/target.
- e. Perumda Air Minum khususnya untuk layanan di Perkotaan kualitas airnya lebih di tingkatkan lagi, sedangkan untuk layanan air minum di Perdesaan KPSPAM yang sudah ada dapat menjaga kualitas airnya yang didistribusikan ke Pelanggan.
- f. Dinas yang terkait menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis dalam pengelolaan air minum dan air limbah.
- g. Mengalokasikan anggaran untuk pendataan bidang air minum dan air limbah secara berkala.
- h. Perlunya penganggaran untuk pengkajian kebutuhan sistem air limbah skala kawasan/kota yang hasilnya nanti bisa digunakan dalam perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

## 4.4 Urusan Perumahan Rakyat

### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Adapun terkait pelayanan SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Muara Enim sebagaimana tersebut di atas, terdapat 2 poin urusan pelayanan dasar yaitu sebagai berikut :

- A. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota;
- B. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota.

### 4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

NO	INDIKATOR SPM	TARGET KINERJA				
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
	TOTAL CAPAIAN	100%	100%	100%	100%	100%

#### 4.4.3 Realisasi Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN %
Kategori Indeks Pencapaian SPM		Tuntas Paripurna			100
<b>1</b>	<b>Penyediaan &amp; rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota</b>				100
1.1	Persentase pencapaian penerima layanan dasar(80%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	80
	Jumlah yang harus dilayani	22	22	0	100
1.2	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (20%)				20
	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	0
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	2	2	0	100
	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	12	12	0	100
	Pembangunan baru dilokasi baru/relokasi bagi korban bencana	8	8	0	100
<b>2</b>	<b>Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota</b>				100
2.1	Persentase pencapaian penerima layanan dasar (80%)	81202	81202	0	100
2.2	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (20%)	0	0	0	20
	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0	0	0
	Subsidi uang sewa	0	0	0	0
	Penyediaan rumah layak huni	0	0	0	0

#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA (Kuantitatif)	PAGU INDUKATIF (Rp.)	KEUANGAN	
				(Rp)	( % )
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		2.117.218.100	603.845.620	28,52
1.a	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		578.734.300	409.216.200	70,71
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	123.813.100	105.343.000	85,08
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	344.231.800	244.749.100	71,10
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.689.400	59.124.100	53,41
1.b	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		168.610.000	152.810.600	90,63
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	180 orang	168.610.000	152.810.600	90,63
1.c	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.369.873.800	41.818.820	3,05
	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	7 unit rumah	1.369.873.800	41.818.820	3,05
	<b>JUMLAH</b>		<b>2.117.218.100</b>	<b>603.845.620</b>	<b>28,52</b>

#### 4.4.5 Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM bidang urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2024 didukung oleh personil sebanyak 80 orang.

a. Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dari Bulan Januari s.d Desember 2024: 80 orang.

1. Aparatur Sipil Negara : 45 Orang.
2. Non Aparatur Sipil Negara : 35 Orang.

b. Rincian Pegawai Disperkimtan.

1. Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	13
2.	S1	17
3.	D4	5
4.	D3	-
5.	SLTA	9
6.	SLTP	-
7.	SD	-
JUMLAH		44 Orang

2. Tingkat Pangkat / Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1.	I	-
2.	II	8
3.	III	28
4.	IV	5
5.	NON GOLONGAN	3
JUMLAH		44 Orang

3. Jenis Kediklatan

NO	DIKLAT	JUMLAH
1.	DIKLAT STRUKTURAL	18
2.	DIKLAT FUNGSIONAL	-
3.	DIKLAT PPNS	-
JUMLAH		18 Orang

Jumlah Eselon

- a. Eselon II : 1 Orang.
- b. Eselon III : 5 Orang.
- c. Eselon IV : 1 Orang.

#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dihadapi terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain :

- a. belum adanya landasan hukum dan kepastian hukum pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana maupun relokasi rumah program Kabupaten/Kota
- b. belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatasnya anggaran/APBD

- c. masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan
- d. belum sinerginya implementasi SPM, belum terintegrasi dan terinternalisasinya program, kegiatan dan sub kegiatan
- e. terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan SPM
- f. terbatasnya biaya upah dan material sehingga masih membutuhkan swadaya dari warga penerima bantuan

Solusi yang mungkin dapat dilakukan terkait permasalahan di atas adalah:

- a) Menambah anggaran untuk kegiatan yang belum terlaksana
- b) Meningkatkan kompetensi atau menambah personil dalam proses pendataan serta identifikasi kegiatan
- c) Membuat rancangan Peraturan Bupati mengenai Pedoman Pelaksanaan Relokasi Rumah Korban Bencana dan Program Kabupaten Muara Enim

#### **4.5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berada di tiga Perangkat Daerah yaitu :

##### **I. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

###### **4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat adalah: Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

###### **4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah.**

Target pencapaian SPM bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama kurun waktu tertentu dan termasuk perhitungan pembiayaannya adalah 100% (Seratus Persen).

No	Jenis Pelayanan Dasar	Data Pendukung		Target (%)
		Pembilang	Penyebut	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah penyelesaian perda dan atau perkara yang diselesaikan di tahun bersangkutan	jumlah pelanggaran perda dan atau perkara yang dilaporkan dan atau dipantau di tahun bersangkutan	100

### 4.5.3 Hasil Capaian

Capaian atas indikator sasaran SPM bagi daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Muara Enim adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dari Satpol PP Kabupaten Muara Enim meningkat dengan indikator Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi warga masyarakat Kabupaten Muara Enim seperti yang dimaksudkan dalam indikator sasaran SPM. Demikian juga pencapaian mutu barang/Jasa/SDM telah tercapai 100% dengan capaian realisasi sesuai dengan yang ditargetkan pada tahun berjalan.

## CAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN %
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				97
	PRESENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
		Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Total Yang terlayani	Yang Belum terlayani	
	A. Jumlah yang harus Dilayani	14	14	0	100
	PRESENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18
	B. Jumlah mutu barang / jasa / SDM	Jumlah mutu barang / jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu barang / jasa yang tersedia	Jumlah mutu barang / jasa yang belum tersedia	89
	1. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti	0	0	0	100

	dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)				
2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	2	2	0	100
3.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	247	87	160	64,77
4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	0	0	0	100
5.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	0	0	0	100
6.	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	515	515	0	100

#### 4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Satpol PP Kabupaten Muara Enim untuk mendukung penerapan SPM Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 baik secara langsung maupun tidak langsung dengan rincian sebagai berikut :

**REALISASI KEUANGAN SPM TRANTIBUMLINMAS  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUARA ENIM  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA (Kuantitatif)	PAGU INDUKATIF (Rp.)	KEUANGAN	
				(Rp)	( % )
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>665.985.940</b>	<b>302.772.040</b>	<b>45,46</b>
A	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>665.985.940</b>	<b>302.772.040</b>	<b>45,46</b>

1	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia		317.669.940	90.435.640	28,47
2	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		-	-	-
3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan uji kompetensi bagi pejabat Fungsional		-	-	-
4	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat melalui pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas		-	-	-
5	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum melalui deteksi dini, dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan		340.441.000	204.776.400	60,15
6	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		-	-	-
7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum		7.875.000	7.560.000	96,00
B	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota</b>		-	-	-
1	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		-	-	-
2	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)		-	-	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>665.985.940</b>	<b>302.772.040</b>	<b>45,46</b>

#### 4.5.5 Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2024 didukung oleh personil sebanyak 392 orang.

- a. Jumlah Pegawai Satpol PP dari Bulan Januari s.d Desember 2024 : 392 orang.

1. Aparatur Sipil Negara : 22 Orang.
2. Non Aparatur Sipil Negara : 368 Orang.
3. PPNS Satpol PP : 2 Orang.

b. Rincian Pegawai Satpol PP.

1. Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	3
2.	S1	83
3.	D3	3
4.	D2	1
5.	SLTA	302
6.	SLTP	1
7.	SD	-
JUMLAH		392 Orang

2. Tingkat Pangkat / Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1.	I	0
2.	II	1
3.	III	20
4.	IV	3
5.	NON GOLONGAN	368
JUMLAH		392 Orang

3. Jenis Kediklatan

NO	DIKLAT	JUMLAH
1.	DIKLAT STRUKTURAL	8
2.	DIKLAT FUNGSIONAL	-
3.	DIKLAT PPNS	3
JUMLAH		11 Orang

Jumlah Eselon

- a. Eselon II : - Orang.
- b. Eselon III : 4 Orang.
- c. Eselon IV : 10 Orang.

#### 4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Jumlah PNS dan PPNS dilingkup Satpol PP Kabupaten Muara Enim yang belum memadai untuk menangani semua tugas dan tanggung jawab yang ada

- Beberapa subkegiatan belum teralokasikan anggaran yang cukup, terutama untuk Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Jumlah perda / perkara yang ditegakkan belum optimal.
- Perlunya pembaharuan SOP untuk memastikan bahwa semua aspek pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa mengganggu masyarakat.

#### Solusi

- Mengoptimalkan pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan berkelanjutan.
- Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana dan prasarana mobilitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak Pemerintah Kabupaten Muara Enim maupun Pemerintah Provinsi/Pusat melalui APBN, APBD maupun dana bantuan keuangan/hibah.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain dan menyusun rencana aksi bersama dalam pelaksanaan dan efektifitas penegakan Perda dan Perkada mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas serta jadwal kegiatan yang terkoordinasi dengan baik.
- Penyusunan dan pembaharuan SOP dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa SOP baru memenuhi kebutuhan semua pihak.

## **II. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

### **4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar**

SPM Sub Urusan Kebakaran diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Thn 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran.

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan balas atau jasa kebutuhan dasar yang berhak di peroleh oleh setiap warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten yaitu pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran.

SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Pemadam Kebakaran memiliki 1 jenis pelayanan dasar SPM yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan 4 mutu yang menjadi indikator capaian yaitu:

1. Tingkat waktu tanggap (respon time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi
2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi.
3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi.
4. Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan / Sumber Daya Manusia

#### 4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Pada Permendagri No. 114 Thn 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (respon time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	100%
		Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100%
		Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100%
		Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan / Sumber Daya Manusia	100%

### 4.5.3 Hasil Capaian

Hasil capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Muara Enim Sub Urusan Kebakaran Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN %
<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR</b>						<b>86.31</b>
<b>1.</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>					<b>76</b>
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total yang harus dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	<b>76</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	721	545	176	<b>76</b>
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					<b>0</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	<b>92</b>
1	Tingkat waktu tanggap (respon time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi		66	66	0	<b>100</b>
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi		61	61	0	<b>100</b>
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran		120	110	10	<b>92</b>
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia		393	227	166	<b>58</b>
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran		61	61	0	<b>100</b>
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran		20	20	0	<b>100</b>

### 4.5.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka mencapai target penerapan Standar Pelayanan Minimal sub urusan Pemadam Kebakaran tahun 2024 terdapat 1 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan Pagu Anggaran

Sebesar 4.314.781.018 dengan realisasi sebesar 3.723.891.840 atau 86,31%.

Terdiri dari 5 kegiatan yaitu:

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
3. Investigasi Kejadian Kebakaran
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
5. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN %
<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)</b>			<b>4,314,781,018</b>	<b>3,723,891,840</b>	<b>86.31</b>
<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449</b>			<b>2,040,835,298</b>	<b>1,755,168,673</b>	<b>86.00</b>
	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	50,770,300	35,637,700	70.19
	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,139,413,900	897,271,892	78.75
	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	24,847,400	20,143,050	81.07
	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	758,697,740	757,555,455	99.85
	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	67,105,958	44,560,576	66.40
<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450</b>			<b>36,037,280</b>	<b>35,091,000</b>	<b>97.37</b>
	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	12,325,670	11,914,500	96.66
	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	23,711,610	23,176,500	97.74
<b>Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451</b>			<b>72,927,148</b>	<b>62,801,410</b>	<b>86.12</b>
	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	72,927,148	62,801,410	86.12
<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459</b>			<b>448,462,825</b>	<b>416,039,557</b>	<b>92.77</b>

	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	112,341,525	101,654,650	90.49
	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	336,121,300	314,384,907	93.53
<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458</b>			<b>1,716,518,467</b>	<b>1,454,791,200</b>	<b>84.75</b>
	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	654,588,017	441,391,200	67.43
	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	94,000,000	45,500,000	48.40
	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	967,930,450	967,900,000	100
<b>JUMLAH PROGRAM</b>			<b>4,314,781,018</b>	<b>3,723,891,840</b>	<b>86.31</b>

#### 4.5.5 Dukungan Personil

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim dengan Membentuk Kelembagaan Tipe B Mempunyai Jumlah Sarana dan Prasaran Mobil Damkar sebanyak 23 Unit ,Mobil Tangki 3 Unit, dan mempunyai Pos Damkar Sebanyak 14 Pos dengan meliputi 22 Kecamatan.

Pelaksanaan SPM sub urusan Kebakaran Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2024 didukung oleh personil sebanyak 141 orang.

a. Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim dari Bulan Januari s.d Desember 2024: 141 orang.

1. Aparatur Sipil Negara : 72 Orang (23 PNS dan 49 PPPK)
2. Non Aparatur Sipil Negara : 69 Orang

b. Rincian Pegawai Satpol PP.

1. Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	1
2.	S1	16
3.	D4	-
4.	D3	1
5.	SLTA	122
6.	SLTP	-
7.	SD	1
JUMLAH		141 Orang

2. Tingkat Pangkat / Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1.	I	0
2.	II	55
3.	III	13
4.	IV	4
5.	NON GOLONGAN	69
JUMLAH		141 Orang

3. Jenis Kediklatan

NO	DIKLAT	JUMLAH
1.	DIKLAT STRUKTURAL	1
2.	DIKLAT FUNGSIONAL	62
3.	DIKLAT PPNS	-
JUMLAH		63 Orang

Jumlah Eselon

- a. Eselon II : 1 Orang.
- b. Eselon III : 4 Orang.
- c. Eselon IV : 8 Orang.

#### 4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana armada pemadam bahaya kebakaran sehingga membuat personil damkar sering sekali kurang optimal ketika sedang berada di lokasi kebakaran, hambatan yang sering terjadi dilapangan

yaitu kondisi jalan menuju kelokasi dan keterlambatan laporan dari masyarakat.

2. Masih kurangnya kualitas sumberdaya manusia serta kurangnya pelatihan pelatihan terhadap bencana terutama bagi personil pamadam bahaya kebakaran dan penyelamatan.
3. Aksesibilitas (jalan sempit,gaura,portal).
4. Kurangnya saran dan prasarana (mobil damkar)
5. Kurangnya sumber air (hydran, kolam, bak penampungan, sungai) yang dapat dipergunakan.
6. Kepadatan lalu lintas dalam kota.
7. Konstruksi bangunan di dominasi oleh bahan bahan kayu dan atap rumbia.
8. Kerapatan bangunan dari satu bangunan ke bangunan yang lain.
9. Belum idealnya sarana prasarana penanggulangan kebakaran, penyelamatan serta bencana lainnya.
10. Belum maksimalnya pos dan armada pemadam.
11. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dibidang DAMKAR dan penyelamatan.

#### Solusi

1. Untuk memaksimalkan Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan kebakaran untuk pengadaaan/penempatan satu kecamatan satu damkar,dijelaskan disetiap kantor kecamatan terdapat pos sektor DAMKAR yang dilengkapi sarana dan prasarana damkar,Sarana dan Prasarana Penyelamatan dan Evakuasi ,serta kesitaan aparaturnya selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian atau Shift.
2. Melakukan pengembangan peningkatan produktivitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan secara terus menerus kepada seluruh pegawai agar mampu mengemban tugas dan pekerjaan sebaik mungkin.
3. Telah terbentuknya Forum Komunikasi DPKP Muara Enim.
4. Telah melakukan konsolidasi dengan pihak perusahaan dalam wilayah Kabupaten Muara Enim mengenai penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

5. Telah melakukan MOU dengan Kabupaten Kabupaten Kota yang ada diperbatasan untuk kerjasama manajemen penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
6. Telah melakukan pendapatan peralatan DAMKAR dan Rescue di perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Muara Enim.
7. Membuat perencanaan pengembangan POS/UPT di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim .
8. Mengajukan pembuatan usulan pengadaan Sarpras melalui dana DAK Provinsi, Pusat dan Hibah serta Proposal ke Perusahaan.
9. Pembentukan Public Safety Center (PSC 119) Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (PGDT) Kabupaten Muara Enim perlu Penambahan Pos dan Armada Pemadam.

### **III. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)**

#### **4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan jenis dan pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, sesuai kebutuhan dasar dan yang penyediaannya berupa barang dan/atau jasa yang diberikan sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku. Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat adalah : Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

#### **4.5.2 Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah**

Target Pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim telah memasukan target SPM pada RPJMD, target pencapaian SPM Program Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Muara Enim dari segi penganggarnya pada Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

**TARGET CAPAIAN**  
**PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**  
**SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA SPM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	50	50	100%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	36	36	100%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	3,009	3,009	100%

#### 4.5.3 Realisasi Hasil Capaian

Hasil pencapaian SPM jenis pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta/kontribusi positif dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Sedangkan kontribusi dari peran serta masyarakat terhadap upaya pemenuhan indikator SPM garapan bidang tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2024 ini untuk terinventarisirnya pemutahitan data petugas/ aparaturnya dan tersedianya personil (petugas/aparaturnya yang melakukan kegiatan untuk memenuhi cakupan indikator yang ditetapkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tersebut, meskipun ketersediaan SDM masih belum memadai untuk menunjang keberhasilan optimal SPM yang harus dipenuhi kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2024 ini. Berikut kami sampaikan Hasil Capaian SPM Jenis Pelayanan Dasar sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					98.33
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					95.00
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			-80%		80.00
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS	Orang	289	289	0	100

	DILAYANI					
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	15.00
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>					75.00
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	7	7	0	0.00
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	22	22	0	100
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana(tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	250	250	0	100
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	10	10	0	100
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	Orang	119	119	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>					100
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	Unit	63	63	0	100
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	56	56	0	100
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	Orang	30442	30442	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	

B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						100
1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	3	3	0	100	
2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	15216	15216	0	100	
3 . Melakukan respon cepat darurat bencana(penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	7	7	0	100	
4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas(respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0	0	0	100	
5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	15216	15216	0	100	

#### 4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim untuk mendukung penerapan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 baik secara langsung maupun tidak langsung pada Program Penanggulangan Bencana dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	250 Orang	157.416.795	96.674.200	61,41
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	5 Kawasan	187.506.072	137.388.600	73,27
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	59 Orang	1.425.935.462	1.140.154.528	79,96
		Penyusunan Rencana Kontijensi	3 Dokumen	223.666.400	48.073.700	21,49
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	3 Dokumen	408.007.675	267.998.488	65,68

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2 Dokumen	87.652.900	78.484.172	89,54
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	84.889.899	58.320.180	68,70
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3 Laporan	533.116.885	295.661.419	55,46
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	2 Dokumen	123.546.433	95.824.864	77,56
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70.761.014	52.762.223	74,56
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	26.145.392	14.603.225	55,85
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	15 Laporan	197.472.614	188.508.349	73,73
	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	94.079.882	67.744.296	72,01

#### 4.5.5 Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2024 didukung oleh personil sebanyak 77 orang.

Data Pegawai

a. Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim dari Bulan Januari s.d Desember 2024 : 77 orang.

1. Aparatur Sipil Negara : 19 Orang.

2. Non Aparatur Sipil Negara : 58 Orang.

b. Rincian Pegawai BPBD

1. Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	1
2.	S1	11
3.	D3	1
4.	D2	-
5.	SLTA	6
6.	SLTP	-
7.	SD	-
JUMLAH		19 Orang

## 2. Tingkat Pangkat / Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1.	I	-
2.	II	4
3.	III	14
4.	IV	1
5.	NON GOLONGAN	58
JUMLAH		77 Orang

## 3. Jenis Kediklatan

NO	DIKLAT	JUMLAH
1.	DIKLAT STRUKTURAL	1 Orang
2.	DIKLAT FUNGSIONAL	-
3.	DIKLAT PPNS	-
JUMLAH		1 Orang

### c. Jumlah Eselon

- A. Eselon II : - Orang.
- B. Eselon III : 1 Orang.
- C. Eselon IV : 4 Orang.

## 4.5.6 Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

Pada tahun 2024 beberapa kegiatan SPM sudah dapat dilaksanakan namun belum maksimal dalam pendanaannya. Ada beberapa kegiatan yang tidak memiliki anggaran karena keterbatasan jumlah anggaran yang ada pada APBD BPBD.

### b. Solusi

Solusi untuk permasalahan tersebut yaitu untuk kegiatan yang bersifat kajian yang menghasilkan dokumen dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain.

## **4.6. URUSAN SOSIAL**

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Muara Enim dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

### **4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar**

SPM Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar, yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kab/Kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti Skala Kab/Kota;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Alam dan Sosial.

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti dilakukan dalam bentuk Layanan Rehabilitasi Sosial dalam Keluarga dan Masyarakat dengan cara:

- a. Memberikan Dukungan Pelayanan/Pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam Keluarga dan Masyarakat;
- b. Memberikan bimbingan kepada Keluarga dan Masyarakat.

- c. Mewujudkan Upaya Kesejahteraan Sosial Perlindungan Anak dan Terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melihat berdasarkan hak-hak Anak.

Sedangkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah dilakukan dalam bentuk Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana dimana kebutuhan dasar disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

#### 4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 tercantum dalam tabel berikut:

TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL TAHUN 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET CAPAIAN %
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	85
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	85
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	85
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	85
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	85

#### 4.6.3 Realisasi Hasil Capaian

Hasil Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 dapat dilihat melalui capaian indikator kinerjanya dengan menggunakan formulasi/rumus yaitu:

- a. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti dibagi Jumlah Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan

Pengemis yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti dikali Seratus Persen (100%);

- b. Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi Kebutuhannya dibagi Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten/Kota dikali Seratus Persen (100%).

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 ditunjukkan pada tabel berikut:

**HASIL PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL  
DINAS SOSIAL TAHUN 2024**

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			%
<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>					<b>87.80</b>
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti</b>					<b>90.77</b>
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	156	156	0	100
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					10.77
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		jumlah mutu yang harus dilayani / dipenuhi	jumlah mutu yang terlayani / terpenuhi	mutu yang belum terlayani / terpenuhi	53.85
1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	8	8	0	100
2. Penyediaan permakanaan(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	Orang	27	27	0	100
3. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	83	83	0	100
4. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	20	20	0	100

5. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	2	2	0	100
6. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	0	100
13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	16	16	0	100
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti</b>					<b>86.67</b>
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	20	20	0	100
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					6.67
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		jumlah mutu yang harus dilayani / dipenuhi	jumlah mutu yang terlayani / terpenuhi	mutu yang belum terlayani / terpenuhi	33.33
1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	9	9	0	100
2. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	8	8	0	100
3. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	0	100
4. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	3	3	0	100
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti</b>					<b>89.23</b>
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	79	79	0	100
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					9.23
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		jumlah mutu yang harus dilayani / dipenuhi	jumlah mutu yang terlayani / terpenuhi	mutu yang belum terlayani / terpenuhi	46.15
1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	5	5	0	100
2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh	Orang	1	1	0	100

dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)					
3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	36	36	0	100
4. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	32	32	0	100
5. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2	2	0	100
6. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	3	3	0	100
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti</b>					<b>88.33</b>
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	6	6	0	100
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					8.33
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		jumlah mutu yang harus dilayani / dipenuhi	jumlah mutu yang terlayani / terpenuhi	mutu yang belum terlayani / terpenuhi	41.67
1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	2	2	0	100
2. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1	1	0	100
3. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	2	2	0	100
4. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	1	1	0	100
5. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	0	0	0	100
<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>					<b>84.00</b>
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	28064	28064	0	100
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					4.00

B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		jumlah mutu yang harus dilayani / dipenuhi	jumlah mutu yang terlayani / terpenuhi	mutu yang belum terlayani / terpenuhi	20.00
1. Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	28064	28064	0	100

#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

Realisasi pencapaian SPM oleh Dinas Sosial pada tahun 2024 tidak terlepas dari peran serta positif Pemerintah Daerah maupun masyarakat di Kabupaten Muara Enim terhadap pemenuhan SPM yang direalisasikan alokasi/pagu anggaran sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN %
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			480,025,200	252,473,500	52.60
	1	Penyediaan permakanan	Orang	35,799,300	0	0
	2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0
	3	Penyediaan alat bantu	Orang	118,644,800	88,395,300	74.50
	4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0
	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	0	0	0
	6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	196,959,600	158,831,600	80.64
	7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0
	8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0
	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0
	10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0
	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	24,242,400	0	0
	12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	104,379,100	5,246,600	5.03
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			1,038,855,950	721,574,700	69.46
	1	Penyediaan makanan	Orang	1,038,855,950	721,574,700	69.46
	2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0
	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0
	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0

3	Dana Operasional dari Kemensos	1,000,000,000	1,000,000,000	100
<b>TOTAL</b>		<b>2,518,881,150</b>	<b>1,974,048,200</b>	<b>78.37</b>

#### 4.6.5 Dukungan Personil

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Muara Enim yang berperan aktif membantu memberikan Pelayanan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 ditunjukkan tabel berikut:

#### DATA POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) TAHUN 2024

NO.	JUMLAH PSKS	JUMLAH POPULASI (ORANG)
1.	Pekerja Sosial Profesional	84
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	268
3.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	80
4.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	7
5.	Karang Taruna	1.035
6.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	22
7.	SDM PKH	73

Sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) internal pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim yang mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial dari jumlah Pegawai berdasarkan data sampai dengan Bulan Desember 2024, jumlah Pegawai Dinas Sosial sebanyak 25 (dua puluh lima) Orang sebagaimana tabel berikut:

#### KONDISI PEGAWAI BERDASARKAN ESSELON JABATAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024

NO.	URAIAN	Es.II	Es.III	Es.IV	Pelaksana	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1				1
2.	Sekretaris		1	3	4	8
3.	Bidang Rehabilitasi Sosial		1	3	0	4

4.	Bidang Pemberdayaan Sosial		0	3	0	3
5.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		0	2	3	5
6.	Bidang Penanganan Fakir Miskin		0	3	1	4
<b>JUMLAH</b>						<b>25</b>

#### **4.6.6 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 antara lain:

##### **1. Permasalahan**

- a. Kelompok jabatan fungsional khusus sesuai dengan struktur organisasi belum terisi;
- b. Sarana dan prasarana kantor yang kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;
- c. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani;

##### **2. Solusi**

- a. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim.
- b. Perlunya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS.

#### **4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **A. Bidang Urusan Pendidikan**

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan kegiatan :
  - Penambahan Ruang Kelas Sekolah
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain
  - Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir

- Pembangunan Sarana air bersih dan sanitary
- Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan Sanitary
- Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Pembangunan Pagar Sekolah

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan kegiatan :

- Penambahan Ruang Kelas Sekolah
- Penambahan Ruang Kelas Sekolah
- Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
- Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- Pengadaan Meubelair Sekolah
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
- Pelatihan Penyusunan Kurikulum
- Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTs/SMPLB
- Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP

- Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
- Pembangunan Pagar Sekolah
- Penyelenggaraan Peningkatan Mutu SSN
- Pembangunan Laboratorium/Ruang Pratikum Sekolah
- Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP
- Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitari SMP
- Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
- Pengadaan Alat-alat Praktek dan Peraga Siswa
- Pengadaan Meubelair sekolah SMP
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP
- Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, guru dan Penjaga Sekolah SMP
- Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP
- Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Guru Sekolah SMP
- Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah SMP
- Rehabilitasi sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah SMP
- Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi SMP
- Penyelenggaraan Peningkatan Mutu SSN SMP
- Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP

### 3. Program Pendidikan Non Formal

- Pengembangan pendidikan kecakapan hidup/life skill
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal
- Kesetaraan Fungsional (KF) Paket A, B dan C
- Pendidikan Peningkatan Pemahaman Ajaran dan Budaya Islam
- Sosialisasi tata tertib lalu lintas di jalan raya
- Penyelenggaraan Kompetisi bagi Pelajar
- Penyelenggaraan Kompetisi bagi Pelajar SMP

#### 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
- Pembinaan Kelompok Kerja Guru
- Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Sertifikasi

#### 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan
- Pembinaan Dewan Pendidikan
- Pembinaan Tenaga Kependidikan Komite Sekolah
- Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Pembinaan penyelenggaraan program sekolah gratis dan BOS
- Seleksi Tenaga Kependidikan Berprestasi/berdedikasi
- Penyediaan beasiswa bagi siswa SMU/SMK/MA dan Mahasiswa berprestasi

### **B. Bidang Urusan Kesehatan**

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

#### 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

- Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya.
- Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
- Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan /Audit Maternal Perinatal (AMP)
- Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)

#### 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

- Peningkatan pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat melalui program jaminan kesehatan masyarakat dan Jaminan Persalinan
  - Asuhan Persalinan Normal
  - Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Asuhan Persalinan Normal (APN)
  - Peningkatan Imunisasi
  - Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
  - Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)
4. Pelayanan Kesehatan Balita
- Pelatihan dan Pendidikan perawatan anak balita
  - Pembinaan posyandu dan UPGK Tingkat Kabupaten
  - Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
- Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat TK, SD, Sekolah menengah dan Sederajat
  - Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
- Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanganan wabah.
  - Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)
7. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
  - Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanganan wabah.
  - Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabelets Militus

- Peningkatan Surveilence Epidemiologi dan Penanganan wabah.
- Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Penderita Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

- Temu Kerja Kesehatan Jiwa
- Peningkatan Kesehatan Masyarakat/Pelayanan Kesehatan Jiwa
- Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

- Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus HIV

- Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- Peningkatan komunitas, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit
- Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional Kegiatan)

**C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum**

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
2. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
3. Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
4. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
5. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

**D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat**

Program kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 tidak terlepas dari tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang

dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024. Untuk dapat merealisasikan tujuan, sasaran dan kebijakan tersebut, maka perlu disusun program dan kegiatan.

Adapun sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut diatas berasal dari APBD Kabupaten Muara Enim. Adapun Program dan Kegiatan Yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat (mencakup Bidang Urusan Pekerjaan Umum) Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - a. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - b. Identifikasi Lahan - lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Bangunan.
3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

#### **E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

- **Satuan Polisi Pamong Praja**

Pada tahun 2024 Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim melaksanakan urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dan keterkaitannya dengan penyerahan urusan wajib dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebanyak 1 (satu) Program, yaitu :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan subkegiatan :

- a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
- b. Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda an Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- c. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota
- d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Azazi Manusia
- f. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

- **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Program Penanggulangan Bencana di tahun 2024 yaitu :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
  - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
  - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Rencana Kontijensi sebesar
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
  - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

- Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota

- **Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
3. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyeamatan, dan Penanggulangan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
4. Alokasi Program Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
  - (1) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia
  - (2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi
  - (3) Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi

## **F. Bidang Urusan Sosial**

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan kegiatan :

- Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
  - Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
  - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin
  - Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
  - Kegiatan Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Keluarga Miskin
  - Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
  - Kegiatan Pembinaan KUBE Fakir Miskin
  - Kegiatan Pemberdayaan Keluarga (Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni)
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial :
- Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak
  - Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal
  - Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
  - Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penganggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan
  - Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dari Kejadian Luar Biasa
  - Kegiatan Pemberian Jaminan Kesejahteraan Sosial
3. Program Pembinaan Anak Terlantar
- Kegiatan Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar
  - Kegiatan Perlindungan Sosial Terhadap Orang Terlantar/Tidak Mampu
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

- Kegiatan Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
  - Kegiatan Peningkatan SDM Penyandang Cacat
5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
  - Kegiatan Pemantauan Kemajuan Perubahan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial
  - Kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Kegiatan Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
  - Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
  - Kegiatan Pemeliharaan Makam Pahlawan di Kabupaten Muara Enim
  - Kegiatan Monev Pelaporan Bantuan Sosial Pangan untuk Keluarga Miskin
  - Kegiatan Pemilihan Orsos, KT dan PSM Berprestasi
  - Kegiatan Pelatihan Manajemen KT, Orsos dan PSM
  - Kegiatan Monev Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 meliputi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam tahun 2024, baik capaian kinerja makro maupun capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri atas Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) serta Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Penyusunan laporan ini dilakukan secara terkoordinasi melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan urusan pemerintahan yang diampu. Keberhasilan yang telah dicapai dengan kerja keras selama ini belum sebanding dengan harapan semua pihak, namun demikian ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Muara Enim dan *stakeholders* yang telah menjalin kerjasama yang baik sehingga apa yang diprogramkan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 ini disusun sebagai bahan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar kedepan pelayanan prima dapat terwujud. Saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menunjukkan jalan-Nya dan meridhoi usaha kita bersama untuk mewujudkan Muara Enim yang lebih baik.



**PEMERINTAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**